



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**AGUSTUS
2026**



LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur

AGUSTUS
2026



● Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

**Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT**

Jl. El Tari No. 39 Kupang – NTT
[0380] 832-364/827-916 ; fax : [0380] 822-103
www.bi.go.id

Kata Pengantar

Sejalan dengan salah satu tugas pokok Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat KPw BI NTT) memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi secara optimal dalam proses formulasi kebijakan moneter. Secara triwulanan, KPw BI NTT melakukan pengkajian dan penelitian terhadap perkembangan perekonomian daerah sebagai masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan moneter tersebut. Selain itu kajian/laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi eksternal *stakeholder* setempat, yaitu Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat serta *stakeholder* lainnya.

Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro Regional, Inflasi, Stabilitas Sistem Keuangan, Perkembangan Sistem Pembayaran, Kesejahteraan serta Prospek Perekonomian Daerah pada periode mendatang. Dalam menyusun laporan ini digunakan data yang berasal dari internal Bank Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini dinas/instansi terkait.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam bentuk saran, kritik, dan masukan sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini, dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

Kupang, Agustus 2026
**Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

ttd.

Adidoyo Prakoso
Deputi Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	ix
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi NTT	xii



BAB I

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1. Kondisi Umum	02	2.2.5. Kelompok Kesehatan	23
1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	02	2.2.6. Kelompok Transportasi	23
1.2.1. Konsumsi	03	2.2.7. Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	24
1.2.2. Investasi	05	2.2.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya	24
1.2.3. Ekspor dan Impor	07	2.2.9. Kelompok Pendidikan	25
1.3. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	09	2.2.10. Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/ Restoran	25
1.3.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10	2.2.11. Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	26
1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11	2.3. Inflasi Berdasarkan Kota/Kabupaten	26
1.3.3. Konstruksi	12	Pengukuran IHK	
1.3.4. Lapangan Usaha Lainnya	13	2.3.1. Kota Kupang	27
BOKS 1. Potensi Rumput Laut NTT sebagai Nilai Tambah Ekonomi	15	2.3.2. Maumere	27
		2.3.3. Waingapu	27
		2.3.4. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)	27
		2.3.5. Kabupaten Ngada	28
		2.4. <i>Tracking</i> dan Proyeksi Inflasi III 2026	28
		2.5. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID	28

BAB II

Perkembangan Inflasi Daerah

2.1. Perkembangan Inflasi Provinsi NTT	20
2.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	20
2.2.1. Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau	20
2.2.2. Kelompok Pakaian & Alas Kaki	22
2.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga	22
2.2.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	22

BAB III

Pembiayaan Daerah Daerah

3.1.	Kondisi Umum	32
3.1.1.	Kinerja Perbankan	32
3.1.2.	Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	32
3.1.3.	<i>Loan to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Loan</i>	32
3.1.4.	Penyaluran Kredit	33
3.2.	Kinerja Korporasi Non-UMKM	35
3.2.1.	Kondisi dan Prospek Usaha	35
3.2.2.	Penyaluran Kredit Korporasi	35
3.3.	Kinerja Rumah Tangga	36
3.3.1.	Kondisi Rumah Tangga	36
3.3.2.	Penghimpunan DPK Rumah Tangga	36
3.3.3.	Penyaluran Kredit Rumah Tangga	37
3.4.	Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	37
3.4.1.	Penyaluran Kredit UMKM	37

BOKS 2. Potensi Komoditas Pendorong Ekonomi Provinsi NTT

BAB IV

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1.	Kondisi Umum	44
4.2.	Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai Provinsi NTT	44
4.2.1.	Gambaran Umum Sistem Pembayaran Non-tunai di Provinsi NTT	44
4.2.2.	Transaksi Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS) di Provinsi NTT	44
4.2.3.	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi NTT	45
4.2.4.	Transaksi BI-FAST di Provinsi NTT	45
4.3.	Perkembangan Instrumen Pembayaran Non-Tunai Provinsi NTT	46

4.3.1.	Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Provinsi NTT	46
4.3.1.1.	Perkembangan Kartu ATM/ Debet	46
4.3.1.2.	Perkembangan Kartu Kredit di Provinsi NTT	46
4.3.2.	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik di Provinsi NTT	47
4.3.3.	Perkembangan QRIS di Provinsi NTT	48
4.3.4.	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	49
4.4.	Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai Provinsi NTT	49
4.4.1.	Transaksi Sistem Pembayaran Tunai di Provinsi NTT	49
4.4.2.	Perkembangan Kegiatan Layanan Kas di Provinsi NTT	50
4.4.2.1.	Perkembangan Penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di Bank Indonesia Provinsi NTT	51

BAB V

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1.	Kondisi Umum	54
5.2.	Perkembangan Ketenagakerjaan	54
5.3.	Perkembangan Kesejahteraan	57

BAB VI

Prospek Perekonomian Daerah

6.1.	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT	64
6.2.	Prospek Inflasi di Provinsi NTT	70
6.3.	Rekomendasi	71

BOKS 3. Gempa Flores dan Dinamika Ekonomi Nusa Tenggara Timur

Daftar Istilah	76
----------------	----

Daftar Grafik

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional Secara Triwulanan	2	Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT	20
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi di Balinusra	2	Grafik 2.2.	Perkembangan Inflasi pada wilayah pengukuran IHK di Provinsi NTT	20
Grafik 1.3.	Indeks Keyakinan Konsumen	4	Grafik 2.3.	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	21
Grafik 1.4.	Komponen Indeks Keyakinan Konsumen NTT	4	Grafik 2.4.	Perkembangan Produksi Komoditas Beras di Provinsi NTT	21
Grafik 1.5.	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	4	Grafik 2.5.	Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	22
Grafik 1.6.	Perkembangan Kredit Konsumsi Menurut Penggunaannya	4	Grafik 2.6.	Inflasi Subkelompok Pakaian dan Alas Kaki	22
Grafik 1.7.	Perkembangan Nilai Belanja Modal	6	Grafik 2.7.	Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	22
Grafik 1.8.	Perkembangan PMA	6	Grafik 2.8.	Inflasi Subkelompok Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	22
Grafik 1.9.	Perkembangan PMDN	6	Grafik 2.9.	Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga	23
Grafik 1.10.	Pangsa Sektoral PMA Provinsi NTT Triwulan II 2026	6	Grafik 2.10.	Inflasi Subkelompok Barang Pecah Belah & Peralatan Makan Minum	23
Grafik 1.11.	PMA Provinsi NTT Triwulan II 2026 Berdasarkan Kabupaten/Kota	6	Grafik 2.11.	Inflasi Kelompok Kesehatan	23
Grafik 1.12.	Pangsa Sektoral PMDN Provinsi NTT Triwulan II 2026	7	Grafik 2.12.	Inflasi Subkelompok Obat-Obatan & Produk Kesehatan	23
Grafik 1.13.	PMDN Provinsi NTT Triwulan II 2026 Berdasarkan Kabupaten/Kota	7	Grafik 2.13.	Inflasi Kelompok Transportasi	24
Grafik 1.14.	Perkembangan Net Ekspor	7	Grafik 2.14.	Inflasi Subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi	24
Grafik 1.15.	Perkembangan Total Ekspor dan Total Impor	7	Grafik 2.15.	Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	24
Grafik 1.16.	Pengeluaran Perikanan ke luar Provinsi	8	Grafik 2.16.	Inflasi Subkelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi	24
Grafik 1.17.	Perkembangan Pengeluaran Sapi ke luar Provinsi	8	Grafik 2.17.	Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	24
Grafik 1.18.	Perkembangan Ekspor Luar Negeri	8	Grafik 2.18.	Inflasi Subkelompok Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah	25
Grafik 1.19.	Komoditas Utama Ekspor Luar Negeri NTT Triwulan II 2026	8	Grafik 2.19.	Inflasi Kelompok Pendidikan	25
Grafik 1.20.	Negara Tujuan Ekspor NTT Triwulan II 2026	8	Grafik 2.20.	Inflasi Subkelompok Pendidikan Menengah	25
Grafik 1.21.	Perkembangan Impor Luar Negeri Provinsi NTT	9	Grafik 2.21.	Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/ Restoran	25
Grafik 1.22.	Komoditas Impor Luar Negeri Utama NTT Triwulan II 2026	9	Grafik 2.22.	Omzet Penjualan Eceran Makanan Jadi dan Minuman	25
Grafik 1.23.	Negara Asal Impor NTT Triwulan II 2026	9	Grafik 2.23.	Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	26
Grafik 1.24.	Perkembangan Produksi Jagung	10	Grafik 2.24.	Perkembangan Harga Komoditas Emas Dunia dan Domestik	26
Grafik 1.25.	Perkembangan Produksi Padi	10			
Grafik 1.26.	Perkembangan Produksi Hortikultura	11	Grafik 3.1.	Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Konvensional	32
Grafik 1.27.	Nilai Tukar Petani	11	Grafik 3.2.	Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Syariah	32
Grafik 1.28.	Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT	12	Grafik 3.3.	Pertumbuhan DPK dan Komponennya	32
Grafik 1.29.	Perkembangan Kredit Perdagangan	12			
Grafik 1.30.	Perkembangan Belanja Modal APBD dan APBN serta PMA	12			
Grafik 1.31.	Nilai Investasi di NTT	13			
Grafik 1.32.	Perkembangan Jumlah Kunjungan Tamu Hotel di NTT	13			
Grafik 1.33.	Tingkat Penghunian Kamar di Provinsi NTT	13			
Grafik 1.34.	Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara Komodo	14			
Grafik 1.35.	Perkembangan Kredit Akmamin	14			

Daftar Grafik

Grafik 3.4.	Suku Bunga Tertimbang berdasarkan Simpanan	32	Grafik 4.12.	Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/debet	46
Grafik 3.5.	Perkembangan LDR Bank Umum	33	Grafik 4.13.	Perkembangan Jumlah Kartu ATM/Debet	46
Grafik 3.6.	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	33	Grafik 4.14.	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit	47
Grafik 3.7.	Suku Bunga Tertimbang Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	34	Grafik 4.15.	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit	47
Grafik 3.8.	Perkembangan Kredit Produktif Berdasarkan Kategori Usaha	34	Grafik 4.16.	Perkembangan Jumlah Kartu Kredit	47
Grafik 3.9.	Pertumbuhan Kredit Usaha Produktif di Beberapa Sektor Ekonomi	34	Grafik 4.17.	Perkembangan Nominal Transaksi Elektronik	47
Grafik 3.10.	Distribusi Sektoral Kredit Usaha Produktif Prov. NTT	34	Grafik 4.18.	Perkembangan Volume Transaksi Elektronik	47
Grafik 3.11.	Kredit Usaha Berisiko	35	Grafik 4.19.	Pangsa Uang Elektronik <i>Chip-based</i> dan <i>Server-based</i>	48
Grafik 3.12.	Kredit Usaha Berisiko (<i>Loan at Risk</i>) di Beberapa Sektor Ekonomi Prov. NTT	35	Grafik 4.20.	Pangsa Uang Elektronik <i>Registered</i> vs <i>Unregistered</i>	48
Grafik 3.13.	Kondisi Profitabilitas Korporasi	35	Grafik 4.21.	Perkembangan Jumlah <i>Merchant</i> QRIS	48
Grafik 3.14.	Kondisi Likuiditas Korporasi	35	Grafik 4.22.	Perkembangan Jumlah <i>User</i> QRIS	48
Grafik 3.15.	Pertumbuhan Kredit Korporasi	36	Grafik 4.23.	Distribusi Spasial QRIS di Provinsi NTT	49
Grafik 3.16.	Kredit Berisiko (<i>Loan at Risk</i>) Korporasi	36	Grafik 4.24.	Perkembangan Nominal Transaksi KUPVA BB	49
Grafik 3.17.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga	36	Grafik 4.25.	Pangsa Transaksi Valuta Asing di KUPVA BB	49
Grafik 3.18.	Perkembangan Indeks Konsumen	36	Grafik 4.26.	Perkembangan Transaksi Tunai di Provinsi NTT	50
Grafik 3.19.	Pertumbuhan DPK Rumah Tangga	36	Grafik 4.27.	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Transaksi Tunai Provinsi NTT	50
Grafik 3.20.	Preferensi Jenis Simpanan Nasabah Rumah Tangga	37	Grafik 4.28.	Perkembangan Layanan Penarikan (<i>Outflow</i>) di Kas Titipan	50
Grafik 3.21.	Kinerja Penyaluran Kredit Rumah Tangga	37	Grafik 4.29.	Rasio <i>Outflow</i> Berdasarkan Tempat Penarikan	50
Grafik 3.22.	Pangsa Penyaluran Kredit Rumah Tangga	37	Grafik 4.30.	Perkembangan Layanan Kas Bank Indonesia	50
Grafik 3.23.	Pertumbuhan Kredit UMKM Prov. NTT	38	Grafik 4.31.	Perkembangan Penarikan Uang Tidak Layak Edar oleh Bank Indonesia Provinsi NTT	51
Grafik 3.24.	Risiko Kredit UMKM (<i>Loan at Risk</i>) Prov. NTT	38	Grafik 4.32.	Perbandingan Setoran UTLE Per Pecahan	51
Grafik 3.25.	Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Prov. NTT	38			
Grafik 3.26.	Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Prov. NTT	38			
Grafik 4.1.	Rata-rata Nilai Per Transaksi SKNBI dan RTGS	44	Grafik 5.1.	Perkembangan Tenaga Kerja	55
Grafik 4.2.	Perbandingan Transaksi RTGS dan SKNBI	44	Grafik 5.2.	Pangsa Lapangan Usaha Tenaga Kerja NTT Per Mei 2026	55
Grafik 4.3.	Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS	44	Grafik 5.3.	Perkembangan Status Tenaga Kerja Provinsi NTT	56
Grafik 4.4.	Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS	45	Grafik 5.4.	Pangsa Pendidikan Terakhir Tenaga Kerja Per Mei 2026	56
Grafik 4.5.	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI	45	Grafik 5.5.	TPT Kabupaten/Kota 2025	57
Grafik 4.6.	Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI	45	Grafik 5.6.	Perkembangan NTP Provinsi NTT	57
Grafik 4.7.	Perputaran Kliring Harian	45	Grafik 5.7.	NTP Provinsi NTT Berdasarkan Sub sektor	58
Grafik 4.8.	Persebaran Spasial Transaksi SKNBI	45	Grafik 5.8.	Perkembangan Persentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional	58
Grafik 4.9.	Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST	46	Grafik 5.9.	Sepuluh Provinsi Dengan Persentase Kemiskinan Tertinggi Per Maret 2026	58
Grafik 4.10.	Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST	46	Grafik 5.10.	Perkembangan Gini Ratio Provinsi	59
Grafik 4.11.	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/debet	46			

Daftar Grafik

Grafik 6.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulanan Tahun 2026	64	Grafik 6.6.	Perkembangan Pengeluaran Sapi NTT ke Provinsi Lain	67
Grafik 6.2.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2026	64	Grafik 6.7.	Target Produksi Padi NTT 2026	68
Grafik 6.3.	Perkembangan Komponen Indeks Keyakinan Konsumen NTT	65	Grafik 6.8.	Populasi Sapi Potong di NTT	68
Grafik 6.4.	Prospek Realisasi Belanja Modal Pemerintah di NTT (APBN dan APBD)	67	Grafik 6.9.	Penyaluran Pupuk Bersubsidi	68
Grafik 6.5.	Prospek Investasi di Provinsi NTT	67	Grafik 6.10.	Jumlah <i>Event</i> pada <i>Calendar of Event</i> NTT	69
			Grafik 6.11.	Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Triwulanan Tahun 2026	71
			Grafik 6.12.	Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Tahun 2026	71

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran	3	Tabel 5.1.	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi NTT	54
Tabel 1.2.	Perkembangan Realisasi APBD	5	Tabel 5.2.	Jumlah orang bekerja berdasarkan Lapangan Usaha	55
Tabel 1.3.	Perkembangan Realisasi Belanja APBN	5	Tabel 5.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik	56
Tabel 1.4.	Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha	10	Tabel 5.4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Karakteristik Kemiskinan	58
Tabel 1.5.	Perkembangan Omzet Penjualan Eceran	12	Tabel 5.5.	Indeks Kedalaman dan Kemiskinan Menurut Wilayah	59
			Tabel 5.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT menurut Dimensi Penyusun	60
Tabel 2.1.	Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	21	Tabel 6.1.	Perkembangan Realisasi Tahun 2025 dan Pagu Tahun 2026 APBD se Provinsi NTT	65
Tabel 2.2.	Komoditas Utama yang Memberikan Andil Inflasi dan Deflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan II 2026	21	Tabel 6.2.	Perkembangan Realisasi Tahun 2025 dan Pagu Tahun 2026 APBN di NTT	66
Tabel 2.3.	Perkembangan Inflasi Wilayah Pengukuran IHK Berdasarkan Kelompok Pengeluaran pada Triwulan I dan II 2026	26	Tabel 6.3.	<i>Outlook</i> Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	67
			Tabel 6.4.	<i>Outlook</i> Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	69
			Tabel 6.5.	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2026	70
			Tabel 6.6.	Risiko Inflasi Provinsi NTT Tahun 2026	71

Ringkasan Eksekutif

Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur

Agustus 2026

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2026. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada triwulan II 2026 tumbuh 5,01% (yoy), tetap tumbuh kuat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,32% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen utama kecuali pada komponen ekspor yang masih terakselerasi pada triwulan II 2026. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pada kinerja LU utama yaitu pertanian, perikanan dan kehutanan serta LU Administrasi pemerintahan, sementara pada LU konstruksi dan LU perdagangan besar dan eceran terjadi akselerasi pertumbuhan pada triwulan II 2026 yang membantu menjaga pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tetap tumbuh kuat.

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,56% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,40% (yoy). Tingkat inflasi ini sedikit di atas sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$, serta berada di atas capaian inflasi nasional yang sebesar 3,34% (yoy). Kenaikan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau serta masih tingginya inflasi pada kelompok perawatan pribadi & jasa lainnya. Secara spasial, 2 (dua) dari 5 (lima) kabupaten/kota pengukuran IHK memiliki tingkat inflasi di atas sasaran. Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah dengan dipimpin oleh

TPID masing-masing daerah dalam rangka mencapai inflasi yang terjaga dalam sasaran.

PEMBIAYAAN DAERAH

Secara umum, stabilitas sistem keuangan Provinsi NTT pada triwulan II 2026 tetap terjaga, dengan rasio NPL (*gross*) sebesar 3,63% yang masih berada di bawah ambang batas 5%. Intermediasi perbankan perbankan meningkat sejalan dengan menguatnya pertumbuhan penyaluran kredit Bank Konvensional dan Bank Syariah dibandingkan triwulan sebelumnya. Disisi lain, pertumbuhan DPK tetap kuat namun melambat didorong oleh melemahnya pertumbuhan deposito dan giro. Meski demikian LDR meningkat menjadi 116,90%, mencerminkan fungsi intermediasi yang tetap terjaga di tengah adanya perlambatan DPK.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Kondisi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah di Provinsi NTT dapat dilihat dari indikator sistem pembayaran nontunai dan tunai. Indikator sistem pembayaran nontunai di Provinsi NTT, yang ditunjukkan melalui transaksi BI-RTGS dan SKNBI, mengalami tren peningkatan pada triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026. Sementara itu, indikator sistem pembayaran tunai mengalami net outflow sebesar Rp0,67 triliun pada triwulan II 2026 atau berbanding terbalik dibandingkan triwulan II 2025 yang mengalami *net inflow* sebesar Rp1,23 triliun.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTT pada periode Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, meskipun tingkat partisipasi penduduk dalam pasar kerja mengalami sedikit pelemahan. Di sisi lain, Aktivitas ekonomi daerah masih menunjukkan kinerja yang kuat, hal ini tercermin dari kondisi pasar tenaga kerja yang secara umum tetap stabil. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja pada Mei 2026 tercatat sebanyak 3,19 juta orang, lebih tinggi dari Februari 2026 yang sebesar 3,18 juta orang. Di sisi lain, kondisi kesejahteraan di Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan, yang tercermin dari persentase kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 17,52% atau lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 18,6%. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT menunjukkan peningkatan, meski *Rasio Gini* pada Maret 2026 mengalami sedikit peningkatan. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan pada triwulan II 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

PROSPEK PEREKONOMIAN

Kinerja perekonomian NTT tahun 2026 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,2 - 5,2% (yoy), berpotensi tetap kuat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh 5,14% (yoy). Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi NTT tahun 2026 tetap ditopang oleh realisasi investasi pemerintah yang kembali meningkat serta investasi swasta yang tetap solid. Selain itu, kinerja impor tahun 2026 diperkirakan meningkat sejalan dengan kebutuhan bahan konstruksi, di tengah permintaan domestik tahun 2026 yang diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menopang kinerja perekonomian NTT melalui akselerasi Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi. Prospek tersebut didukung dengan menguatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian ke depan, sejalan dengan akselerasi program ekonomi kerakyatan dan berbagai stimulus fiskal yang mendukung daya beli masyarakat. Dari sisi lapangan usaha, prospek tersebut akan tercermin dari peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU)

Konstruksi, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta tetap kuatnya kinerja LU Administrasi Pemerintahan.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2026 diperkirakan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$ % (yoy). Sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang meningkat, prospek inflasi NTT 2026 tetap terjaga namun dalam tendensi meningkat dibandingkan inflasi tahun 2025 yang sebesar 2,39% (yoy). Prakiraan tersebut dipengaruhi oleh prospek meningkatnya inflasi pada kelompok pangan dan beberapa komoditas impor yang mendorong imported inflation di Provinsi NTT. Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat dengan koordinasi TPIP-TPID dalam program pengendalian inflasi yang tetap sasaran serta penguatan program gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera (GPIPS) untuk pengendalian inflasi pangan dalam mencapai target tingkat inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1$ % (yoy).

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih

Provinsi Nusa Tenggara Timur

I. EKONOMI MAKRO REGIONAL

INDIKATOR	2023	2024				2024	2025				2025	2026	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Berlaku)													
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp)	128.526	32.129	34.779	34.450	36.101	137.458	34.434	37.433	37.039	39.468	148.373	37.893	41.134
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.677	9.253	10.317	9.846	10.226	39.641	9.892	11.399	10.214	10.900	42.405	10.748	12.094
Pertambangan dan Penggalian	1.344	348	343	355	359	1.406	347	351	351	374	1.423	402	410
Industri Pengolahan	1.691	480	490	470	484	1.923	508	543	550	598	2.198	590	615
Pengadaan Listrik dan Gas	117	29	30	33	34	126	31	32	34	39	136	41	47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72	19	19	19	19	76	21	19	20	20	80	21	22
Konstruksi	13.567	3.110	3.359	3.604	3.974	14.047	3.043	3.301	3.674	4.188	14.206	3.435	3.889
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.091	4.098	4.428	4.487	4.609	17.622	4.615	5.018	5.143	5.334	20.109	5.055	5.612
Transportasi dan Pergudangan	6.510	1.637	1.818	1.867	1.821	7.143	1.705	1.866	1.929	1.936	7.437	1.746	1.934
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	852	212	245	261	255	973	222	266	281	312	1.081	297	336
Informasi dan Komunikasi	8.966	2.321	2.366	2.379	2.367	9.433	2.395	2.423	2.460	2.538	9.815	2.560	2.588
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.607	1.486	1.489	1.485	1.433	5.893	1.507	1.528	1.630	1.626	6.292	1.652	1.658
Real Estate	3.057	821	834	870	888	3.413	904	927	978	1.003	3.812	981	1.053
Jasa Perusahaan	191	49	50	53	53	205	53	54	57	58	221	58	60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.944	3.981	4.462	4.194	4.848	17.485	4.485	4.722	4.649	5.353	19.209	5.307	5.544
Jasa Pendidikan	11.442	2.874	3.056	3.068	3.197	12.195	3.226	3.360	3.405	3.455	13.447	3.356	3.517
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.274	877	929	910	963	3.679	918	1.026	1.050	1.110	4.104	1.008	1.132
Jasa lainnya	2.125	535	544	549	570	2.198	562	598	615	624	2.399	635	623
Berdasarkan Pengeluaran (Harga Berlaku)													
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp)	128.526	32.129	34.779	34.450	36.101	137.458	34.434	37.433	37.039	39.468	148.373	37.893	41.134
Konsumsi Rumah Tangga	86.723	21.818	23.153	22.790	23.810	91.602	22.788	24.257	24.463	25.178	96.686	24.405	26.033
Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR)	4.383	1.256	1.193	1.192	1.345	4.987	1.215	1.239	1.275	1.388	5.117	1.314	1.369
Konsumsi Pemerintah	27.435	4.723	7.510	7.683	10.424	30.339	4.870	7.798	8.060	11.036	31.764	5.956	8.944
Pembentukan Modal Tetap Bruto	58.950	13.435	14.887	15.369	17.000	60.918	13.220	14.788	15.583	18.176	61.768	15.029	16.859
Perubahan Inventori	1.113	293	311	309	289	1.203	-535	885	256	539	1.145	-867	708
Ekspor	8.363	1.869	2.047	1.953	2.061	7.930	1.940	2.905	2.455	2.913	10.213	2.007	3.130
Impor	58.443	11.265	14.324	14.848	19.000	42.766	9.064	14.439	15.053	19.764	58.320	9.951	15.908
Data Ekspor Impor Luar Negeri di Provinsi NTT													
Nilai Ekspor Luar Negeri Nonmigas (ribu USD)	68.191	17.233	17.679	17.799	29.255	81.966	17.270	17.510	19.238	20.039	74.058	13.444	15.392
Nilai Impor Luar Negeri Nonmigas (ribu USD)	40.100	8.915	17.634	9.903	45.598	82.050	4.178	3.846	6.498	1.852	16.374	1.090	921

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih

Provinsi Nusa Tenggara Timur

II. INFLASI

INDIKATOR	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Laju Inflasi Tahunan (% yoy)														
NTT	6,57	4,58	2,19	2,42	1,92	1,54	1,07	1,19	1,86	1,72	2,30	2,39	2,40	3,56
- Kota Kupang	6,84	4,68	1,87	2,21	2,07	2,12	2,17	1,53	1,19	0,53	1,75	2,93	2,87	4,02
- Kota Maumere	6,39	3,67	3,80	3,33	0,95	2,19	1,39	2,65	4,25	3,44	3,25	0,38	1,84	3,02
- Kota Waingapu	4,41	4,69	3,25	3,27	2,15	0,35	1,27	1,66	2,77	3,19	0,86	3,09	2,88	3,82
- Kabupaten Ngada	-	-	-	-	1,29	0,02	0,39	1,61	2,17	1,43	3,9	1,75	1,51	3,07
- Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	2,00	2,15	-1,32	-0,24	2,52	3,92	3,07	1,77	1,72	2,80

III. PERBANKAN

INDIKATOR	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Bank Umum Konvensional dan Syariah (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain)														
1. Total Aset	52.506	52.436	54.784	56.608	55.770	55.211	56.205	56.092	55.490	56.174	57.937	60.848	60.827	60.060
2. DPK	33.119	32.533	33.965	34.481	35.517	34.918	35.388	34.396	35.126	36.375	37.940	39.622	40.395	40.043
- Giro	5.306	3.722	5.540	4.388	5.439	6.080	6.652	4.347	5.288	5.636	6.609	4.646	6.360	5.145
- Tabungan	17.573	18.458	17.874	19.642	19.195	19.369	18.963	20.460	19.801	19.941	20.085	21.538	20.435	22.289
- Deposito	10.240	10.353	10.552	10.452	10.883	9.469	9.772	9.589	10.037	10.798	11.246	13.438	13.600	12.609
3. Kredit Berdasarkan Lokasi Bank	42.829	43.948	45.352	46.031	46.523	46.680	47.389	46.666	46.554	46.607	48.260	48.160	47.875	46.810
- Modal Kerja	16.121	16.811	17.038	17.218	17.191	17.008	17.113	16.318	16.308	16.156	16.212	15.495	15.236	14.526
- Investasi	2.667	2.880	3.138	3.326	3.405	3.352	3.130	3.223	3.188	3.108	3.063	3.165	3.218	3.137
- Konsumsi	24.041	24.256	25.176	25.487	25.927	26.320	27.146	27.126	27.058	27.343	28.985	29.501	29.421	29.146
4. LDR (%)	129,32	135,09	133,53	133,50	130,99	133,69	133,91	135,67	132,53	128,13	127,20	121,55	118,52	116,90
5. NPL (Gross) (%)	1,91	1,88	1,76	1,58	2,03	2,81	3,21	3,16	3,59	3,81	3,92	3,51	3,72	3,63

IV. SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Transaksi Tunai														
Inflow Perbankan (Rp. Triliun)	3,07	1,00	1,25	0,91	2,46	1,11	0,91	0,61	2,34	1,16	0,70	0,62	2,15	0,72
Outflow Perbankan (Rp. Triliun)	0,64	2,10	1,13	2,56	0,89	2,02	0,91	2,75	1,00	1,11	1,22	2,39	0,92	1,38
Transaksi Non Tunai														
BI-RTGS														
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp. Triliun)	4,85	8,43	9,33	12,12	5,43	5,05	7,94	7,94	4,71	3,09	4,43	7,61	5,30	6,49
Volume Transaksi BI-RTGS	2.925	2.780	3.543	4.025	2.275	2.512	3.244	2.456	1.513	2.102	2.712	3.407	2.549	2.649
Kliring														
Nominal Transaksi SKNBI (Rp. Triliun)	1,82	1,86	2,22	2,62	1,67	1,72	2,11	2,62	1,44	1,52	2,03	2,30	1,51	1,68
Volume Transaksi SKNBI	37.533	37.768	43.279	48.515	30.251	31.160	36.218	43.339	25.743	26.252	35.049	44.011	27.558	30.662





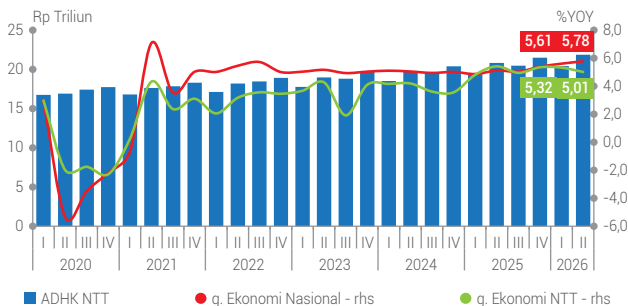
BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2026. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada triwulan II 2026 tumbuh 5,01% (yoy), tetap tumbuh kuat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,32% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen utama kecuali pada komponen ekspor yang masih terakselerasi pada triwulan II 2026. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pada kinerja LU utama yaitu pertanian, perikanan dan kehutanan serta LU Administrasi pemerintahan, sementara pada LU konstruksi dan LU perdagangan besar dan eceran terjadi akselerasi pertumbuhan pada triwulan II 2026 yang membantu menjaga pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tetap tumbuh kuat.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional Secara Triwulanan



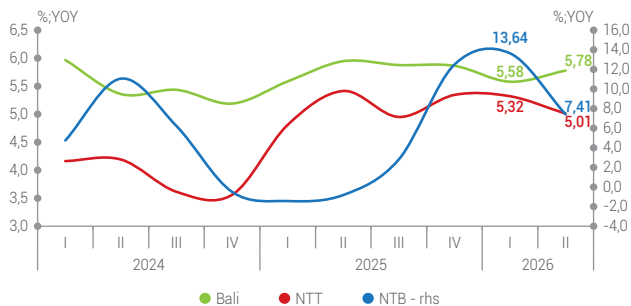
Sumber: BPS (diolah)

1.1. KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap tumbuh positif kuat pada triwulan II 2026. Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2026 tumbuh 5,01% (yoy), tetap tumbuh kuat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,32% (yoy) (Grafik 1.1). Pertumbuhan tersebut masih berada di bawah kinerja ekonomi nasional yang sebesar 5,29% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen utama kecuali pada komponen ekspor yang masih terakselerasi pada triwulan II 2026. Perlambatan konsumsi secara umum pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca-Ramadan dan Idulfitri, melemahnya optimisme dan daya beli masyarakat, serta moderasi stimulus fiskal sejalan dengan penyesuaian anggaran dan tertahannya realisasi belanja pemerintah. Selain itu, perlambatan kinerja pada komponen belanja modal turut menurunkan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meskipun masih didukung oleh peningkatan kinerja penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan utamanya terjadi lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan utamanya disebabkan oleh terkontraksinya pertumbuhan komoditas pangan utama yaitu padi dan jagung. Sementara itu pada sektor utama lainnya yakni, LU konstruksi dan perdagangan besar dan eceran pertumbuhan pada triwulan II 2026 mengalami akselerasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tetap kuat. Kinerja sektor Konstruksi didukung oleh percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, antara lain pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahap II di Rote,

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi di Balinusra



Sumber: BPS (diolah)

realisasi pembangunan *Integrated Shrimp Farming* (ISF) di Sumba Timur, kontinuitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pada triwulan II 2026, perekonomian NTT yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp41,13 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp20,87 triliun. Perekonomian NTT memberikan kontribusi sebesar 22,32% terhadap perekonomian wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), serta 0,63% terhadap perekonomian nasional. Dibandingkan wilayah lain di Balinusra, pertumbuhan ekonomi NTT masih berada di bawah Bali dan Nusa Tenggara Barat yang masing-masing tumbuh sebesar 5,78% (yoy) dan 7,41% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 1.2).

1.2. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja neraca perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi NTT triwulan II 2026 di tengah kinerja permintaan domestik yang tumbuh lebih rendah (Tabel 1.1). Ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 3,88% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy). Peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan perbaikan ekspor barang dan jasa yang ditopang oleh peningkatan aktivitas pariwisata serta pengiriman komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan produk olahan ke luar daerah, di mana pengeluaran sapi tumbuh sebesar 6,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

1. Permintaan domesik antara lain meliputi Konsumsi RT, Konsumsi Pemerintah, dan PMTB

Tabel 1.1. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran

Uraian	2024				2025				2026		Pangsa	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	2026 - I	2026 - II
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,90	4,18	3,71	4,38	3,42	3,25	4,56	4,05	4,98	4,65 ▼	64,43%	63,29%
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20,05	8,75	11,06	6,25	-4,13	1,94	4,11	3,02	4,90	6,83 ▲	3,47%	3,33%
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,94	8,63	6,63	2,23	1,21	2,11	3,28	3,56	19,92	12,23 ▼	15,72%	21,74%
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,14	5,88	2,69	-2,33	-3,25	-2,23	-0,03	3,14	9,64	7,93 ▼	39,69%	40,99%
5. Perubahan Inventori	4,99	5,85	9,16	-1,03	-277,83	177,28	-20,73	83,04	-56,73	-23,01 ▲	-2,29%	1,72%
6. Net Ekspor	-5,17	-8,50	-4,92	-0,22	16,78	4,45	1,97	-1,67	-14,50	-9,62 ▲	-21,02%	-31,07%
6a. Ekspor	15,45	24,49	-14,37	-21,66	3,58	39,60	18,83	26,92	2,64	3,88 ▲	5,30%	7,61%
6b. Impor	6,31	10,13	2,33	-2,42	-14,32	0,60	0,37	4,12	12,87	8,70 ▼	-26,32%	-38,67%
PDRB	4,16	4,19	3,61	3,56	4,81	5,41	4,95	5,34	5,32	5,01 ▼	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, diolah

dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,37% (yoy) akibat permintaan domestik yang kuat sejalan dengan HBKN Iduladha 2026 di tengah penurunan impor akibat normalisasi pengadaan barang modal dan bahan baku.

Sementara itu, Konsumsi RT mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,98% (yoy) sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat pascaperiode Ramadan dan Idulfitri. Selanjutnya, PMTB atau investasi tumbuh 7,93% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,64% (yoy) dipengaruhi oleh normalisasi dari basis pertumbuhan yang tinggi serta masih bertahapnya realisasi sejumlah proyek investasi pemerintah dan swasta. Lebih lanjut, Konsumsi Pemerintah tumbuh 12,23% (yoy), menurun dibandingkan 19,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring normalisasi belanja pascapeningkatan pada triwulan sebelumnya, meskipun tetap kuat ditopang oleh belanja pegawai dan barang, pembayaran gaji ke-13, serta pelaksanaan program pelayanan publik.

1.2.1. Konsumsi²

Kinerja Konsumsi RT pada triwulan II 2026 tumbuh lebih rendah dikarenakan optimisme masyarakat yang melemah. Pengeluaran Konsumsi RT pada triwulan II 2026 tumbuh 4,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,98% (yoy). Penurunan pertumbuhan Konsumsi RT pada triwulan II 2026 sejalan dengan optimisme masyarakat yang melemah di antaranya kelompok petani yang memperoleh penurunan pendapatan

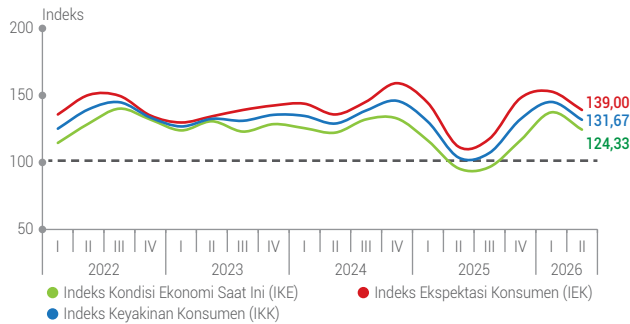
sejalan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang lebih rendah serta normalisasi pengeluaran masyarakat pascaperiode Ramadan dan Idulfitri pada triwulan sebelumnya, di tengah masih terbatasnya peningkatan pendapatan masyarakat serta tertahannya pertumbuhan kredit konsumsi. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menurun menjadi 131,67 dari 145,00 pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.3). Selain itu, penurunan keyakinan konsumen turut tercermin dari penurunan aktivitas konsumsi masyarakat terhadap barang-barang tahan lama (*durable goods*) menjadi 94,00 dari 121,33 di triwulan sebelumnya. Namun demikian, optimisme masyarakat terhadap keterbukaan lapangan kerja baru tetap kuat sejalan dengan kenaikan indeks menjadi 136,00 dari 131,00 di triwulan sebelumnya (Grafik 1.4).

Dari sisi pembiayaan, masyarakat juga cenderung berhati-hati dalam mengambil kredit konsumsi,

tercermin dari perlambatan pada pertumbuhan kredit konsumsi yang sebesar 5,22% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,13% (yoy) (Grafik 1.5). Perlambatan kinerja kredit konsumsi ini khususnya pada komponen kredit perumahan rakyat (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB), di tengah tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi, kenaikan harga kendaraan dan properti, serta penerapan standar penyaluran kredit perbankan yang lebih selektif (Grafik 1.6). Sementara itu, Kinerja Konsumsi ditopang oleh momentum HBKN Iduladha, libur sekolah, peningkatan aktivitas pariwisata dan penyelenggaraan berbagai kegiatan, serta pembayaran gaji ke-13 ASN pada Juni 2026 yang turut memperkuat daya beli masyarakat. Namun demikian, akselerasi konsumsi tertahan oleh normalisasi permintaan masyarakat pascaperiode Ramadan dan Idulfitri pada triwulan sebelumnya, serta meningkatnya tekanan harga pangan, energi, dan biaya transportasi.

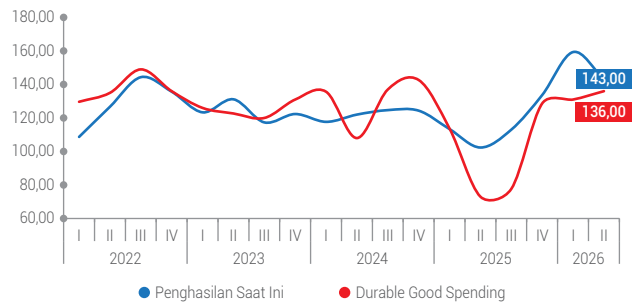
2. Konsumsi meliputi Konsumsi Rumah Tangga (71,63%), Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) (3,77%), dan Konsumsi Pemerintah (24,61%)

Grafik 1.3. Indeks Keyakinan Konsumen



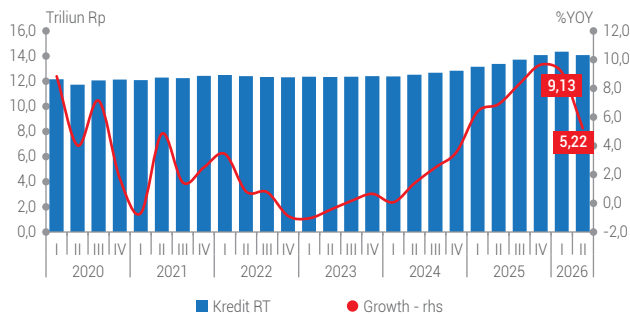
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.4. Komponen Indeks Keyakinan Konsumen NTT



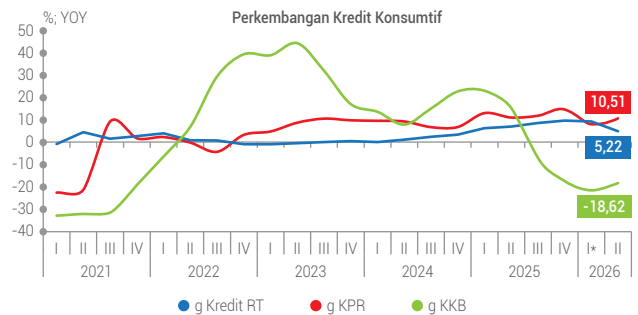
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.5. Perkembangan Kredit Rumah Tangga



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek) (diolah)

Grafik 1.6. Perkembangan Kredit Konsumsi Menurut Penggunaannya



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek) (diolah)

Normalisasi stimulus fiskal daerah pada triwulan II 2026 memengaruhi perlambatan kinerja Konsumsi Pemerintah.

Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 12,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,92% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan realisasi belanja APBD gabungan pemerintah se-Provinsi NTT yang berkontraksi sebesar 5,77% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 14,29% (yoy). Perlambatan terutama tercermin dari pertumbuhan Belanja Operasi yang termoderasi menjadi 4,14% (yoy) dari sebelumnya 18,13% (yoy), sejalan dengan melambatnya Belanja Pegawai dari 22,86% menjadi 11,78% (yoy) serta masih berkontraksinya Belanja Barang dan Jasa sebesar 6,18% (yoy) (Tabel 1.2). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh normalisasi belanja pascapenyalaran Tunjangan Hari Raya dan pelaksanaan berbagai program terkait HBKN Ramadan dan Idulfitri pada triwulan sebelumnya, masih berlangsungnya penyesuaian anggaran dan proses pengadaan pada sejumlah perangkat daerah, serta terbatasnya ruang fiskal sejalan dengan kontraksi Belanja Transfer sebesar 37,74% (yoy). Meskipun melambat, Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi ditopang oleh pembayaran gaji ke-13 pada Juni 2026, keberlanjutan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pelaksanaan program pelayanan publik

di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi. Secara lebih luas, tertahannya realisasi fiskal juga tercermin dari Belanja Modal yang berkontraksi 19,43% (yoy), setelah tumbuh tinggi sebesar 128,45% (yoy) pada triwulan sebelumnya, yang terutama memengaruhi kinerja investasi pemerintah atau PMTB.

Realisasi belanja kementerian/lembaga di NTT tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2026, meskipun mengalami moderasi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Belanja kementerian/lembaga tercatat tumbuh sebesar 28,66% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026 sebesar 31,01% (yoy). Moderasi tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan Belanja Barang dan Jasa dari 29,23% menjadi 13,00% (yoy), sejalan dengan normalisasi pelaksanaan kegiatan setelah meningkat pada awal tahun serta masih berlangsungnya penyesuaian dan efisiensi anggaran pada sejumlah satuan kerja. Belanja Modal juga tumbuh lebih rendah menjadi 55,77% (yoy) dari 171,52% (yoy) pada triwulan sebelumnya akibat normalisasi dari basis pertumbuhan yang tinggi, meskipun tetap mencerminkan berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial berkontraksi sebesar 79,87%

Tabel 1.2. Perkembangan Realisasi APBD

APBD Gabungan NTT	Pertumbuhan Realisasi Setiap Triwulan (%; yoy)					
	2025-I	2025-II	2025-III	2025 - IV	2026 - I	2026 - II
Belanja APBD	16,77	-15,22	-8,50	-11,80	14,29	-5,77
1. Belanja Operasi	20,21	-16,93	-5,56	4,97	18,13	4,14
01. Belanja Pegawai	33,87	-11,04	15,07	12,42	22,86	11,78
02. Belanja Barang dan Jasa	-9,64	-17,30	-6,38	-4,06	-12,44	-6,18
03. Belanja Bunga	-0,51	-18,37	-41,62	-23,37	26,73	-56,56
04. Belanja Subsidi	0,00	-100,00	17,74	28,74	0,00	0,00
05. Belanja Hibah	-90,67	-66,08	-79,40	27,53	23,97	-72,15
06. Belanja Bantuan Sosial	655,00	-73,64	79,46	-9,19	24,77	132,45
2. Belanja Modal	-65,94	-66,18	-36,68	-38,40	128,45	-19,43
3. Belanja Tidak Terduga	172,34	-12,88	-26,06	170,90	-36,79	12,40
4. Belanja Transfer	-25,68	10,10	-0,86	-33,95	-74,22	-37,74

Sumber: BKD Provinsi NTT (diolah)

Tabel 1.3. Perkembangan Realisasi Belanja APBN

APBN	Pertumbuhan Realisasi Setiap Triwulan (%; yoy)					
	2025-I	2025-II	2025-III	2025-IV	2026-I	2026-II
Belanja K/L di NTT	-43,24	-26,14	-23,48	-15,26	31,01	28,66
Belanja Pegawai	10,89	-1,02	15,33	21,75	22,31	33,61
Belanja Barang dan Jasa	-72,18	-33,72	-28,06	-10,63	29,23	13,00
Belanja Modal	-81,83	-56,94	-53,17	-46,25	171,52	55,77
Belanja Bantuan Sosial	-100,00	732,02	-96,96	746,24	100,00	-79,87

Sumber: DJPb Provinsi NTT (diolah)

(yoy), terutama dipengaruhi oleh perbedaan jadwal dan tahapan penyaluran bantuan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Belanja Pegawai meningkat dari 22,31% menjadi 33,61% (yoy), ditopang oleh pembayaran gaji ke-13 pada Juni 2026, sehingga menahan perlambatan Konsumsi Pemerintah yang lebih dalam. Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja kementerian/ lembaga yang tetap tinggi menunjukkan berlanjutnya dukungan APBN terhadap operasional pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun intensitas stimulus fiskal mulai termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel 1.3).

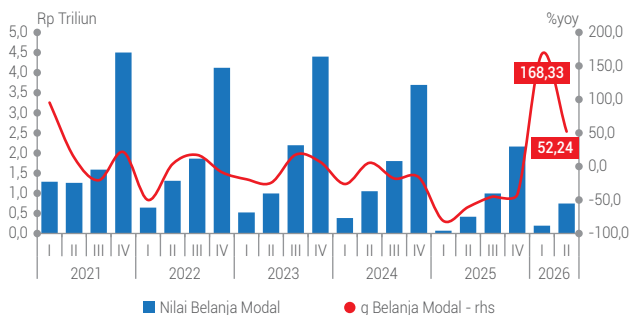
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) pada triwulan II 2026 tumbuh 6,83% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,90% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan dan kemasyarakatan sepanjang pertengahan tahun 2026, termasuk penyelenggaraan Festival Paskah Pemuda Sinode GMIT di Kota Kupang serta rangkaian Semana Santa dan Festival Bale Nagi di Larantuka, Kab. Flores Timur. Tingginya partisipasi masyarakat dan kunjungan wisatawan pada kegiatan tersebut turut mendorong aktivitas ekonomi berbasis komunitas dan keagamaan di NTT.

1.2.2. Investasi

Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan II 2026 menunjukkan deselerasi. PMTB tumbuh 7,93% (yoy), tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,64% (yoy). Perlambatan tersebut didorong oleh menurunnya investasi pemerintah tercermin dari realisasi belanja modal yang melambat sebesar 52,24% (yoy) pada triwulan berjalan seiring normalisasi realisasi proyek pemerintah, meskipun pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik tetap berlanjut.

Perkembangan ini sejalan dengan normalisasi realisasi setelah *frontloading* sejumlah proyek pada awal tahun pelaksanaan berbagai proyek konstruksi yang didanai APBN, antara lain pembangunan tahap I Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pembangunan daerah irigasi, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sejumlah proyek layanan publik, termasuk rumah sakit daerah, kantor pelayanan publik, laboratorium, dan puskesmas, yang turut menopang aktivitas investasi di NTT.

Grafik 1.7. Perkembangan Nilai Belanja Modal

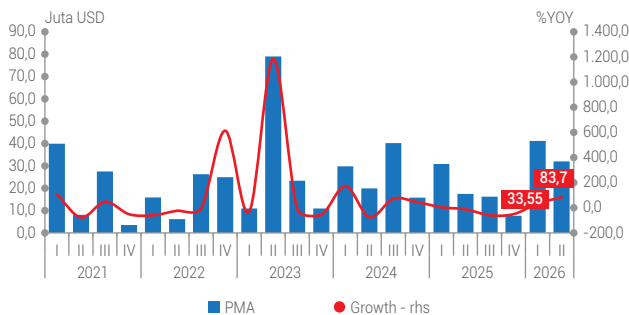


Sumber: DJPb dan BKD NTT (diolah)

Di sisi lain, peningkatan realisasi investasi swasta terjadi didorong oleh kinerja PMA dan PMDN yang melampaui kinerja triwulan sebelumnya. PMA pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 83,69% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 33,55% (yoy) (Grafik 1.8). Peningkatan PMA didorong oleh realisasi investasi pada sektor Horeka (hotel, restoran dan kafe) di Manggarai Barat, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, terutama untuk perkebunan gula di Sumba. Lebih lanjut, perkembangan PMDN pada triwulan II 2026 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,83% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 3,14% (yoy) (Grafik 1.9). Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh terealisasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta realisasi investasi pada sektor pariwisata sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan domestik.

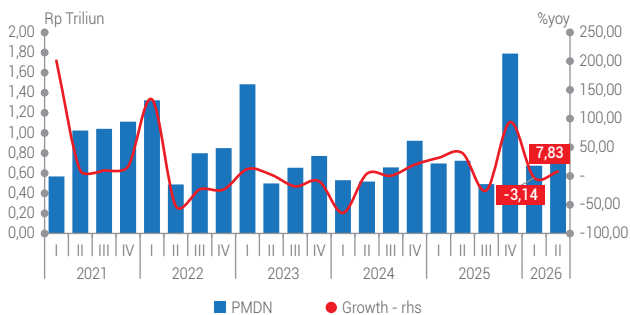
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar terjadi pada sektor tersier dengan pangsa sebesar 84,26%, diikuti dengan sektor primer sebesar 13,21% dan sektor sekunder sebesar 2,53%. Berdasarkan nominal, sektor Hotel dan Restoran dan sektor Perumahan, Kawasan

Grafik 1.8. Perkembangan PMA



Sumber: DPMPSTSP Provinsi NTT (diolah)

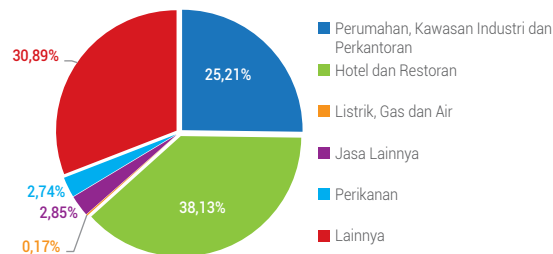
Grafik 1.9. Perkembangan PMDN



Sumber: DPMPSTSP Provinsi NTT (diolah)

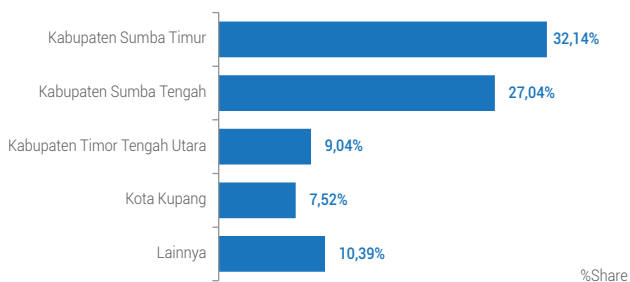
Industri dan Perkantoran menjadi sektor utama PMA pada periode laporan dengan nilai masing-masing sebesar Rp195,41 miliar (pangsa 38,13%), Rp129,18 miliar (pangsa 25,21%) (Grafik 1.10). Adapun secara spasial daerah dengan realisasi PMA terbesar adalah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai investasi Rp164,37 miliar (pangsa 32,14%), diikuti oleh Kabupaten Sumba Tengah dengan nilai investasi Rp138,26 miliar (pangsa 27,04%), Kabupaten TTU senilai Rp46,23 miliar (pangsa 9,04%) dan Kota Kupang dengan nilai investasi Rp38,46 miliar (pangsa 7,52%) (Grafik 1.11).

Grafik 1.10. Pangsa Sektor PMA Provinsi NTT Triwulan II 2026

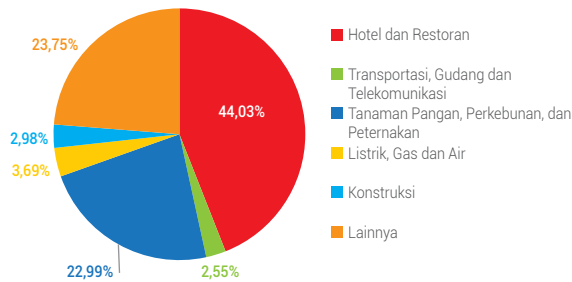


Sumber: DPMPSTSP Provinsi NTT (diolah)

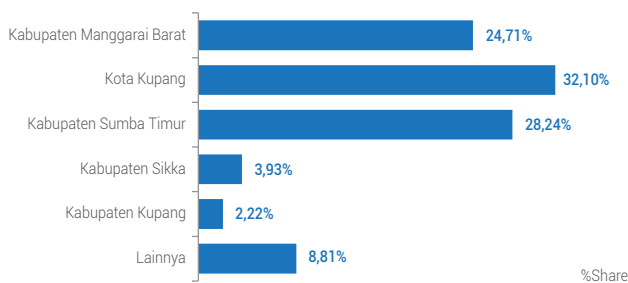
Grafik 1.11. PMA Provinsi NTT Triwulan II 2026 Berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber: DPMPSTSP Provinsi NTT (diolah)

Grafik 1.12. Pangsa Sektoral PMDN Provinsi NTT Triwulan II 2026

Sumber: DPMPSTSP Provinsi NTT (diolah)

Grafik 1.13. PMDN Provinsi NTT Triwulan II 2026 Berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: DPMPSTSP Provinsi NTT (diolah)

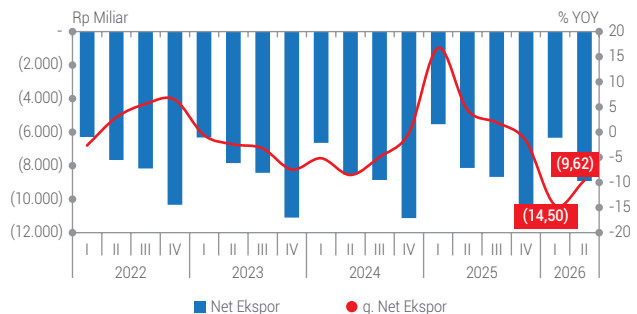
Selaras dengan PMA, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga didominasi oleh sektor tersier dengan pangsa sebesar 75,06%, diikuti dengan sektor primer sebesar 23,85% dan sektor sekunder sebesar 1,10%. PMDN di Provinsi NTT pada triwulan laporan didominasi oleh sektor Hotel dan Restoran dengan realisasi investasi sebesar Rp343,34 miliar (pangsa 44,03%), diikuti oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan dengan investasi senilai Rp179,33 miliar (pangsa 22,99%) dan sektor Perdagangan dan Reparasi dengan nilai investasi Rp134,24 miliar (pangsa 17,21%) (Grafik 1.12). Secara spasial, realisasi PMDN terbesar terjadi di Kota Kupang dengan nilai Rp250,37 miliar (pangsa 32,10%), Kabupaten Sumba Timur dengan nilai Rp220,22 miliar (pangsa 28,24%), dan Manggarai Barat dengan nilai Rp192,67 miliar (pangsa 24,71%) (Grafik 1.13).

1.2.3. Ekspor dan Impor

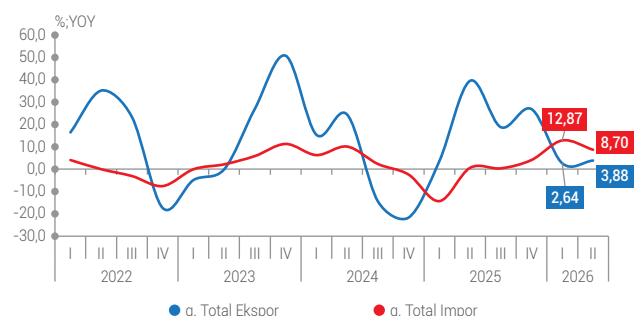
Kontribusi neraca perdagangan Provinsi terhadap perekonomian NTT triwulan II 2026 membaik, dipengaruhi oleh peningkatan ekspor dan penurunan impor. Net Ekspor Provinsi NTT pada triwulan II 2026 berkontraksi 9,62% (yoy), lebih baik dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya

yang berkontraksi sebesar 14,50% (yoy) (Grafik 1.14). Perkembangan tersebut disebabkan oleh total impor yang tumbuh 8,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,77% (yoy) (Grafik 1.15). Di sisi lain, total ekspor NTT pada triwulan II 2026 tumbuh 3,88% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,64% (yoy). Kondisi tersebut mendorong perbaikan kinerja net ekspor, meskipun komponen net ekspor masih berkontraksi karena nilai impor relatif besar, mencapai 38,67% terhadap PDRB NTT pada triwulan II 2026.

Kinerja ekspor antardaerah komoditas perikanan pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan signifikan dan turut menopang perbaikan net ekspor NTT. Volume pengeluaran ikan dari NTT tercatat tumbuh 109,11% (yoy), meningkat tajam dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.16). Perkembangan tersebut terindikasi didukung oleh membaiknya ketersediaan hasil tangkapan, penguatan permintaan pasar dari luar NTT, serta kelancaran distribusi melalui jalur laut dan udara. Peningkatan pasokan dan aktivitas pengiriman antarpulau tersebut mendorong naiknya volume komoditas perikanan yang diperdagangkan ke provinsi lain.

Grafik 1.14. Perkembangan Net Ekspor

Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.15. Perkembangan Total Ekspor dan Total Impor

Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.16. Pengeluaran Perikanan ke luar Provinsi



Sumber: Balai Karantina Perikanan NTT (diolah)

Grafik 1.17. Perkembangan Pengeluaran Sapi ke luar Provinsi



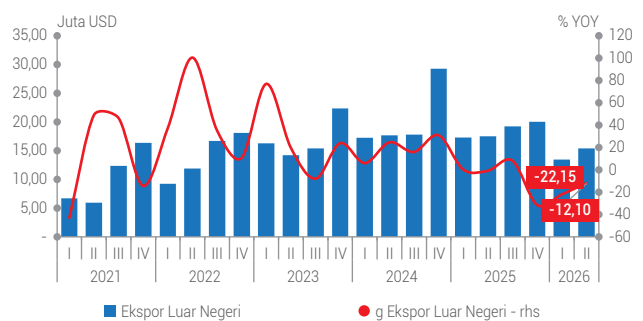
Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT (diolah)

Pengeluaran sapi ke luar NTT pada triwulan II 2026 juga menunjukkan penguatan, didorong oleh peningkatan permintaan hewan ternak menjelang HBKN Iduladha. Pengeluaran sapi tumbuh 6,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,37% (yoy) (Grafik 1.17). Penguatan permintaan terutama berasal dari wilayah Kalimantan dan provinsi lain yang membutuhkan pasokan hewan kurban, tercermin dari pengiriman 290 ekor sapi NTT melalui Pelabuhan Tenau menuju Kalimantan pada Mei 2026. Peningkatan tersebut turut didukung oleh kepastian alokasi pengeluaran ternak melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 56/KEP/HK/2026, kelancaran pemeriksaan kesehatan hewan, serta distribusi ternak antarpulau yang semakin baik, sehingga peluang pasar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keberlanjutan populasi ternak di NTT.

Dari sisi perdagangan luar negeri, nominal ekspor luar negeri pada triwulan II mengalami perbaikan kinerja. Ekspor luar negeri (LN) NTT pada triwulan II 2026 tercatat sebesar USD15,39 juta atau mengalami perbaikan kontraksi menjadi 12,1% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya terkontraksi 22,15% (yoy), (Grafik 1.18). Peningkatan ekspor luar negeri tersebut didorong oleh peningkatan realisasi ekspor komoditas perabotan dan kendaraan beserta

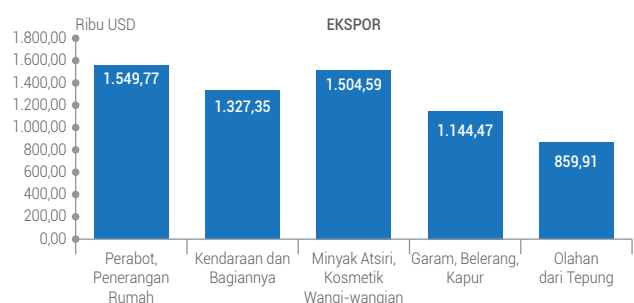
bagiannya ke Timor Leste dan minyak atsiri ke India. Berdasarkan pangsa, ekspor LN pada triwulan laporan didominasi oleh kelompok komoditas olahan dari Perabot/ Penerangan Rumah; Kendaraan beserta bagiannya Minyak Atsiri, Garam, Belerang, dan Kapur dengan nilai masing-masing sebesar USD1,55 juta (pangsa 10,07%), USD1,38 juta (pangsa 8,62%), dan USD1,50 juta (pangsa 9,78%) (Grafik 1.19). Dalam hal tujuan ekspor, Timor Leste masih menjadi negara tujuan utama dengan nilai ekspor mencapai USD12,52 juta (pangsa 81,34%), kemudian diikuti oleh Jepang dan India dengan nilainya masing-masing USD0,91 juta (pangsa 5,88%) dan USD0,19 juta (pangsa 1,28%) (Grafik 1.20).

Grafik 1.18. Perkembangan Ekspor Luar Negeri



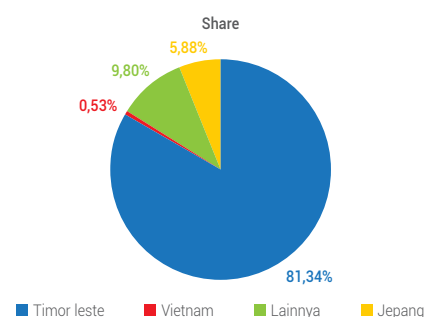
Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.19. Komoditas Utama Ekspor Luar Negeri NTT Triwulan II 2026



Sumber: Bea Cukai (diolah)

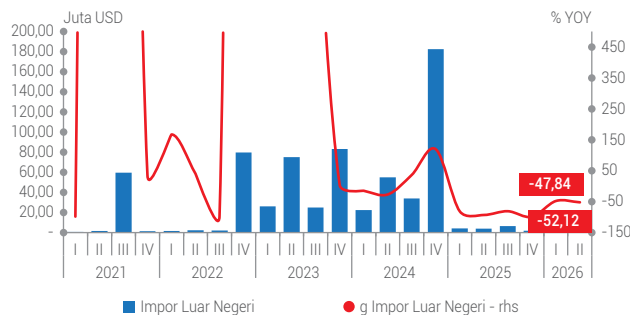
Grafik 1.20. Negara Tujuan Ekspor NTT Triwulan II 2026



Sumber: Bea Cukai (diolah)

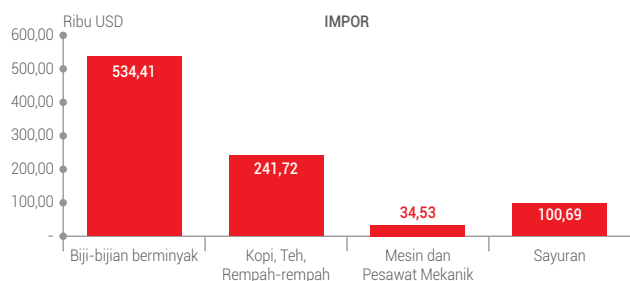
Selaras dengan perbaikan kinerja neraca perdagangan, impor LN Provinsi NTT pada triwulan II 2026 mengalami penurunan. Pada triwulan II 2026, impor LN Provinsi NTT berkontraksi sebesar 52,12% (yoy) lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 47,84% (yoy) (Grafik 1.21). Perbaikan impor LN tersebut disebabkan oleh realisasi impor kopi, teh, dan rempah-rempah yang menurun seiring perbaikan produksi domestik NTT pada triwulan II. Impor LN

Grafik 1.21. Perkembangan Impor Luar Negeri Provinsi NTT



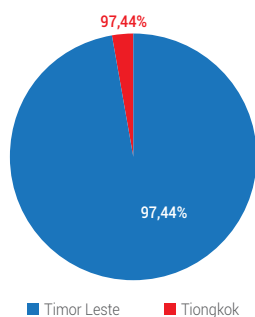
Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.22. Komoditas Impor Luar Negeri Utama NTT Triwulan II 2026



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.23. Negara Asal Impor NTT Triwulan II 2026



Sumber: Bea Cukai (diolah)

pada triwulan laporan didominasi oleh kelompok komoditas Biji-bijian berminyak; Kopi, Teh, Rempah-rempah; serta Sayuran dengan nilai masing-masing sebesar USD0,53 juta (pangsa 58,04%), USD0,24 juta (pangsa 26,25%), dan USD0,10 juta (pangsa 10,93%) (Grafik 1.22). Negara mitra utama impor luar negeri NTT pada triwulan laporan berasal dari Timor Leste dengan nilainya sebesar USD0,89 juta (pangsa 97,44%) dan Tiongkok dengan nilai sebesar USD0,02 (pangsa 2,6%) (Grafik 1.23).

1.3. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI LAPANGAN USAHA

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh akselerasi sektor Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, di tengah tetap kuatnya kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 tumbuh 10,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,20% (yoy) sejalan dengan meningkatnya realisasi proyek infrastruktur pemerintah dan swasta. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan belanja modal Kementerian/Lembaga di NTT sebesar 55,77% (yoy) serta kinerja PMTB yang tetap kuat, sehingga mendorong permintaan jasa konstruksi dan material bangunan. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 7,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,27% (yoy) (Tabel 1.4) sejalan dengan terjaganya konsumsi masyarakat serta meningkatnya distribusi barang antardaerah.

Sementara itu, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tetap tumbuh kuat meskipun melambat pada triwulan berjalan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan II 2026 tumbuh positif sebesar 1,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 3,33% (yoy). Sementara itu, kinerja LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib pada triwulan II 2026 juga mengalami perlambatan menjadi 9,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,43% (yoy).

Tabel 1.4. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha

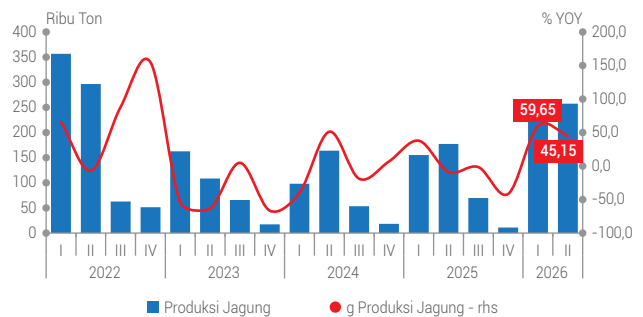
Kategori	Lapangan Usaha	2024				2025				2026		Pangsa		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	2026 - I	2026 - II	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,47	2,57	1,31	3,82	4,35	7,07	0,23	2,22	3,33	1,12	▼	28,34%	29,40%
B	Pertambangan dan Penggalian	5,23	5,21	5,41	4,10	-0,06	-0,06	-3,94	1,86	10,12	9,67	▼	1,05%	1,00%
C	Industri Pengolahan	11,94	6,06	3,83	4,44	1,90	7,31	13,78	20,35	13,36	9,40	▼	1,56%	1,50%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,22	0,04	8,53	9,04	9,61	1,09	-0,81	7,71	1,12	10,41	▲	0,11%	0,11%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,66	6,67	2,89	-1,60	7,52	-0,04	5,47	3,81	0,82	10,26	▲	0,06%	0,05%
F	Konstruksi	4,02	6,20	2,61	-1,84	-4,17	-2,86	0,95	3,26	9,20	10,19	▲	9,07%	9,45%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,95	4,26	7,09	7,64	11,91	12,51	13,93	11,39	4,27	7,09	▲	13,37%	13,64%
H	Transportasi dan Pergudangan	2,43	6,19	7,38	6,04	4,14	3,95	4,18	6,48	1,06	2,20	▲	4,60%	4,70%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,06	10,72	13,42	13,28	4,09	8,57	7,02	19,30	26,22	18,38	▼	0,78%	0,82%
J	Informasi dan Komunikasi	3,07	3,22	3,56	2,67	1,81	2,09	2,41	4,83	4,51	4,83	▲	6,76%	6,29%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,08	6,06	3,09	1,42	0,04	0,91	8,01	11,28	7,16	4,70	▼	4,36%	4,03%
L	Real Estate	2,92	1,87	1,74	1,74	0,27	2,12	4,39	4,16	2,68	6,72	▲	2,59%	2,56%
M,N	Jasa Perusahaan	5,39	2,82	8,04	6,00	5,58	6,34	7,92	9,45	8,82	9,16	▲	0,15%	0,15%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,49	4,49	5,22	4,98	9,72	5,61	8,13	4,97	10,43	9,42	▼	14,01%	13,48%
P	Jasa Pendidikan	7,82	6,44	2,16	1,04	9,54	6,92	7,95	4,36	0,55	1,99	▲	8,86%	8,55%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	3,98	5,33	6,44	2,68	5,96	7,69	5,65	3,51	5,47	▲	2,66%	2,75%
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,87	1,67	2,17	4,44	-0,02	3,50	5,01	2,77	9,32	1,03	▼	1,68%	1,51%
PDRB	PDRB	4,16	4,19	3,61	3,56	4,81	5,41	4,95	5,34	5,32	5,01	▼	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, diolah

1.3.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

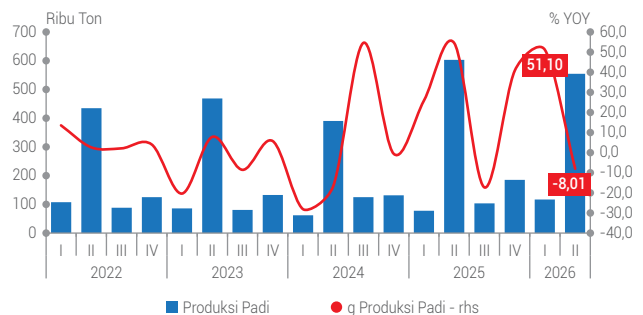
Produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan, terutama ditopang oleh peningkatan produksi perikanan dan peternakan di tengah moderasi kinerja tanaman pangan. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 1,12% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,33% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh berlangsungnya panen sejumlah komoditas tanaman pangan serta peningkatan produksi perikanan, yang tercermin dari volume pengeluaran ikan ke luar NTT yang tumbuh 109,11% (yoy). Selain itu, produksi peternakan tetap kuat sejalan dengan pengeluaran sapi yang tumbuh 6,94% (yoy), meningkat dari 3,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya, didorong oleh permintaan hewan kurban dari luar daerah menjelang HBKN Iduladha. Namun demikian, pertumbuhan LU Pertanian melambat akibat normalisasi produksi jagung dan padi setelah tingginya produksi dan luas panen pada triwulan I 2026, berakhirnya periode panen di sebagian sentra produksi, serta faktor basis pertumbuhan yang tinggi pada triwulan II 2025 di mana luas panen padi mengalami kontraksi sebesar 5,12% (yoy) pada triwulan berjalan (Grafik 1.24 dan 1.25).

Grafik 1.24. Perkembangan Produksi Jagung



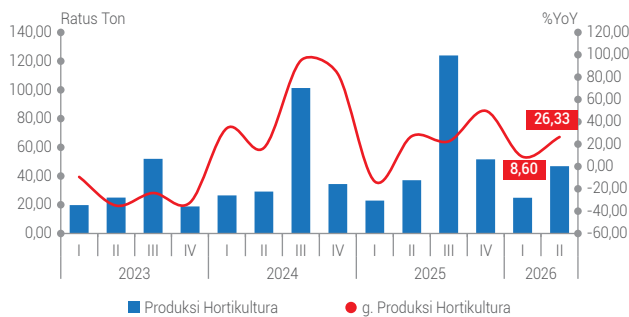
Sumber: Dinas Pertanian, BPS (diolah)

Grafik 1.25. Perkembangan Produksi Padi



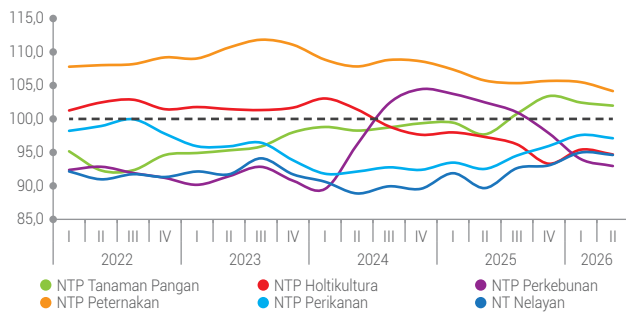
Sumber: Dinas Pertanian, BPS (diolah)

Grafik 1.26. Perkembangan Produksi Hortikultura



Sumber: Disnaker dan Ketahanan Pangan NTT (diolah)

Grafik 1.27. Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS (diolah)

Pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang lebih dalam ditopang oleh peningkatan kinerja produksi hortikultura pada triwulan II 2026. Peningkatan produksi terutama terjadi pada komoditas cabai rawit dan tomat seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah sentra produksi NTT di mana produksi hortikultura tumbuh 26,33% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.26). Peningkatan produksi berlangsung sejalan dengan permintaan masyarakat yang tetap terjaga pada triwulan II 2026. Sejalan dengan itu, peningkatan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan disertai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan yang stabil di atas nilai 100 yang mengindikasikan pelaku usaha pertanian mengalami surplus (Grafik 1.27).

1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (PBE) pada triwulan II 2026 mengalami perbaikan. LU PBE tumbuh 7,09% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,27% (yoy). Perbaikan tersebut sejalan dengan peningkatan total penjualan ritel dari 197,89 pada triwulan I menjadi 205,50 pada triwulan II 2026. Peningkatan terutama terjadi pada kelompok kendaraan, bahan bakar kendaraan bermotor, peralatan informasi dan komunikasi, serta perlengkapan rumah tangga. Perkembangan tersebut didorong oleh terjaganya konsumsi masyarakat pada momentum HBKN Paskah dan Iduladha, rangkaian hari libur nasional dan libur sekolah, serta meningkatnya aktivitas distribusi barang hasil pertanian dan barang yang didatangkan dari luar NTT (Tabel 1.5).

Aktivitas perdagangan antarpelaku usaha seiring dengan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memperkuat kinerja LU PBE. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT meningkat dari 248 unit pada akhir triwulan I menjadi 281 unit pada Mei 2026, atau bertambah sebanyak 33 unit (Grafik 1.28). Penambahan tersebut meningkatkan frekuensi transaksi antara kelompok tani, peternak, nelayan, distributor, *offtaker*, dan SPPG untuk memenuhi kebutuhan beras, sayuran, telur, ikan, daging, serta bahan pangan lainnya. Dengan kapasitas sekitar 3.000–3.500 penerima per SPPG, seluruh unit tersebut berpotensi menciptakan kebutuhan bahan pangan untuk sekitar 843 ribu–983,5 ribu porsi per hari apabila telah beroperasi pada kapasitas penuh.

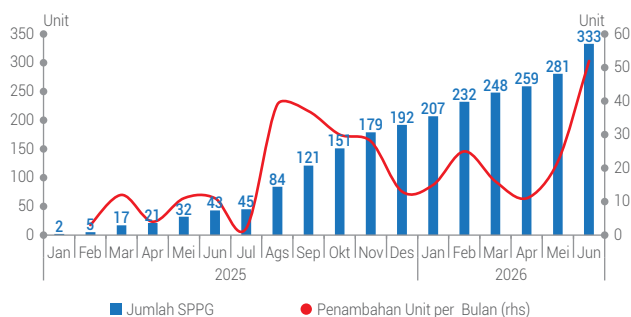
Meskipun membaik, penguatan LU PBE masih belum merata dan menghadapi keterbatasan pembiayaan usaha. Penjualan kelompok makanan, minuman dan tembakau serta sandang masih menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, kredit perdagangan berdasarkan lokasi proyek terkonsentrasi semakin dalam sebesar 7,57% (yoy), dibandingkan kontraksi 6,81% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 1.29). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan perdagangan masih lebih banyak ditopang oleh perputaran penjualan dan permintaan musiman, sementara ekspansi persediaan dan kapasitas usaha yang dibiayai melalui kredit masih terbatas.

Tabel 1.5. Perkembangan Omzet Penjualan Eceran

Kelompok	2025				2026		g.Tw II'26 vs g. Tw I'26
	I	II	III	IV	I	II	
Kendaraan	38,58	45,94	55,65	57,44	59,38	65,81	▼
Suku Cadang dan Aksesoris	4,15	4,69	4,62	4,68	5,13	4,52	▼
Makanan, Minuman & Tembakau	15,99	13,93	19,92	23,32	17,70	12,67	▲
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	72,23	79,25	78,51	87,35	74,79	80,51	▼
Peralatan Informasi dan Komunikasi	5,23	5,16	12,93	10,75	9,90	10,88	▼
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	4,77	6,16	8,07	8,87	7,15	8,03	▼
Barang Budaya dan Rekreasi	3,75	4,20	4,34	2,53	2,76	2,80	▲
Sandang	24,31	19,98	29,32	30,98	18,40	17,46	▲
Barang lainnya	3,10	2,64	2,70	2,91	2,69	2,83	▼
TOTAL PENJUALAN	172,13	181,94	216,06	228,84	197,89	205,50	▼

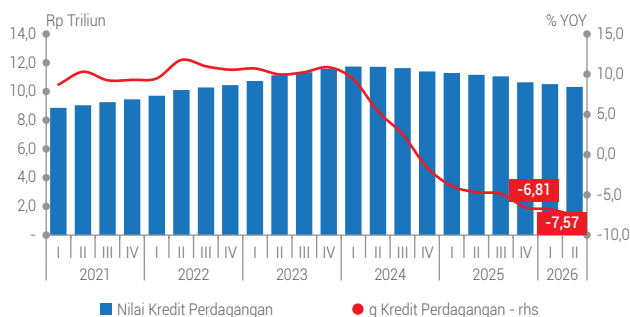
Sumber: Survei Penjualan Eceran KPw BI Provinsi NTT, diolah

Grafik 1.28. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT



Sumber: BGN (diolah)

Grafik 1.29. Perkembangan Kredit Perdagangan



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek) (diolah)

1.3.3. Konstruksi

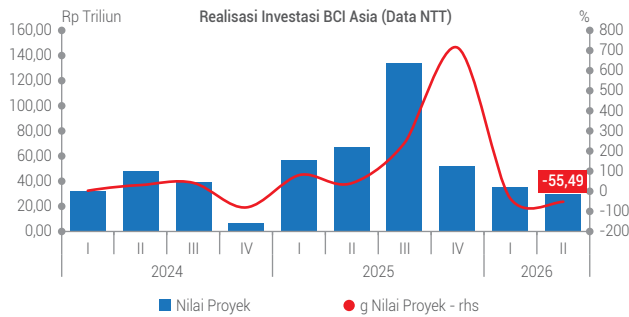
Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 semakin meningkat, ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek swasta serta pelaksanaan proyek fisik pemerintah. LU Konstruksi tumbuh 10,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,20% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan realisasi investasi swasta yang tumbuh 83,69% (yoy), menguat dari 33,55% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.30). Penguatan investasi antara lain ditopang oleh pembangunan sektor pariwisata dan properti di Manggarai Barat, dengan realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1,17 triliun, terutama pada sektor hotel dan restoran serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Dari sisi pemerintah, belanja modal tetap tumbuh tinggi sebesar 52,24% (yoy), meskipun melambat dari 168,33% (yoy), sejalan dengan berlanjutnya penyelesaian proyek infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik. Namun demikian, berdasarkan data BCI Asia, nilai proyek investasi di NTT masih berkontraksi 55,49%

(yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 1.31). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas konstruksi terutama bersumber dari realisasi dan penyelesaian proyek yang telah berjalan serta masih terkonsentrasi pada wilayah dan sektor tertentu, sementara pembentukan proyek baru berskala besar masih terbatas.

Grafik 1.30. Perkembangan Belanja Modal APBD dan APBN serta PMA



Sumber: BKAD, DJPb, DPMPPTSP Provinsi NTT (diolah)

Grafik 1.31. Nilai Investasi di NTT


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (diolah)

Realisasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) K-SIGN dan ISF mengalami akselerasi di triwulan berjalan.

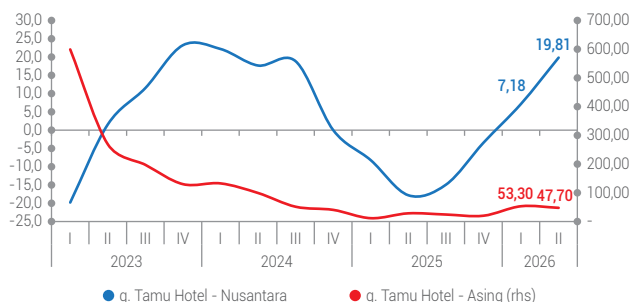
Target realisasi K-SIGN tahap I pada triwulan II telah selesai secara fisik yang direncanakan dilakukan percepatan pembangunan tahap II pada triwulan selanjutnya. Pembangunan ISF di Provinsi NTT pada triwulan II 2026 berlangsung dengan pagu anggaran 2026 mencapai Rp857 miliar dengan realisasi mencapai Rp599 miliar pada triwulan berjalan.

1.3.4. Lapangan Usaha Lainnya

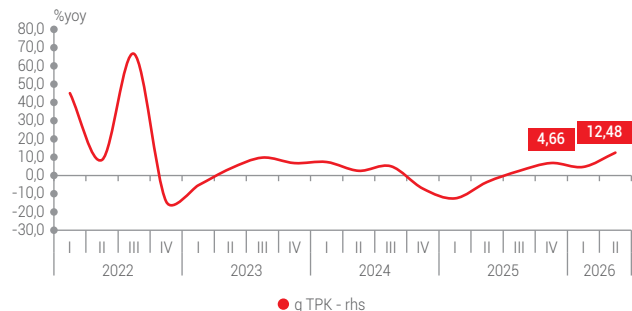
Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) pada triwulan II 2026 tetap tumbuh kuat meskipun mengalami perlambatan. LU Akmamin tumbuh 18,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,22% (yoy), tetapi masih menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi.

Kinerja positif tersebut ditopang oleh momentum HBKN Paskah dan Iduladha, rangkaian hari libur nasional dan libur sekolah, serta penyelenggaraan kegiatan *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE) pemerintah maupun swasta. Jumlah tamu hotel nusantara tumbuh 19,81% (yoy), meningkat dari 7,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah tamu hotel mancanegara tetap tumbuh tinggi sebesar 47,70% (yoy), meskipun melambat dari 53,30% (yoy) (Grafik 1.32). Peningkatan aktivitas menginap tersebut mendorong pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel meningkat menjadi 12,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 4,66% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 1.33).

Perlambatan LU Akmamin terutama dipengaruhi oleh moderasi aktivitas pariwisata di Labuan Bajo serta melemahnya pembiayaan usaha. Pertumbuhan kedatangan penumpang melalui Bandara Komodo melambat menjadi 0,27% (yoy), dari 5,87% (yoy) pada triwulan sebelumnya, meskipun secara triwulanan jumlah kedatangan meningkat seiring musim liburan (Grafik 1.34). Perkembangan ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas hotel dan restoran belum diikuti oleh akselerasi kunjungan wisatawan yang merata pada seluruh destinasi. Di sisi pembiayaan, kredit LU Akmamin berkontraksi 3,94% (yoy), berbalik arah dari pertumbuhan 21,66% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.35). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kuatnya aktivitas Akmamin lebih banyak ditopang oleh optimalisasi kapasitas usaha yang telah tersedia dan permintaan musiman, sementara ekspansi usaha baru melalui pembiayaan perbankan masih terbatas.

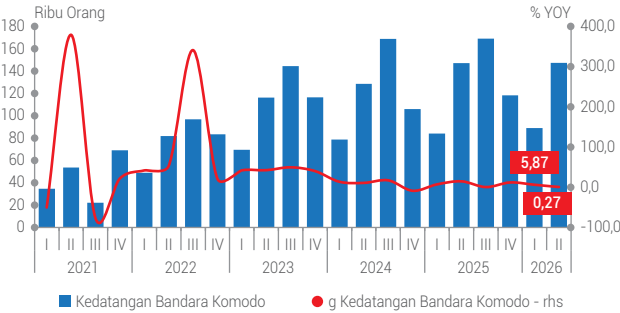
Grafik 1.32. Perkembangan Jumlah Kunjungan Tamu Hotel di NTT


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.33. Tingkat Penghunian Kamar di Provinsi NTT


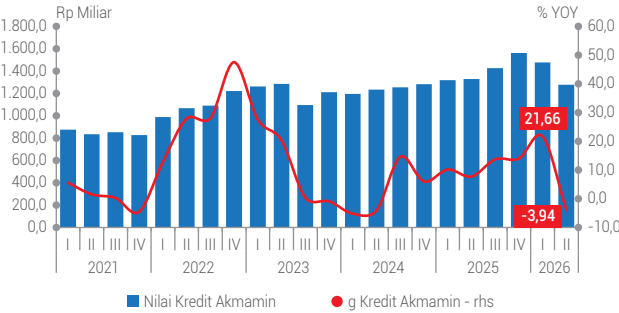
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.34. Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara Komodo



Sumber: UPBU Komodo Labuan Bajo (diolah)

Grafik 1.35. Perkembangan Kredit Akmamin



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek) (diolah)

Boks 1

Potensi Rumput Laut NTT sebagai Nilai Tambah Ekonomi

Laut bukan sekadar ruang geografis yang memisahkan pulau-pulau, tetapi juga merupakan sumber kehidupan dan peluang ekonomi yang sangat besar. Salah satu potensi tersebut hadir melalui rumput laut, komoditas yang telah lama dibudidayakan oleh masyarakat pesisir NTT dan kini memiliki peluang untuk berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi berbasis kelautan. Potensi tersebut tercermin dari skala produksinya. Kementerian PPN/Bappenas pada 2025 menyebut NTT sebagai daerah penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia, dengan produksi sekitar 1,16 juta ton per tahun. Besarnya produksi tersebut menjadi modal penting bagi NTT untuk tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga mengambil bagian yang lebih besar dalam proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah. Dalam RPJMN 2025–2029, pengembangan hilirisasi rumput laut ditetapkan sebagai salah satu kegiatan prioritas utama. Arah kebijakan tersebut mencakup pengembangan klaster budidaya, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan produktivitas, standardisasi, ketertelusuran, serta pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi.

Rumput laut memiliki keunggulan yang menarik karena siklus produksinya relatif cepat, yaitu sekitar 45–60 hari. Berdasarkan hasil *site visit* rumput laut Bank Indonesia pada Agustus 2026, kelompok pembudidaya rumput laut di Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, hingga petani rumput laut di Desa Tanamanang, Sumba Timur, menggunakan metode *longline* dengan masa panen sekitar 45 hari. Di Pasir Panjang, terdapat lima kelompok pembudidaya dengan

total 86 anggota, dengan sistem budidaya gotong royong, termasuk pembagian bibit antarpembudidaya. Penanaman juga dilakukan secara bertahap sehingga panen dapat berlangsung hampir setiap hari, dengan produksi sekitar 3–4 ton dalam rentang dua hingga tiga minggu. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa rumput laut telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus memiliki karakteristik produksi yang memungkinkan pengembangan pasokan secara berkelanjutan apabila didukung dengan pengelolaan budidaya yang baik.

Potensi pengembangan bahkan masih sangat luas. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi lahan budidaya rumput laut sekitar 32.000 hektare, sementara lahan yang telah dimanfaatkan baru sekitar 2.124 hektare. Artinya, masih terdapat ruang yang sangat besar untuk mengembangkan budidaya secara bertahap dan terukur. Sumba Timur juga memiliki ruang pengembangan yang besar. Dokumen perencanaan daerah mencatat potensi lahan budidaya rumput laut sekitar 15.069 hektare, dengan lahan yang telah dimanfaatkan sekitar 350 hektare. Kabupaten ini juga telah memiliki basis pembudidaya dan industri pengolahan melalui PT Algae Sumba Timur Lestari (PT Astil). Keberadaan PT Astil memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi rumput laut di NTT mulai bergerak dari sekadar budidaya menuju pengolahan. Berdasarkan hasil *site visit* Bank Indonesia, pabrik memiliki kapasitas sekitar 10 ton per hari dan menggunakan sekitar 95% bahan baku dari NTT. PT Astil mengolah jenis rumput laut *Cottonii* menjadi ATCC dan jenis *Spinosum* menjadi ATSC.

Gambar Boks 1.1. Rumput Laut (jenis *Cottonii*) dan kelompok pembudidaya desa Tanamanang, Sumba Timur



Rumput laut yang sebelumnya hanya memiliki nilai sebagai hasil budidaya kini dapat memberikan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan, tenaga kerja, transportasi, penyimpanan, pengujian mutu, hingga kegiatan penelitian dan pengembangan. Dampaknya juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dimana 95% karyawan PT Astil merupakan masyarakat lokal Sumba Timur. Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya berbicara mengenai nilai produk, tetapi juga mengenai bagaimana sumber daya lokal dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, pengembangan rumput laut NTT tidak harus memerlukan pembukaan lokasi baru, melainkan dapat menggunakan sentra yang sudah berkembang untuk meningkatkan produktivitas, penguatan kualitas bibit, serta pemanfaatan lokasi yang secara bertahap dapat memperbesar produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan perairan.

Keunggulan sektor rumput laut di NTT bukan hanya terletak pada kekayaan jumlah produksinya, tetapi juga pada banyaknya produk yang dapat dihasilkannya. Rumput laut kering dapat menjadi bahan baku berbagai produk olahan antara. Dari sana, produk dapat berkembang menjadi bahan untuk industri pangan, kosmetik, kesehatan, pertanian, maupun berbagai kebutuhan industri lainnya.

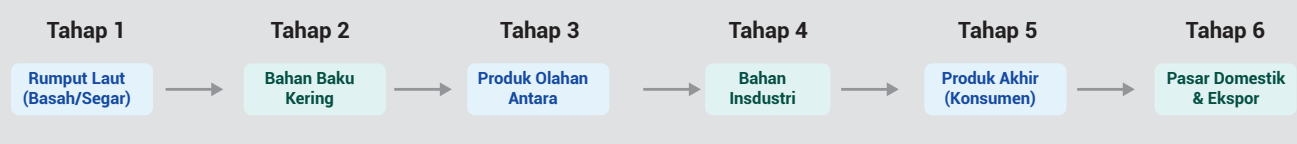
Semakin panjang dan semakin kompleks proses pengolahan yang dapat dilakukan di dalam daerah, semakin besar pula peluang nilai tambah yang tercipta. Arah tersebut telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam RPJMN 2025–2029, pengembangan hilirisasi rumput laut secara eksplisit diarahkan sebagai kegiatan prioritas. Pemerintah juga mendorong pengembangan sistem informasi, standardisasi, ketertelusuran, inovasi produk, serta pengembangan ragam produk turunan bernilai tambah tinggi. Bagi NTT, hal ini membuka peluang yang sangat menarik. Rumput laut tidak harus berhenti sebagai komoditas yang dijual dalam bentuk kering. Produk antara

seperti yang telah dihasilkan PT Astil dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju produk dengan tingkat pengolahan yang semakin tinggi.

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan rumput laut NTT masih menghadapi tantangan pada sisi produktivitas dan kualitas bahan baku. Pemerintah pusat dalam RPJMN 2025–2029 bahkan menempatkan peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas budi daya sebagai salah satu bagian dari agenda pengembangan hilirisasi rumput laut. Tantangan di sisi hulu menjadi penting karena kualitas dan kontinuitas bahan baku akan menentukan kemampuan industri untuk beroperasi secara optimal. Karena itu, pengembangan rumput laut NTT perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas budidaya, penggunaan bibit yang berkualitas, perbaikan praktik budidaya dan pascapanen, serta penguatan sarana pendukung agar bahan baku yang dihasilkan memenuhi spesifikasi industri.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya proses pengolahan dan diversifikasi produk bernilai tambah. Bappenas mencatat bahwa produksi rumput laut NTT yang mencapai sekitar 1,16 juta ton per tahun masih perlu dioptimalkan melalui pengolahan lebih lanjut sebelum dipasarkan agar nilai tambahnya dapat lebih banyak tercipta di dalam negeri. Sejalan dengan itu, KKP mendorong diversifikasi produk rumput laut, tidak hanya berupa produk hidrokoloid, tetapi juga produk seperti biostimulan, pakan, kosmetik, bioplastik, dan bahan kemasan ramah lingkungan. Bagi NTT, penguatan hilirisasi dapat dilakukan secara bertahap dengan memperkuat keterhubungan antara pembudidaya dan industri pengolahan, meningkatkan standardisasi serta pengendalian mutu, dan menarik investasi pada produk turunan yang memiliki kesiapan bahan baku, teknologi, dan pasar.

Gambar Boks 1.2. Rantai Nilai Ekonomi Rumput Laut (alur peningkatan nilai tambah)



Dengan demikian, prioritas pengembangan rumput laut NTT tidak semata-mata meningkatkan volume produksi, tetapi memastikan peningkatan produksi tersebut diikuti oleh peningkatan kualitas bahan baku, kapasitas pengolahan, dan nilai tambah di daerah. Pendekatan ini sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 yang menargetkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut melalui peningkatan produksi, investasi hilirisasi, dan utilisasi industri pengolaha





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB II

Perkembangan Inflasi Daerah

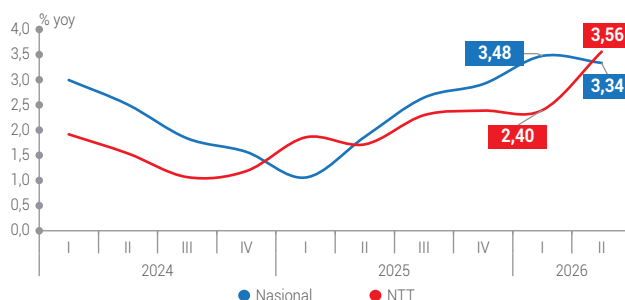
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,56% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,40% (yoy). Tingkat inflasi ini sedikit di atas sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$, serta berada di atas capaian inflasi nasional yang sebesar 3,34% (yoy). Kenaikan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau serta masih tingginya inflasi pada kelompok perawatan pribadi & jasa lainnya. Secara spasial, 2 (dua) dari 5 (lima) kabupaten/kota pengukuran IHK memiliki tingkat inflasi di atas sasaran. Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah dengan dipimpin oleh TPID masing-masing daerah dalam rangka mencapai inflasi yang terjaga dalam sasaran.

2.1. PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI NTT

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,56% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,40% (yoy) (Grafik 2.1). Capaian inflasi ini berada sedikit di atas sasaran inflasi yang sebesar 2,5±1%, serta berada di atas tingkat inflasi nasional yang sebesar 3,34% (yoy). Secara spasial Kab/ Kota pengukuran indeks harga konsumen (IHK) di Provinsi NTT, inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 4,02% (yoy), diikuti oleh Waingapu (3,82%; yoy), Kab. Ngada (3,07%; yoy), Maumere (3,02%; yoy), dan Kab. Timor Tengah Selatan (TTS) (2,80%; yoy). Berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, bobot nilai konsumsi di Kab/Kota pengukuran IHK pada Provinsi NTT dari yang tertinggi hingga terendah yaitu Kota Kupang sebesar 55,11%; Kab. TTS sebesar 23,42%; Kab. Ngada sebesar 10,02%; Maumere sebesar 5,95%; dan Waingapu sebesar 5,50%.

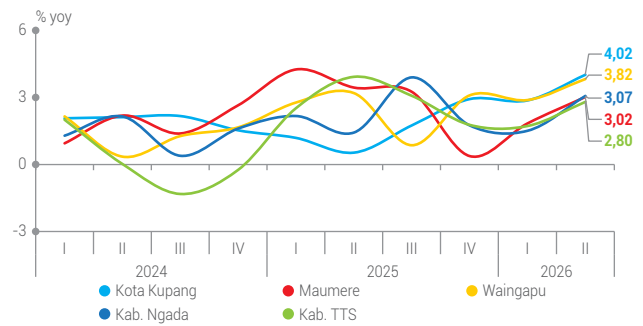
Tekanan inflasi triwulan II 2026 terutama bersumber dari peningkatan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Peningkatan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau utamanya disebabkan oleh komoditas ikan kembung, daging ayam ras, tomat, beras dan daging babi. Sementara itu peningkatan inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia yang dipengaruhi eskalasi tensi geopolitik dan ketidakpastian di pasar keuangan.

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi pada wilayah pengukuran IHK di Provinsi NTT



Sumber: BPS, diolah

2.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN

Berdasarkan kelompok pengeluaran, andil inflasi pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,17% (yoy) dan memberikan sumbangan andil 1,54% (yoy) terhadap inflasi IHK Nusa Tenggara Timur pada triwulan II 2026 (Tabel 2.1). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi kelompok ini pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,11% (yoy). Lebih lanjut, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 14,84% (yoy) dan memberikan sumbangan andil 0,93% (yoy) terhadap inflasi IHK pada triwulan II 2026, lebih rendah jika dibandingkan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 20,44% (yoy).

2.2.1. Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau

Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 4,17% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tingkat inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,11% (yoy) (Grafik 2.3). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh komoditas ikan kembung, daging ayam ras, tomat, beras, dan daging babi. Ikan kembung merupakan salah satu jenis ikan pelagis kecil. Peningkatan harga komoditas ikan kembung terutama dipengaruhi oleh terganggunya produksi akibat kondisi angin kencang dan gelombang tinggi, seiring dengan kembali menguatnya

Tabel 2.1. Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

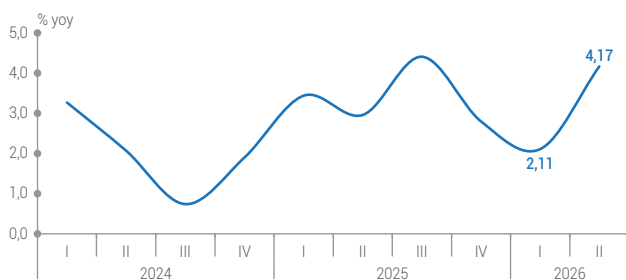
Kelompok Komoditas	(% mtm)			(% yoy)		andil yoy	
	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Tw I '26	Tw II '26	Tw I '26	Tw II '26
Inflasi Umum	0,43	-0,26	0,67	2,40	3,56	2,40	3,56
Makanan, Minuman & Tembakau	0,59	-1,24	0,98	2,11	4,17	0,79	1,54
Pakaian & Alas Kaki	0,01	0,17	0,23	0,22	0,61	0,01	0,03
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	0,48	0,52	0,42	0,56	2,04	0,10	0,37
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,24	0,36	0,41	-0,06	0,90	~0	0,03
Kesehatan	0,03	0,21	0,59	1,70	2,30	0,03	0,04
Transportasi	1,07	0,41	1,25	2,15	3,87	0,29	0,52
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,88	0,10	0,59	-0,64	1,08	-0,04	0,06
Rekreasi, Olahraga & Budaya	~0	0,07	-0,38	0,64	0,20	0,01	~0
Pendidikan	0,04	~0	~0	-2,29	-2,25	-0,09	-0,08
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0,11	1,16	0,02	1,16	2,36	0,06	0,12
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	-1,01	-0,49	0,01	20,44	14,84	1,24	0,93

Sumber: BPS (diolah)

aktivitas Monsun Timur Australia sejak akhir Juni. Pasokan ikan kembung relatif rentan terhadap gangguan cuaca karena penangkapannya kerap menggunakan armada kecil (<10 GT), khususnya kapal >5–10 GT yang pada perikanan pelagis kecil dapat beroperasi di Jalur Penangkapan II sekitar 4–12 mil laut dari pantai, sehingga aktivitas melaut mudah terganggu oleh angin kencang dan gelombang tinggi. Peningkatan pada komoditas daging ayam ras utamanya disebabkan oleh kenaikan harga pakan sekitar 12%-13% dipengaruhi oleh peningkatan harga jagung pakan ternak dan kenaikan biaya ongkos angkut sekitar

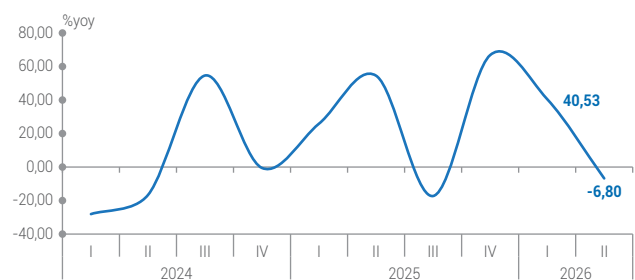
16% dipengaruhi oleh dampak dari kondisi geopolitik terhadap biaya logistik. Sementara itu, kondisi hasil produksi komoditas beras mengalami kontraksi sebesar 6,80% (yoy) pada triwulan II 2026 setelah meningkat cukup signifikan pada triwulan sebelumnya sebesar 40,53% (yoy) (Grafik 2.4). Penurunan produksi komoditas beras terutama dipengaruhi oleh berkurangnya hasil panen akibat kondisi hidrometeorologi, berupa suhu tinggi berkepanjangan yang diikuti hujan berintensitas tinggi, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman, meningkatkan risiko genangan, serta menurunkan produktivitas dan kualitas gabah saat panen.

Grafik 2.3. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.4. Perkembangan Produksi Komoditas Beras di Provinsi NTT



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Tabel 2.2.
Komoditas Utama yang Memberikan Andil Inflasi dan Deflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan II 2026

Komoditas Inflasi	Andil (%yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (%yoy)
IKAN KEMBUNG	0,179	IKAN KAKAP MERAH	-0,020
DAGING AYAM RAS	0,157	PISANG	-0,018
TOMAT	0,132	JERUK NIPIS	-0,012
BERAS	0,112	KENTANG	-0,011
DAGING BABI	0,091	TAHU MENTAH	-0,007

2.2.2. Kelompok Pakaian & Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,61% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,22% (yoy) (Grafik 2.5). Inflasi utamanya didorong oleh subkelompok pakaian yang mengalami inflasi sebesar 1,29% (yoy), melanjutkan tren inflasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,06% (yoy). Lebih lanjut, subkelompok alas kaki mengalami deflasi -1,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi -2,02% (yoy) (Grafik 2.6). Kenaikan inflasi pada kelompok ini seiring dengan berakhirnya momen HBKN Ramadan dan Idulfitri yang memberlakukan banyak promo diskon untuk komoditas pakaian & alas kaki, sementara pada momen HBKN sepanjang triwulan II 2026 tidak ada HBKN spesifik yang mendukung promo diskon untuk komoditas pakaian & alas kaki.

2.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga

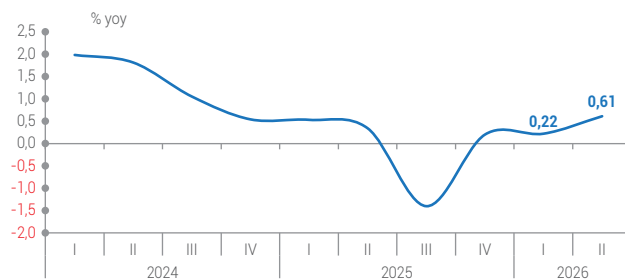
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 2,04% (yoy), meningkat dari inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 0,56% (yoy)

(Grafik 2.7). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh peningkatan inflasi pada subkelompok listrik dan bahan bakar rumah lainnya, yang mengalami inflasi sebesar 3,44% (yoy) (Grafik 2.8) serta subkelompok pemeliharaan, perbaikan & keamanan yang mengalami inflasi sebesar 2,48% (yoy). Peningkatan inflasi pada subkelompok listrik dan bahan bakar rumah lainnya sejalan dengan penetapan kenaikan harga LPG nonsubsidi sekitar 19%, dengan LPG 5,5 kg meningkat dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung dan LPG 12 kg dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, seiring penyesuaian terhadap perkembangan harga LPG di pasar internasional.

2.2.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

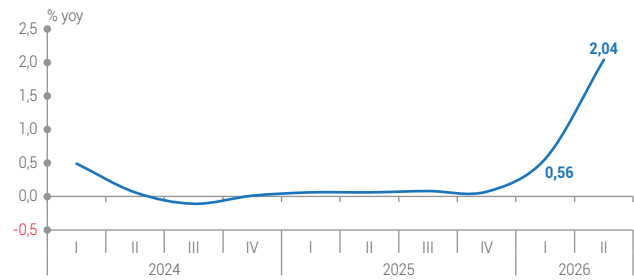
Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,90% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,06% (yoy) (Grafik 2.9). Peningkatan inflasi pada triwulan II 2026 utamanya disebabkan oleh subkelompok barang pecah belah & peralatan makan minum sebesar 8,56% (yoy) serta subkelompok furnitur, perlengkapan & karpet sebesar 3,92% (yoy) (Grafik 2.10). Peningkatan harga barang pecah

Grafik 2.5 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki



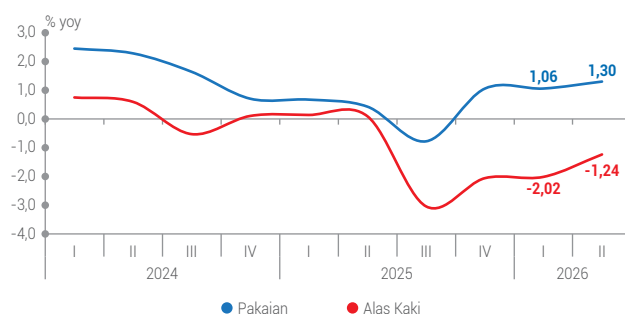
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.7. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga



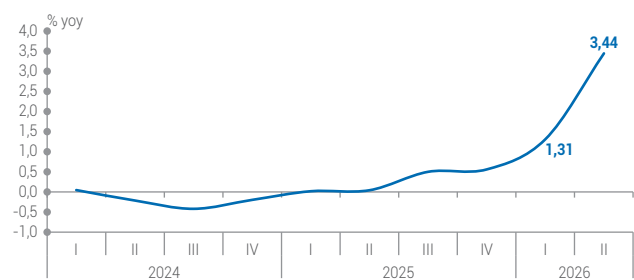
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.6. Inflasi Subkelompok Pakaian dan Alas Kaki

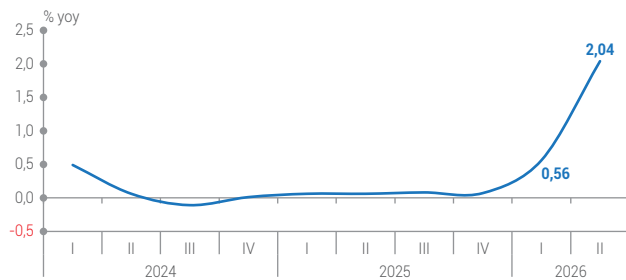


Sumber: BPS, diolah

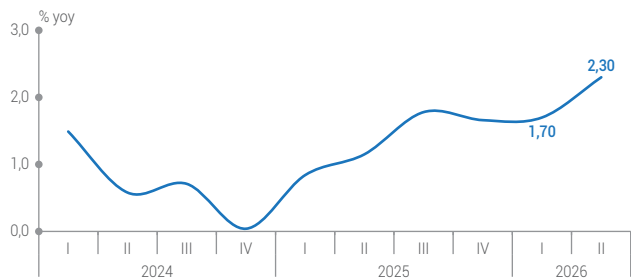
Grafik 2.8. Inflasi Subkelompok Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga



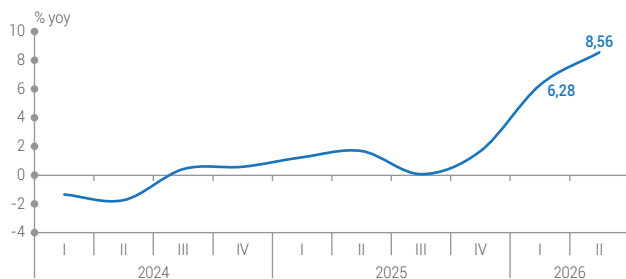
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.9. Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga

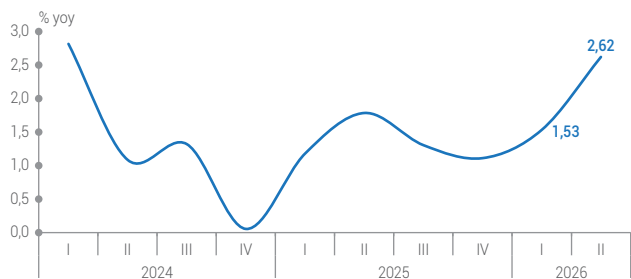
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.11. Inflasi Kelompok Kesehatan

Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.10. Inflasi Subkelompok Barang Pecah Belah & Peralatan Makan Minum

Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (diolah)

Grafik 2.12. Inflasi Subkelompok Obat-Obatan & Produk Kesehatan

Sumber: BPS (diolah)

belah dan peralatan makan-minum terutama dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pengadaan dan distribusi barang dari luar daerah, sementara kenaikan harga furnitur turut didorong oleh peningkatan biaya bahan baku serta ongkos pengiriman antarpulau.

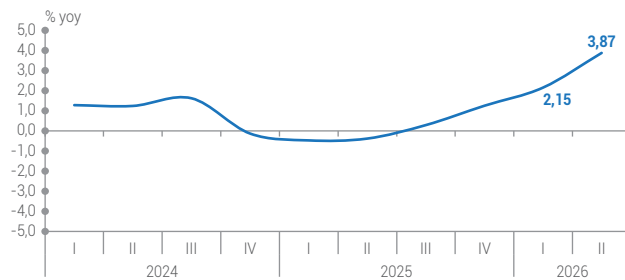
2.2.5. Kelompok Kesehatan

Inflasi kelompok kesehatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,30% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,70% (yoy) (Grafik 2.11). Peningkatan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh subkelompok obat-obatan & produk kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 2,62% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 1,53% (yoy) (Grafik 2.12). Peningkatan inflasi pada subkelompok obat-obatan utamanya disebabkan oleh meningkatnya harga impor harga bahan baku untuk obat-obatan akibat pengiriman logistik yang terganggu dampak dari konflik internasional.

2.2.6. Kelompok Transportasi

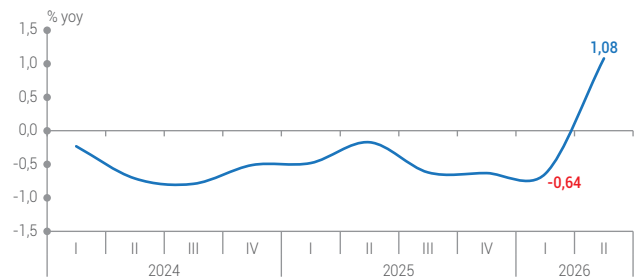
Kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 3,87% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,15% (yoy) (Grafik 2.13). Peningkatan inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh peningkatan inflasi subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi yang mengalami inflasi sebesar 3,05% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,23% (yoy) (Grafik 2.14). Inflasi pada subkelompok ini utamanya disebabkan dinamika peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sepanjang triwulan II 2026 dipengaruhi oleh harga minyak internasional yang meningkat akibat konflik internasional. Sepanjang triwulan II 2026, harga BBM nonsubsidi mengalami tekanan kenaikan yang signifikan, diawali peningkatan harga Pertamina Turbo dan Dex Series pada pertengahan April serta kenaikan lanjutan pada Mei, kemudian pada Juni Dexlite dan Pertamina Dex terkoreksi turun sementara Pertamina Turbo meningkat dan diikuti kenaikan Pertamina dari Rp12.300 menjadi Rp16.250/liter pada 10 Juni. Selain itu, kenaikan inflasi pada subkelompok ini juga turut disebabkan oleh peningkatan pada komoditas pelumas/oli mesin.

Grafik 2.13. Inflasi Kelompok Transportasi



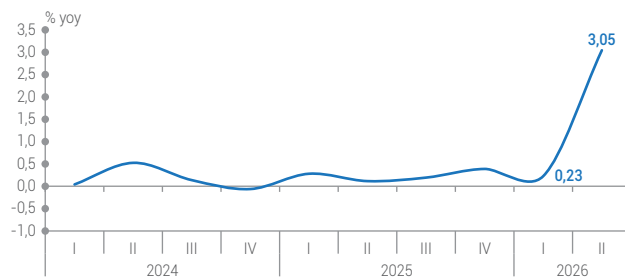
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.15. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan



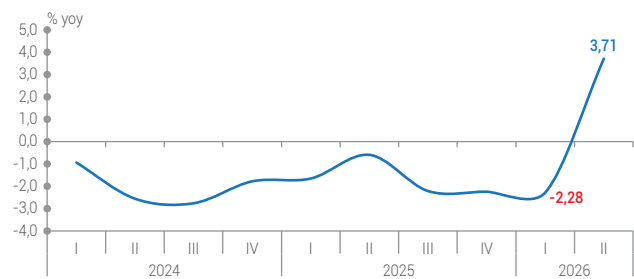
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.14. Inflasi Subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.16. Inflasi Subkelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi



Sumber: BPS (diolah)

2.2.7. Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan

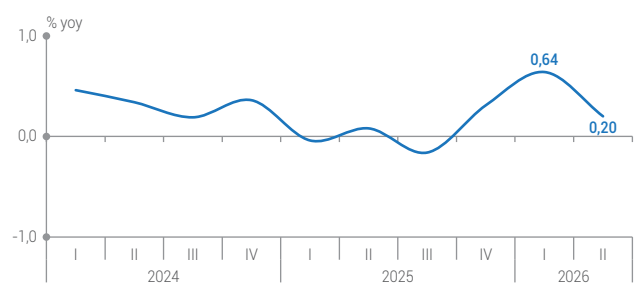
Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 1,08% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,64% (yoy) (Grafik 2.15). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh subkelompok peralatan informasi & komunikasi yang mengalami inflasi sebesar 3,71% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -2,28% (yoy). Peningkatan inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas telepon seluler dan laptop/notebook, seiring dengan peningkatan harga komponen produksi komoditas secara global serta biaya distribusi internasional di mana mayoritas komoditas tersebut merupakan impor dari luar negeri.

2.2.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya

Kelompok rekreasi, olahraga & budaya mengalami inflasi sebesar 0,20% (yoy) pada triwulan II 2026, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,64% (yoy) (Grafik 2.17). Inflasi tertahan

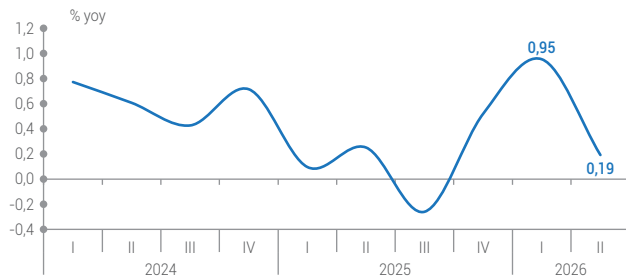
utamanya disebabkan oleh subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah yang mengalami perlambatan inflasi menjadi sebesar 0,19% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,95% (yoy) (Grafik 2.18). Perlambatan inflasi subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah dipengaruhi oleh normalisasi harga di tengah permintaan yang belum mencapai puncaknya pada Juni, seiring aktivitas belanja kebutuhan sekolah yang cenderung bergeser ke Juli menjelang dimulainya tahun ajaran baru.

Grafik 2.17. Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya



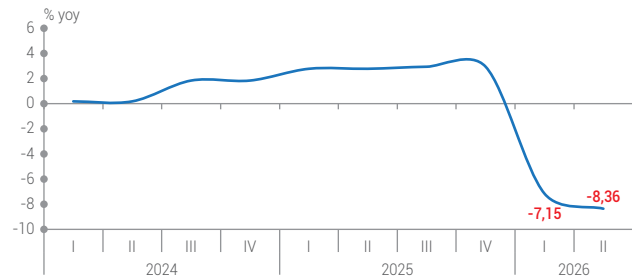
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.18. Inflasi Subkelompok Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.20. Inflasi Subkelompok Pendidikan Menengah



Sumber: BPS (diolah)

2.2.9. Kelompok Pendidikan

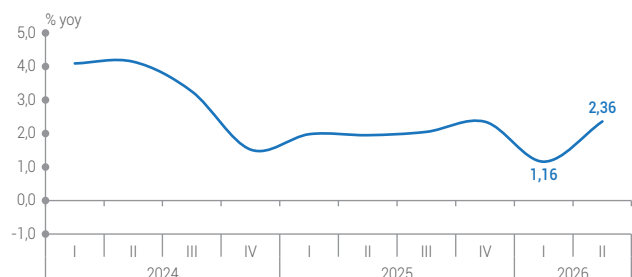
Kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar -2,25% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -2,29% (yoy) (Grafik 2.19). Tingkat deflasi ini utamanya disebabkan oleh subkelompok pendidikan menengah yang mengalami deflasi sebesar -8,36% (yoy), melanjutkan deflasi dari bulan sebelumnya yang sebesar -7,15% (yoy) (Grafik 2.20). Hal ini dikarenakan penurunan harga pada tarif sekolah menengah atas didukung dengan penerapan penurunan tarif sekolah menengah atas (SMA) seiring dengan implementasi Pergub No. 53 tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan Jenjang SMA/SMK/SLB yang berlaku dari 27 Oktober 2025. Pergub ini menjelaskan bahwa sekolah menengah di seluruh NTT hanya diperbolehkan menarik satu jenis iuran, yakni Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) dengan batas maksimal Rp100.000,- per siswa per bulan.

2.2.10. Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran

Inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tercatat sebesar 2,36% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

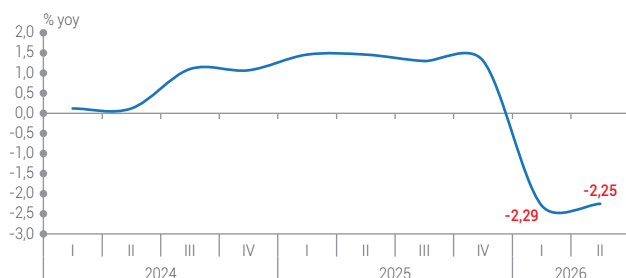
sebesar 1,16% (yoy) (Grafik 2.21). Inflasi yang terjadi pada kelompok ini didukung oleh meningkatnya inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sehingga meningkatkan harga perolehan bahan baku untuk diolah. Inflasi ini mendukung pertumbuhan omzet pada penjualan makanan di restoran tercermin dari hasil survei penjualan eceran oleh Bank Indonesia untuk omzet penjualan makanan jadi dan minuman (Grafik 2.22) dan kinerja LU Akmamin yang tetap kuat pada triwulan II 2026.

Grafik 2.21. Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran



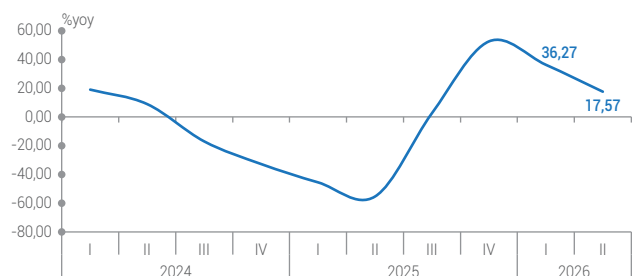
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.19. Inflasi Kelompok Pendidikan



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.22. Omzet Penjualan Eceran Makanan Jadi dan Minuman

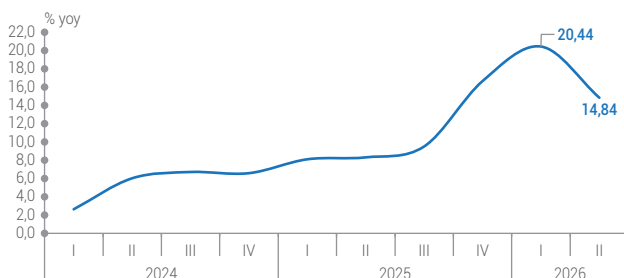


Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (diolah)

2.2.11. Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 14,84% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,44% (yoy) (Grafik 2.23). Komoditas yang menjadi penyumbang utama peningkatan inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang mengalami inflasi sebesar 47,06% (yoy) atau memberikan andil sebesar 0,685% (yoy) terhadap inflasi di Provinsi NTT. Perkembangan harga emas pada level domestik dan internasional mengalami perlambatan pada triwulan II 2026 yang menyebabkan penurunan inflasi pada kelompok ini. Penurunan harga emas internasional dan domestik pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh meredanya permintaan aset *safe haven*, pergeseran preferensi investor ke instrumen dengan *yield* lebih tinggi, serta aksi ambil untung (*profit taking*) setelah harga emas mencapai level tinggi pada awal tahun.

Grafik 2.23. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

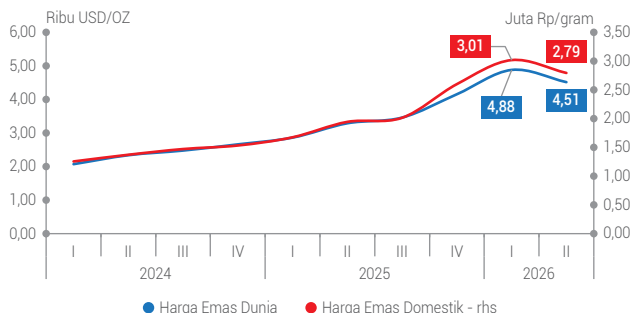


Sumber: BPS (diolah)

2.3. INFLASI BERDASARKAN KOTA/KABUPATEN PENGUKURAN IHK

Pada triwulan II 2026 seluruh Kota/Kabupaten pengukuran IHK di Provinsi NTT mengalami peningkatan inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 4,02% (yoy), dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar 2,80% (yoy). Sebanyak 2 Kab/Kota pengukuran IHK mencatatkan inflasi di atas sasaran 2,5±1%, yakni Kota Kupang dan Waingapu, sementara 3 kab/kota lainnya mencatatkan tingkat inflasi pada batas atas sasaran inflasi. Berdasarkan perhitungan Survei Biaya Hidup (SBH) terbaru pada tahun 2022, bobot nilai konsumsi masing-masing Kab/Kota yaitu, Kota Kupang sebesar 55,11%; Kab. TTS sebesar 23,42%; Kab. Ngada sebesar 10,02%; Maumere sebesar 5,95%; dan Waingapu sebesar 5,50%.

Grafik 2.24. Perkembangan Harga Komoditas Emas Dunia dan Domestik



Sumber: Bloomberg dan Antam (diolah)

Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi Wilayah Pengukuran IHK Berdasarkan Kelompok Pengeluaran pada Triwulan I dan II 2026

Kelompok Komoditas	Kota Kupang		Maumere		Waingapu		Kab. TTS		Kab. Ngada	
	Tw I '26	Tw II '26	Tw I '26	Tw II '26	Tw I '26	Tw II '26	Tw I '26	Tw II '26	Tw I '26	Tw II '26
Inflasi Umum	2,87	4,02	1,84	3,02	2,88	3,82	1,72	2,80	1,51	3,07
Makanan, Minuman & Tembakau	1,80	4,42	2,39	4,28	3,75	5,49	2,09	3,04	2,24	5,36
Pakaian & Alas Kaki	-5,08	-4,27	0,01	0,47	9,39	6,85	6,59	6,78	0,31	0,06
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	0,77	2,51	0,90	2,04	0,09	1,66	-0,29	0,09	0,77	2,60
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0,87	0,05	-0,73	1,86	0,55	1,94	0,30	1,64	2,29	1,91
Kesehatan	1,35	2,46	12,32	12,55	-0,77	-1,35	0,26	3,23	0,34	0,16
Transportasi	2,60	4,75	2,50	2,13	2,77	3,15	0,65	3,02	1,17	-1,75
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	-0,77	1,42	-0,12	0,52	-0,37	2,06	-0,60	0,21	0,00	0,11
Rekreasi, Olahraga & Budaya	0,01	-0,65	3,64	3,64	7,19	5,15	0,12	0,48	0,08	0,08
Pendidikan	-5,33	-5,25	-2,01	-2,01	3,63	3,63	2,26	2,26	0,19	0,19
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	1,34	2,02	1,96	2,65	1,44	1,50	0,00	4,11	1,36	1,36
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	28,77	20,10	2,74	2,78	6,79	3,32	4,86	5,33	2,73	3,24

Sumber : BPS (diolah)

2.3.1. Kota Kupang

Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 4,02% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,87% (yoy). Peningkatan inflasi utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi, sementara inflasi pada kelompok perawatan pribadi & jasa lainnya mengalami perlambatan pada triwulan II 2026. Komoditas yang menjadi pendorong inflasi pada triwulan II 2026 antara lain emas perhiasan, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, ikan kembung dan daging babi. Peningkatan tarif *fuel surcharge* di triwulan II 2026 menjadi penyebab utama peningkatan tarif angkutan udara yaitu penyesuaian batas maksimum *fuel surcharge* dari 38% menjadi 50% terhadap TBA sebagai respons atas kenaikan harga avtur di tingkat nasional dan internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. 1041 Tahun 2026. Selain itu, peningkatan harga pada komoditas daging babi seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat pada *combo festive season* di triwulan II 2026. Sementara itu, inflasi utamanya dapat tertahan akibat deflasi yang terjadi pada tarif sekolah menengah atas, ikan tembang, sabun detergen bubuk, ikan kakap merah, dan buku tulis bergaris. Tingkat inflasi tahunan Kota Kupang merupakan yang tertinggi pada triwulan II 2026 dan berada di atas sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$, sehingga upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang perlu diperkuat untuk menjaga tingkat inflasi pada tahun 2026 masuk dalam tingkat sasaran inflasi.

2.3.2. Maumere

Inflasi sebesar 3,02% (yoy) terjadi di Maumere pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,84% (yoy). Inflasi utamanya didorong oleh peningkatan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok kesehatan. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang utama inflasi di Maumere pada triwulan II 2026 antara lain komoditas ikan selar, beras, sigaret kretek mesin (SKM), pepaya, dan tarif rumah sakit. Kenaikan tarif rumah sakit sejalan dengan penyesuaian tarif layanan untuk peningkatan layanan pada RSUD dr. TC Hiller. Sementara itu, komoditas yang menjadi penghambat laju inflasi di Maumere antara lain komoditas cabai rawit, tarif sekolah menengah atas, tarif angkutan udara, pisang, dan ikan merah. Penurunan tarif sekolah menengah seiring dengan implementasi Pergub No. 53 tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan Jenjang SMA/SMK/SLB yang berlaku di seluruh Provinsi NTT pada awal tahun 2026.

2.3.3. Waingapu

Pada triwulan II 2026, inflasi di Waingapu tercatat sebesar 3,82% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,88% (yoy). Peningkatan inflasi utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perumahan, air, listrik, & bahan bakar rumah tangga. Berdasarkan komoditasnya yang menjadi pendorong utama inflasi di Waingapu pada triwulan II 2026 antara lain peningkatan harga pada cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, ikan tongkol dan ayam hidup. Hal ini sejalan dengan hasil produksi tanaman hortikultura (bawang merah dan cabai rawit) di Kab. Sumba Timur yang mengalami kontraksi sebesar 70,3% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 58,6% (yoy)¹. Sementara itu, komoditas yang menjadi penahan laju inflasi di Waingapu pada triwulan II 2026 antara lain, tempe, kangkung, tarif angkutan udara, bayam dan sawi hijau. Tingkat inflasi Waingapu pada triwulan II 2026 telah berada di atas sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$, sehingga upaya pengendalian inflasi harus ditingkatkan untuk dapat menjaga tingkat inflasi dalam sasaran pada tahun 2026.

2.3.4. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)

Kab. TTS tercatat mengalami inflasi sebesar 2,80% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,72% (yoy). Inflasi utamanya didorong oleh peningkatan pada kelompok makanan, minuman & tembakau; kelompok transportasi; serta kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya. Berdasarkan komoditasnya, inflasi utamanya didorong oleh kenaikan harga ikan tembang, daging ayam ras, beras, pelumas/oli mesin dan bawang merah. Terjadi penurunan produksi komoditas padi (GKG) di Kab. TTS pada triwulan II 2026 yang terkontraksi sebesar 19,5% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan produksi sebesar 84,8% (yoy). Selain itu, berkurangnya pasokan untuk daging ayam ras yang didapatkan dari Kota Kupang dan Kab. Kupang akibat kendala logistik dan hasil panen ayam yang menurun meningkatkan laju inflasi pada komoditas di Kab. TTS. Di sisi lain, komoditas yang utamanya menjadi penahan laju inflasi Kab. TTS pada triwulan II 2026 antara lain cabai rawit, telur ayam ras, bawang putih, cabai merah, dan sawi hijau. Hal ini seiring dengan hasil panen komoditas

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Agustus 2026, Data Sangat Sementara

lokal hortikultura dari daerah sekitar Kab. TTS seperti Belu dan TTU yang lebih baik pada triwulan II 2026 sehingga pasokan komoditas di Kab. TTS turut meningkat.

2.3.5. Kabupaten Ngada

Pada triwulan II 2026, Kab. Ngada tercatat mengalami inflasi sebesar 3,07% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,51% (yoy). Laju inflasi utamanya didorong oleh tingkat inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah. Berdasarkan komoditasnya, komoditas yang utamanya mendorong laju inflasi di Kab. Ngada antara lain beras, tomat, besi beton, ikan tembang, dan minyak goreng. Peningkatan permintaan pada momen HBKN sepanjang triwulan II 2026 mendorong peningkatan harga pada beberapa komoditas bahan pangan utama seperti beras dan minyak goreng. Sementara itu, peningkatan harga besi beton di Ngada sejalan dengan kenaikan harga baja tulangan secara nasional, dengan tekanan yang lebih kuat akibat penyesuaian harga pada tingkat distributor serta tambahan biaya distribusi menuju pasar lokal. Sementara itu, komoditas yang menjadi penahan laju inflasi pada triwulan II 2026 antara lain adalah tarif angkutan udara, pisang, cabai merah, sabun detergen bubuk, dan pepaya.

2.4. TRACKING INFLASI TRIWULAN III 2026

Pada bulan Agustus 2026, Provinsi NTT mengalami Inflasi IHK sebesar 2,49% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 3,56% (yoy). Tingkat inflasi Provinsi NTT pada triwulan III berjalan berada pada titik tengah sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada Agustus 2026 antara lain adalah emas perhiasan, pelumas/oli mesin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan ikan tongkol. Inflasi pada komoditas emas perhiasan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya meskipun masih menjadi penyumbang utama inflasi pada Agustus 2026. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas tarif angkutan udara dimana hal ini terpengaruh oleh penurunan rata-rata harga avtur semenja bulan Juni hingga Agustus yang membantu menurunkan tarif fuel surcharge setelah penetapan keputusan menteri terbaru. Sementara itu, pada komoditas pelumas/oli mesin terjadi kenaikan tingkat inflasi dipengaruhi berlanjutnya tekanan transmisi penyesuaian harga produsen sejak Juni 2026,

seiring meningkatnya biaya bahan baku *base oil* dan logistik akibat tingginya harga minyak mentah. Komoditas yang menjadi penahan laju inflasi pada bulan Agustus 2026 antara lain bawang merah, sekolah menengah atas, tomat, daging ayam ras dan telur ayam ras.

Prakiraan inflasi Provinsi NTT pada triwulan III 2026 berada pada kisaran batas atas sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Risiko *imported inflation* kembali menguat seiring dengan re-eskalasi konflik geopolitik pada awal triwulan III 2026, sehingga dinamika harga komoditas global kembali tinggi pada triwulan III 2026 setelah sempat mereda pada akhir triwulan II 2026. Sementara itu, dampak bencana gempa sebesar M7,7 yang terjadi di utara Pulau Flores pada 15 Agustus 2026, dapat memicu peningkatan inflasi di daerah terdampak bencana. Dalam jangka pendek komoditas pangan berisiko meningkat seiring dengan kebutuhan tanggap darurat bencana kepada masyarakat terdampak menggunakan pasokan tidak hanya dari daerah terdampak tetapi juga dari seluruh NTT. Selain itu, aktivitas perdagangan juga sempat mengalami penghentian pasca gempa seiring dengan gempa susulan yang juga masih terjadi di sekitar daerah awal terjadinya gempa. Sementara itu, pada jangka panjang, peningkatan harga pada komoditas bahan bangunan dapat terjadi seiring dengan upaya rekonstruksi pasca bencana seiring dengan permintaan bahan bangunan yang tinggi untuk rekonstruksi.

2.5. AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI OLEH TPID

Dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi dan implementasi program-program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Upaya-upaya yang dilakukan TPID antara lain sebagai berikut:

- a. Keterjangkauan Harga
 - Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di pasar Oebobo, Kota Kupang pada 27 Juli 2026 dalam rangka GPIPS Balinusra 2026.
 - Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh TPID se-Provinsi NTT dalam rangka combo festive season sepanjang triwulan II 2026, bekerja sama dengan pelaku usaha dan

pemangku kepentingan terkait di masing-masing daerah.

- Pelaksanaan sidak gudang pasokan dan pasar untuk menjaga jumlah pasokan mencukupi di daerah dan keberlakuan harga sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

b. Ketersediaan Pasokan

- Dukungan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani di Provinsi NTT dalam rangka penguatan produktivitas pertanian untuk mencapai ketahanan pangan.
- Studi banding penerapan *good agricultural practices* (GAP) kepada petani bawang dan cabai di Jawa Tengah dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian di Provinsi NTT
- Pemantauan pasokan LPG dan BBM oleh TPID bersama dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan pasokan pada triwulan II 2026.
- Diversifikasi pangan melalui Festival Pangan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat

c. Kelancaran Distribusi

- Kunjungan pembelajaran digitalisasi pangan melalui platform Dipanen.id di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta antara TPID Provinsi NTT dan TPID Provinsi DI Yogyakarta.

- Dukungan percepatan penyaluran bantuan pangan ke daerah-daerah sulit terjangkau bekerja sama dengan TNI/Polri dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Komunikasi Efektif

- Rapat Koordinasi Wilayah TPIP-TPID se-Balinusra pada 27 Juli 2026, dalam rangka penguatan program pengendalian inflasi wilayah Balinusra untuk mencapai tingkat inflasi pada sasarannya.
- Studi banding TPID Provinsi NTT ke TPID Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penguatan program pengendalian inflasi, dikarenakan kesamaan karakteristik geografis dan tata letak serta pola inflasi.
- *High Level Meeting* (HLM) TPID Wilayah Flores Bagian Timur yang meliputi Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata di Maumere, Kabupaten Sikka
- HLM TPID Wilayah Flores Bagian Tengah meliputi Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo.





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB III

Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Secara umum, stabilitas sistem keuangan Provinsi NTT pada triwulan II 2026 tetap terjaga, dengan rasio NPL (*gross*) sebesar 3,63% yang masih berada di bawah ambang batas 5%. Intermediasi perbankan meningkat sejalan dengan menguatnya pertumbuhan penyaluran kredit Bank Konvensional dan Bank Syariah dibandingkan triwulan sebelumnya. Disisi lain, pertumbuhan DPK tetap kuat namun melambat didorong oleh melemahnya pertumbuhan deposito dan giro. Meski demikian LDR meningkat menjadi 116,90%, mencerminkan fungsi intermediasi yang tetap terjaga ditengah adanya perlambatan DPK.

3.1. KONDISI UMUM

3.1.1. Kinerja Perbankan

Pada triwulan II 2026, kinerja perbankan di Provinsi NTT menunjukkan peningkatan. Total penyaluran kredit perbankan berdasarkan lokasi bank di Provinsi NTT mengalami pertumbuhan sebesar 3,35% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,71% (yoy) (Tabel 3.1). Berdasarkan kegiatan operasional, penyaluran kredit Bank Umum Konvensional menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada di level 2,53% (yoy) (Grafik 3.1). Sementara itu, penyaluran kredit Bank Syariah tetap tumbuh kuat sebesar 24,68% (yoy) pada triwulan II 2026, melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada level 26,87% (yoy) (Grafik 3.2). Tumbuhnya penyaluran kredit Bank Konvensional dan Syariah menunjukkan kinerja intermediasi perbankan di Provinsi NTT yang tetap kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT.

3.1.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

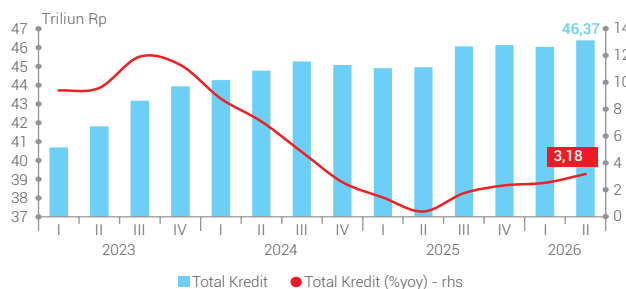
Pada triwulan II 2026, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 10,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,00% (yoy). Pertumbuhan DPK terutama bersumber dari tabungan yang mengalami

pertumbuhan 11,77% (yoy, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,20% (yoy). Selain itu, kinerja pertumbuhan deposito juga masih menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,77% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 35,50% (yoy). Di sisi lain, giro mengalami kontraksi sebesar 8,71% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh sebesar 20,27% (yoy). Peningkatan kinerja tabungan didukung dengan penurunan indeks pengeluaran untuk konsumsi barang-barang tahan lama berdasarkan hasil survei konsumen Bank Indonesia yang tercatat sebesar 94,00, setelah pada triwulan sebelumnya menunjukkan indeks sebesar 121,33. Hasil indeks di bawah 100 menunjukkan resiliensi untuk konsumsi dalam jumlah besar dan kecenderungan menyimpan lebih tinggi. Sementara itu, penurunan giro salah satunya diperkirakan dipengaruhi oleh penurunan giro pemerintah, sejalan dengan menyempitnya ruang fiskal pemerintah daerah akibat berkurangnya alokasi TKDD.

3.1.3. Loan-to-Deposit Ratio dan Non-Performing Loan

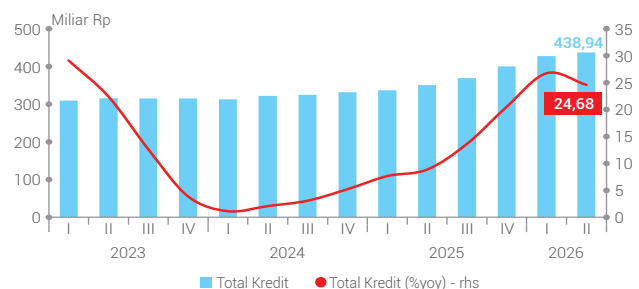
Fungsi intermediasi perbankan tetap terpantau tinggi dengan risiko perbankan yang secara umum tetap terjaga. Masih relatif tingginya intermediasi perbankan dapat diamati melalui rasio *loan to deposit* (LDR) sebesar 116,90% (Grafik

Grafik 3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Konvensional



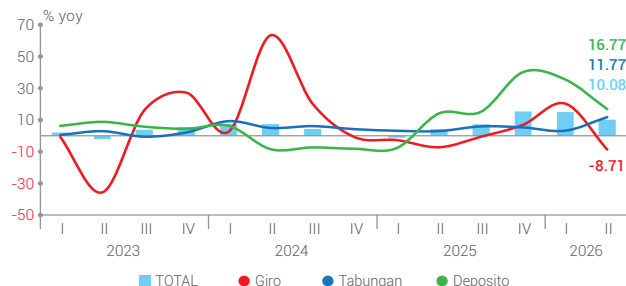
Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.2. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Syariah



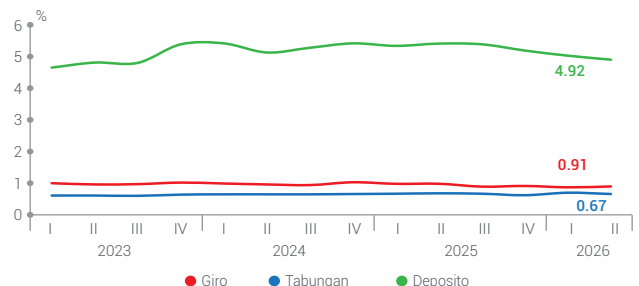
Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.3. Pertumbuhan DPK dan Komponennya



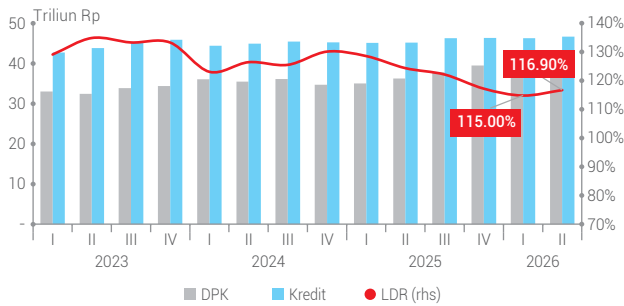
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4. Suku Bunga Tertimbang berdasarkan Simpanan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.5. Perkembangan LDR Bank Umum



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

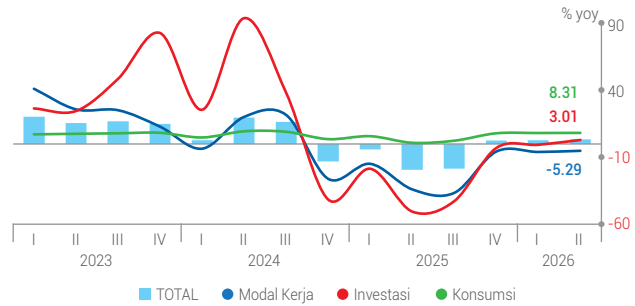
3.5), meskipun lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 115,00%. Peningkatan kinerja LDR ini disebabkan oleh peningkatan kinerja penyaluran kredit sementara penghimpunan DPK tertahan pada triwulan II 2026. Pada triwulan II 2026, rasio *non-performing loan* (NPL) (*gross*) tercatat pada angka 3,63%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada level 3,72% dan menunjukkan risiko perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL (*gross*) masih berada di bawah *threshold* 5%.

3.1.4. Penyaluran Kredit (Lokasi Bank)

Pada triwulan II 2026, penyaluran kredit tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,35% (yoy), meningkat apabila dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,71% (yoy), dengan rasio *Credit to GRDP*¹ Provinsi NTT sebesar 113,80%. Peningkatan kinerja

1. *Credit to GRDP* = Kredit / Gross Regional Domestic Product atau Produk Domestik Regional Bruto

Grafik 3.6. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

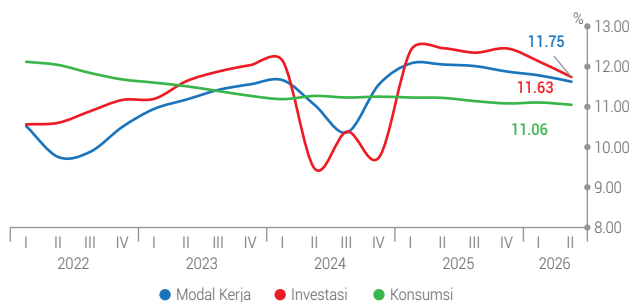
penyaluran kredit terutama bersumber dari peningkatan kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 8,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 8,22% (yoy). Selain itu, kinerja kredit investasi juga turut mengalami perbaikan kinerja pada triwulan II 2026 yang tumbuh sebesar 3,01% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,62% (yoy). Sementara itu, kinerja kredit modal kerja masih melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Kinerja kredit modal kerja pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -5,29% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -6,16% (yoy) (Grafik 3.6). Lebih lanjut, suku bunga tertimbang kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi tetap stabil pada masing-masing level 12,14%, 11,79% dan 11,12% (Grafik 3.7).

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi NTT berdasarkan Lokasi Bank

Indikator	Nominal (Miliar Rp)										Pertumbuhan (% yoy)					
	2024				2025				2026		2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II	III	IV	I	II
Aset	55.770	55.211	56.205	56.092	55.490	56.174	57.937	60.848	60.827	60.060	(0,50)	1,74	3,08	8,48	9,62	6,92
DPK	35.517	34.918	35.388	34.396	35.126	36.375	37.940	39.622	40.395	40.043	(1,10)	4,17	7,21	15,19	15,00	10,08
Giro	5.439	6.080	6.652	4.347	5.288	5.636	6.609	4.646	6.360	5.145	(2,78)	(7,29)	(0,66)	6,88	20,27	(8,71)
Tabungan	19.195	19.369	18.963	20.460	19.801	19.941	20.085	21.538	20.435	22.289	3,16	2,95	5,92	5,27	3,20	11,77
Deposito	10.883	9.469	9.772	9.589	10.037	10.798	11.246	13.438	13.600	12.609	(7,78)	14,03	15,08	40,15	35,50	16,77
Kredit	47.222	56.296	57.056	45.396	45.227	45.294	46.412	46.516	46.454	46.810	(4,22)	(19,54)	(18,65)	2,47	2,71	3,35
Modal Kerja	18.162	23.385	24.354	15.579	15.417	15.338	15.326	14.664	14.468	14.526	(15,11)	(34,41)	(37,07)	(5,87)	(6,16)	(5,29)
Investasi	3.828	6.215	5.257	3.175	3.113	3.045	2.988	3.078	3.093	3.137	(18,70)	(51,00)	(43,15)	(3,05)	(0,62)	3,01
Konsumsi	25.232	26.696	27.446	26.642	26.698	26.911	28.098	28.774	28.893	29.146	5,81	0,80	2,38	8,00	8,22	8,31
% LDR	132,96	161,22	161,23	131,98	128,76	124,52	122,33	117,40	115,00	116,90						
% NPL (Gross)	2,03	2,81	3,21	3,16	3,59	3,81	3,92	3,51	3,72	3,63						

Sumber: LBUT Bank Indonesia (lokasi bank), diolah

Grafik 3.7. Suku Bunga Tertimbang Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

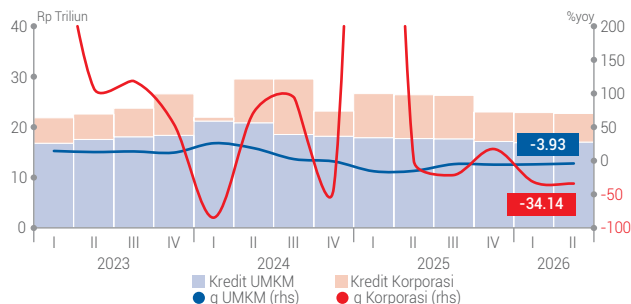


Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Berdasarkan kategori usaha, kredit produktif (modal kerja dan investasi) di Provinsi NTT didominasi oleh penyaluran pada kategori Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Total penyaluran kredit berdasarkan kategori usaha produktif di Provinsi NTT masih melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026 tercatat penyaluran kredit mengalami kontraksi 13,88% (yoy), sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,06%. Kontraksi utamanya disebabkan oleh penyaluran kredit korporasi yang terkontraksi 34,14% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 31,99% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kinerja penyaluran kredit UMKM mengalami perbaikan, dengan kontraksi yang lebih rendah menjadi 3,93% (yoy) dari 5,28% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.8).

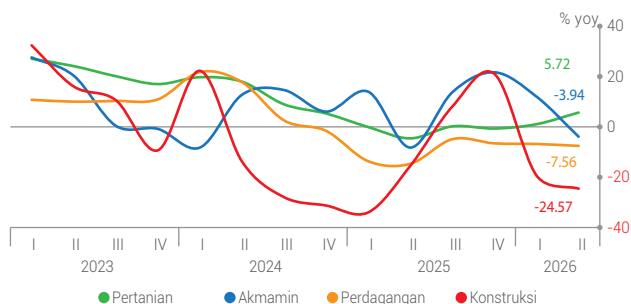
Berdasarkan sektoral, kredit produktif di Provinsi NTT didominasi oleh sektor Perdagangan, pertumbuhan kredit pada sektor utama dalam hal ini perdagangan, akumamin dan konstruksi masih mengalami kontraksi pertumbuhan. Kredit di sektor perdagangan tercatat terkontraksi sebesar 7,56% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,81% (yoy). Selain itu, kinerja

Grafik 3.8. Perkembangan Kredit Produktif Berdasarkan Kategori Usaha



Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.9. Pertumbuhan Kredit Usaha Produktif di Beberapa Sektor Ekonomi

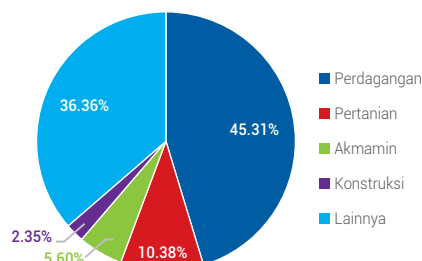


Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

pada kredit konstruksi juga turut mengalami penurunan hingga mencapai level kontraksi sebesar 24,57% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya juga turut terkontraksi sebesar 19,36% (yoy). Hal yang sama juga terjadi pada kredit akumamin setelah mencatatkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 3,94% (yoy) pada triwulan II 2026. Di sisi lain, kredit sektor Pertanian masih menunjukan pertumbuhan yang kuat pada triwulan II 2026, dengan pertumbuhan sebesar 5,72% (yoy) (Grafik 3.10). Dari sisi pangsa, kredit sektor perdagangan, pertanian, akumamin, dan konstruksi masing-masing memiliki pangsa sebesar 45,31%, 10,38%, 5,60%, dan 2,35% dari total kredit produktif.

Risiko kredit usaha produktif membaik pada triwulan II 2026. Hal tersebut tercermin dari Rasio *Loan at Risk* (LaR)² kredit usaha produktif pada triwulan II 2026 sebesar 14,39%, membaik dari triwulan sebelumnya sebesar 14,63%. Peningkatan Penurunan risiko tersebut utamanya terjadi pada kredit modal kerja menjadi sebesar 15,3202% pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1415,5532% (Grafik 3.11). Secara sektoral, kenaikan penurunan LaR terutama

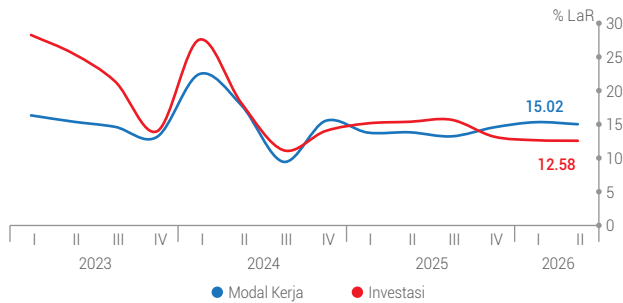
Grafik 3.10. Distribusi Sektoral Kredit Usaha Produktif Prov. NTT



Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

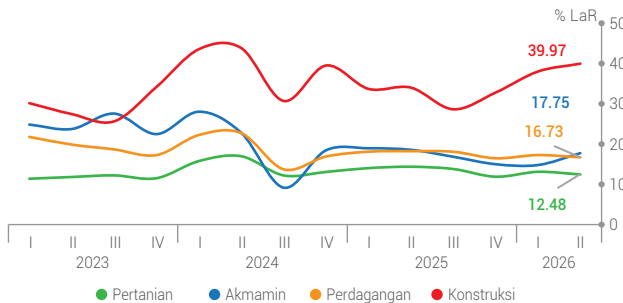
2. $LaR = \frac{[(\text{Restrukturisasi Kol. 1} + \text{Kol. 2} + \text{Kol. 3} + \text{Kol. 4} + \text{Kol. 5}) / \text{Total Kredit}] \times 100\%}{}$

Grafik 3.11. Kredit Usaha Berisiko



Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.12. Kredit Usaha Berisiko (Loan at Risk) di Beberapa Sektor Ekonomi Prov. NTT



Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

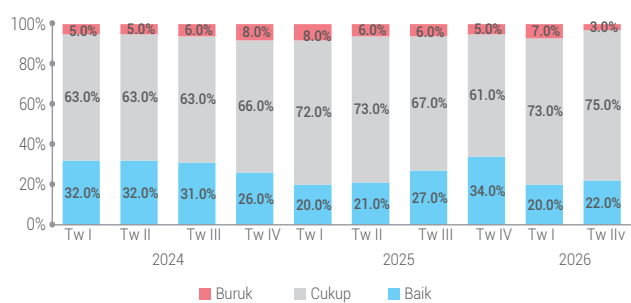
terjadi pada sektor konstruksi pertanian yang mengalami penurunannya menjadi sebesar 38,0212,48% pada triwulan II, lebih tinggi rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 32,7913,14% (Grafik 3.12).

3.2. KINERJA KORPORASI NON-UMKM

3.2.1. Kondisi dan Prospek Usaha

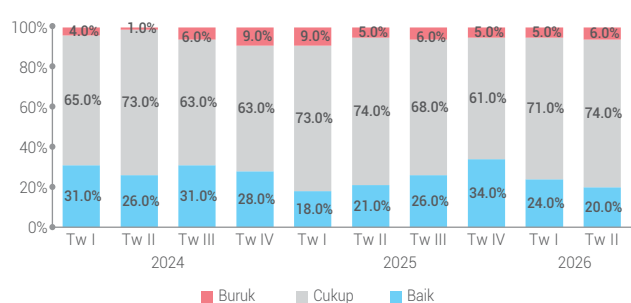
Kinerja korporasi (non-UMKM) pada triwulan II 2026 terjaga baik. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia di Provinsi NTT. Dari segi profitabilitas, sebanyak 22,00% dari perusahaan responden menyatakan mengalami kondisi profitabilitas yang baik (Grafik 3.13), diikuti dengan 75,00% responden menyatakan kondisi profitabilitas dalam kondisi cukup. Dari sisi likuiditas, 20,00% dari responden menyatakan mengalami kondisi likuiditas yang baik, diikuti dengan 74,00% responden menyatakan bahwa kondisi likuiditas dalam keadaan cukup (Grafik 3.14).

Grafik 3.13. Kondisi Profitabilitas Korporasi



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah

Grafik 3.14. Kondisi Likuiditas Korporasi

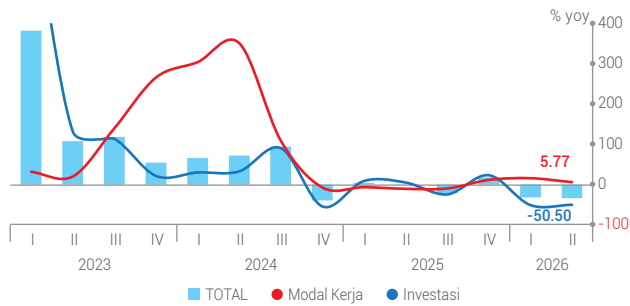


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah

3.2.2. Penyaluran Kredit Korporasi

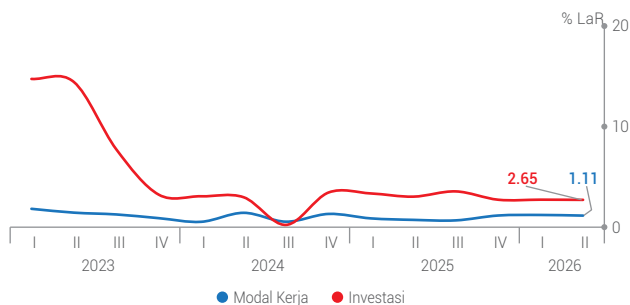
Kinerja kredit korporasi (non-UMKM) pada triwulan II 2026 berkontraksi sebesar 34,14% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 31,99% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.15). Kontraksi kinerja kredit korporasi utamanya disebabkan oleh berkontraksinya kinerja pertumbuhan pada kredit modal kerja di triwulan II 2026 yang sebesar -50,50% (yoy), meskipun mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga turut berkontraksi sebesar 51,17% (yoy). Sementara itu, kredit investasi tumbuh sebesar 5,77% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 15,80% (yoy) dan menjadi penahan kinerja kredit korporasi (Grafik 3.15). Tingkat NPL pada kredit ini masih terjaga yang sebesar 0,53% (gross), menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,59% (gross). Hal ini sejalan dengan kinerja korporasi yang secara umum tetap solid di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta didukung oleh penyaluran kredit yang tetap prudent sehingga kualitas

Grafik 3.15. Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.16. Kredit Berisiko (Loan at Risk) Korporasi



Sumber: LBUT Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

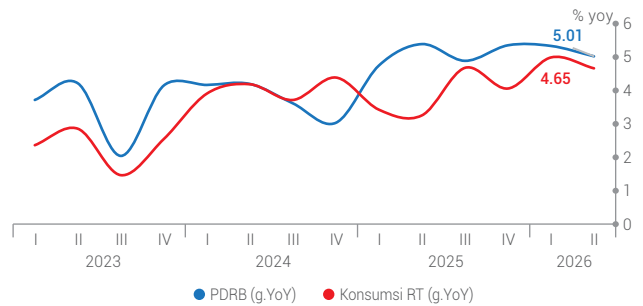
portofolio kredit korporasi relatif terjaga. Sementara itu berdasarkan jeninya, risiko kredit investasi korporasi memiliki LaR sebesar 2,65%, sementara kredit modal kerja korporasi mencatat angka LaR sebesar 1,11% (Grafik 3.16). Tingkat NPL dan LaR yang terjaga ini seiring dengan pengelolaan risiko debitur yang lebih terstruktur serta asesmen dan pemantauan bank yang lebih intensif.

3.3. KINERJA RUMAH TANGGA

3.3.1. Kondisi Rumah Tangga

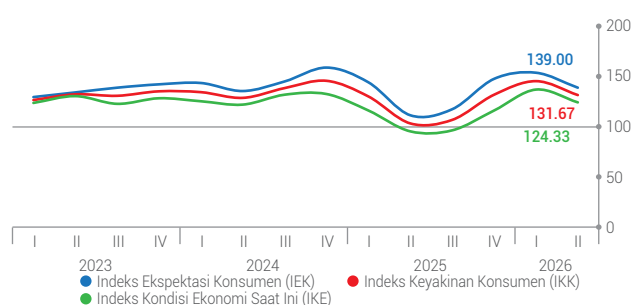
Kinerja keuangan rumah tangga pada triwulan II 2026 tercatat mengalami perlambatan. PDRB Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,98% (yoy) (Grafik 3.17). Terjadi penurunan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masing-masing dari 145,5; 137,11; dan 153,89 menjadi sebesar 131,67; 124,33 dan 139,00. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kondisi perekonomian secara umum akan melambat (Grafik 3.18).

Grafik 3.17. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.18. Perkembangan Indeks Konsumen

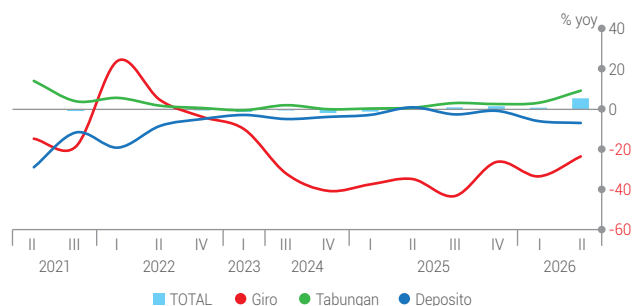


Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

3.3.2. Penghimpunan DPK Rumah Tangga

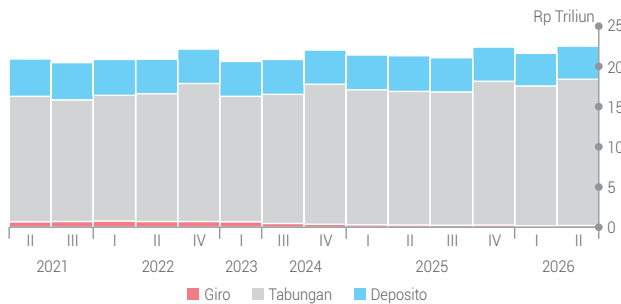
DPK rumah tangga pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,97% (yoy). Hal ini menandakan preferensi konsumsi masyarakat yang sedang rendah pada triwulan II 2026. Pertumbuhan pada DPK RT utamanya didorong oleh pertumbuhan tabungan RT sebesar 9,42% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh sebesar 3,33% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan deposito dan giro tercatat

Grafik 3.19. Pertumbuhan DPK Rumah Tangga



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.20. Preferensi Jenis Simpanan Nasabah Rumah Tangga



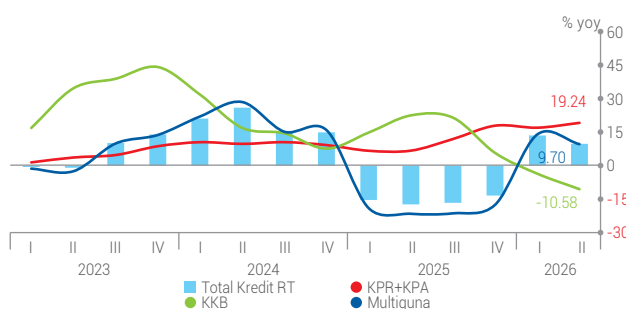
Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

masih melanjutkan tren kontraksi dari triwulan sebelumnya. Deposito dan giro mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar -6,70% (yoy) dan -23,43% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 3.19). Berdasarkan pangsaanya, preferensi jenis simpanan nasabah rumah tangga di Provinsi NTT terbesar adalah pada tabungan sebesar 80,68%, diikuti oleh deposito sebesar 18,33% dan giro sebesar 0,99% (Grafik 3.20).

3.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga

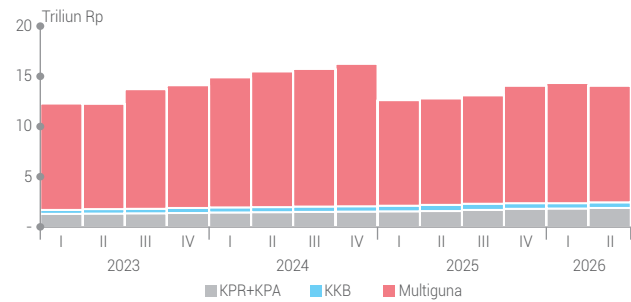
Penyaluran kredit rumah tangga pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 9,91% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,65% (yoy). Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung perlambatan pada kinerja PDRB konsumsi RT yang melambat pada triwulan II 2026. Perlambatan penyaluran kredit rumah tangga utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multi guna, di tengah tetap tumbuh kuatnya penyaluran kredit perumahan rakyat (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) di Provinsi NTT. Kinerja kredit multiguna dan KPR+KPA tercatat

Grafik 3.21. Kinerja Penyaluran Kredit Rumah Tangga



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.22. Pangsa Penyaluran Kredit Rumah Tangga



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

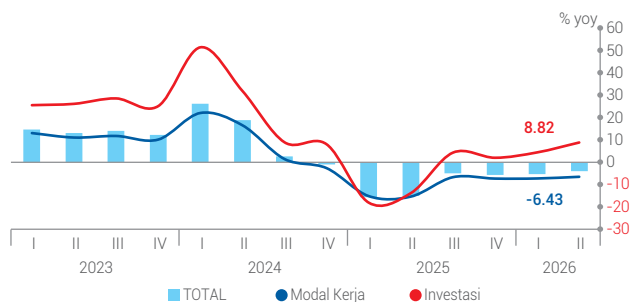
tumbuh masing-masing sebesar 9,70% (yoy) dan 19,24% (yoy) sementara itu kinerja KKB mengalami kontraksi sebesar 10,58% (yoy) melanjutkan tren kontraksi dari triwulan sebelumnya (Grafik 3.21). Berdasarkan pangsaanya, penyaluran kredit didominasi oleh kredit multiguna yang sebesar 82,51%, diikuti oleh KPR+KPA sebesar 13,55% dan KKB sebesar 3,94% (Grafik 3.22).

3.4. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

3.4.1. Penyaluran Kredit UMKM

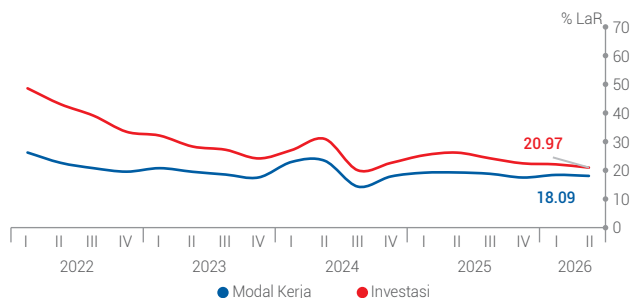
Kredit UMKM pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,93% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,28% (yoy). Hal ini disebabkan oleh kinerja kredit investasi UMKM yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 8,82% (yoy), pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,40% (yoy). Sementara itu, kinerja kredit modal kerja masih mengalami kontraksi sebesar 6,43% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,18% (yoy) (Grafik 3.23). Risiko kredit UMKM mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya baik pada kredit modal kerja maupun kredit investasi. Terjadi pertumbuhan pada kinerja kredit usaha menengah yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,60% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,06% (yoy). Sementara itu, kinerja kredit usaha mikro dan kecil masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,86% (yoy) dan -12,09% (yoy) (Grafik 3.26).

Grafik 3.23. Pertumbuhan Kredit UMKM Prov. NTT



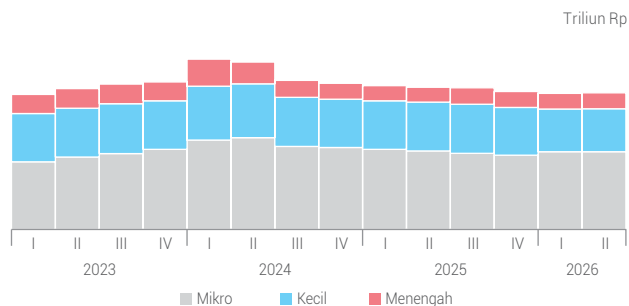
Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.24. Risiko Kredit UMKM (*Loan at Risk*) Prov. NTT



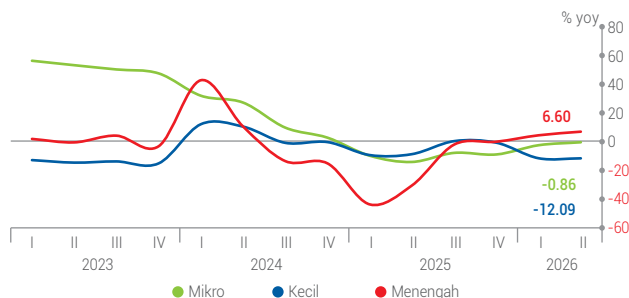
Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.25. Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Prov. NTT



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Grafik 3.26. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Prov. NTT



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

Boks 2

Potensi Komoditas Pendorong Ekonomi Provinsi NTT

Perekonomian Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik yang potensial pada sektor berbasis sumber daya alam. Terdapat sejumlah komoditas yang selama ini relatif belum mendapat perhatian, tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. **Biji kelor, lontar, kesambi-kutu lak, sabut kelapa, serta kemiri merupakan komoditas-komoditas yang tersedia dan melimpah di NTT serta memiliki peluang untuk membentuk rantai nilai baru melalui pengolahan, diversifikasi produk, dan perluasan pasar.** Sebagian komoditas telah mulai memasuki tahap hilirisasi dan pasar ekspor, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap pengembangan teknologi dan pemetaan potensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk menghubungkan basis produksi masyarakat dengan industri pengolahan dan pasar bernilai tambah yang lebih tinggi.

Biji kelor merupakan salah satu komoditas yang memiliki prospek kuat. Berbeda dengan pemanfaatan kelor yang selama ini lebih banyak berfokus pada daun sebagai bahan pangan, biji kelor memiliki kandungan minyak sekitar 35–40 persen dengan kandungan asam oleat yang tinggi, sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku kosmetik, pemurnian air, maupun bahan baku biodiesel. Potensi produksi minyak dari satu hektare tanaman kelor berada pada kisaran 4,41–108,71 liter per tahun. Potensi tersebut semakin relevan karena produksi kelor NTT pada 2024 tercatat sebesar 6.231,5 ton, atau mencapai 167,82 persen dari target produksi sebesar 3.713,15 ton (Kemendagri PPID). Dengan demikian,

peluang kelor NTT tidak lagi terbatas pada penjualan bahan mentah, tetapi dapat diarahkan menuju pangan fungsional, kosmetik, minyak biji, dan berbagai produk berbasis bahan aktif, dengan biji kelor sebagai salah satu ruang hilirisasi yang masih relatif terbuka.

Selain itu, NTT memiliki sekitar 5 juta pohon lontar yang tersebar di 22 kabupaten/kota, dengan sekitar 80 persen di antaranya telah berusia lebih dari 10 tahun (SMESCO Indonesia). Keunggulan lontar terletak pada banyaknya bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan, sehingga membentuk peluang rantai nilai yang relatif panjang. Nira dapat diolah menjadi gula air, gula semut, gula lempeng dan minuman, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi bioetanol dan biogas; buah dapat diolah menjadi produk pangan seperti *palm spread* dan toffee; sedangkan daun dan pelepah dapat dimanfaatkan menjadi serat serta berbagai produk kerajinan. Peluang tersebut telah diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi nyata. Pada Juni 2024, Kementerian Koperasi dan UKM melalui SMESCO Indonesia bersama Du Anyam menyusun peta jalan ekonomi lontar berkelanjutan bagi pelaku UMKM di NTT. Inisiatif tersebut diarahkan untuk memetakan tata kelola lontar sebagai komoditas dan sumber ekonomi rakyat yang strategis, sekaligus mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistemnya. SMESCO Indonesia dan Du Anyam menyebut terdapat lebih dari 15 produk turunan lontar yang memiliki nilai ekonomi, sementara Du Anyam telah memberdayakan ekonomi lokal dengan mempekerjakan lebih dari 1.600 penganyam perempuan.

Gambar Boks 2.1. Komoditas Potensial Pendorong Ekonomi NTT (Biji Kelor Dan Pohon Lontar)



Sabut kelapa memiliki karakteristik seperti elastisitas tinggi, ketahanan terhadap air asin, serta kemampuan untuk dimanfaatkan sebagai bahan absorben dan bahan bakar padat. Sabut juga dapat dipisahkan menjadi cocofiber dan cocopeat/coir pith, sehingga membuka peluang pengembangan berbagai produk bernilai tambah. Potensi bahan baku kelapa di NTT juga cukup besar. BPS mencatat produksi kelapa NTT pada 2024 sebesar 64.155 ton, dengan wilayah Flores menyumbang sekitar 60,19 persen dari total produksi provinsi. Penelitian oleh Politeknik Negeri Kupang dalam *Jurnal Mekanik Terapan* pada 2025 menguji serat sabut kelapa sebagai bahan penguat roda gigi komposit. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi sabut kelapa tidak hanya berhenti pada produk sederhana seperti keset, tali, atau bahan bakar, tetapi dapat diarahkan menuju material komposit dan kebutuhan industri.

NTT memiliki basis produksi sekaligus pemanfaatan hilirisasi Kemiri. Kabupaten Sikka, mencatat produksi kemiri sebesar 25.923 ton pada 2023, setelah berada pada kisaran 25–26 ribu ton per tahun selama 2019–2023. Potensi kemiri semakin menarik karena terdapat contoh hilirisasi yang telah berlangsung di Kabupaten Alor. Pada 2025, pelaku usaha dari Desa Fanating mengolah kemiri menjadi minyak kemiri murni dan kemiri bakar. Pada sisi lain, penelitian di Hutan Kemasyarakatan Hoder Ruha Nukak, Kabupaten Sikka, menunjukkan bahwa kemiri menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan masyarakat, dengan petani dilaporkan menghasilkan sekitar 500–2.000 kg kemiri per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiri memiliki peluang untuk dikembangkan dari komoditas primer menuju produk bernilai tambah, terutama minyak kemiri dan produk perawatan tubuh, sementara bagian lain seperti cangkang juga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau produk turunan lainnya.

Berbeda dengan kelor, lontar dan kelapa yang mulai memiliki ekosistem hilirisasi, kesambi dan kutu lak merupakan potensi yang masih lebih banyak berada pada tahap pengembangan. **Pohon kesambi merupakan salah satu inang utama kutu lak, sedangkan kutu lak menghasilkan resin alami yang memiliki karakteristik mampu membentuk lapisan tipis, mengilap, relatif tahan air, dan tidak mudah teroksidasi. Resin tersebut dapat dikembangkan menjadi bahan pelapis, pelitur furnitur, cat, maupun produk industri lainnya.** Potensi kesambi tidak berhenti pada hubungan dengan kutu lak. Penelitian Politani Kupang pada Desember 2024 menguji ranting kesambi sebagai bahan baku briket, dengan tujuan memanfaatkan biomassa lokal sebagai bahan bakar alternatif sekaligus mengurangi limbah organik. Selain itu, dari sisi kutu lak, NTT pernah menghasilkan rata-rata sekitar 3.000 ton lak per tahun pada 2005, tetapi budidaya kutu lak kemudian mengalami persoalan serangan hama dan penyakit yang juga menyerang pohon inangnya. Pengembangan kembali komoditas ini membutuhkan pembaruan data, pemulihan populasi inang, teknologi budidaya, dan penguatan pasar.

Kelima komoditas tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan: potensi ekonominya akan jauh lebih besar jika dilakukan pengolahan dan pengembangan lanjutan. Kelor memiliki peluang menuju pangan fungsional, kosmetik, dan minyak biji; lontar memiliki rantai nilai dari nira, buah, daun, hingga serat dan kerajinan; kesambi dapat dikembangkan untuk bioenergi dan mendukung pengembangan kembali kutu lak; sabut kelapa dapat ditransformasikan dari residu menjadi serat, bahan bakar, hingga material komposit; sementara kemiri memiliki peluang pengembangan minyak dan produk perawatan tubuh.

Gambar Boks 2.2. Komoditas Potensial Pendorong Ekonomi NTT (kesambi-kutu lak, sabut kelapa, kemiri)



Pengembangan kelima komoditas tersebut perlu diikuti dengan penguatan intervensi pemerintah dan pemangku kepentingan agar potensi bahan baku berkembang menjadi rantai nilai yang menghasilkan nilai tambah di daerah. Pada komoditas kelor, pengembangan budidaya dan pengolahan perlu diperkuat melalui standardisasi bahan baku, teknologi pengolahan dan inovasi (khususnya biji kelor), sertifikasi, pengemasan, dan perluasan akses pasar. Pada komoditas lontar, penguatan ekosistem UMKM perlu diarahkan pada keberlanjutan bahan baku, inkubasi usaha, pembiayaan, serta perluasan pasar. Sementara itu, sabut kelapa dan kemiri memerlukan dukungan teknologi pengolahan, penguatan kemitraan dengan industri pengguna, serta pembiayaan investasi untuk peralatan hilirisasi. Untuk kesambi-kutu lak, intervensi perlu difokuskan pada pemutakhiran data potensi, pemulihan tanaman inang, penguatan teknologi budidaya, dan pengembangan pasar sebelum diarahkan pada ekspansi hilirisasi.

Penguatan tersebut dapat disinergikan dengan program pengembangan UMKM Bank Indonesia yang mencakup peningkatan kapasitas usaha, pengembangan UMKM berpotensi ekspor, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, dan pihak lain yang berkepentingan perlu menyusun peta intervensi per komoditas yang menghubungkan bahan baku – pengolahan – standardisasi–pembiayaan–offtaker–pemasaran, sehingga dukungan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat NTT.





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kondisi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah di Provinsi NTT dapat dilihat dari indikator sistem pembayaran nontunai dan tunai. Indikator sistem pembayaran nontunai di Provinsi NTT, yang ditunjukkan melalui transaksi BI-RTGS dan SKNBI, mengalami tren peningkatan pada triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026. Sementara itu, indikator sistem pembayaran tunai mengalami *net outflow* sebesar Rp0,67 triliun pada triwulan II 2026 atau berbanding terbalik dibandingkan triwulan II 2025 yang mengalami *net inflow* sebesar Rp1,23 triliun.

4.1. KONDISI UMUM

Kinerja sistem pembayaran di Provinsi NTT masih mengalami tren pertumbuhan pada triwulan II 2026. Nominal transaksi BI-RTGS dan SKNBI pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 109,80% (yoy) dan 10,90% (yoy) yang sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah di Provinsi NTT. Dari sisi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), nominal transaksi kartu ATM/debet dan kartu kredit tumbuh masing-masing sebesar 26,87% (yoy) dan 21,09% (yoy). Perkembangan QRIS juga menunjukkan tren positif di sisi *merchant* maupun *user*, yang masing-masing tumbuh sebesar 20,73% (yoy) dan 20,38% (yoy).

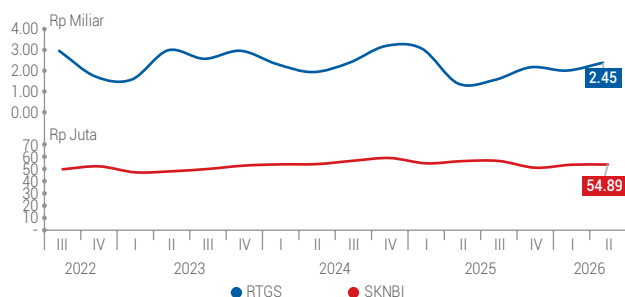
Indikator pada transaksi tunai, yaitu aliran kas perbankan tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp0,67 triliun pada triwulan II 2026. Hal tersebut dikarenakan *inflow* triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp0,72 triliun, atau mengalami kontraksi sebesar 38,10% (yoy), sementara *outflow* tercatat sebesar Rp1,38 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 24,47% (yoy). Angka *net outflow* pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan oleh masyarakat dan pemerintah dalam rangka pembangunan koperasi merah putih dan penyaluran bantuan sosial, selain itu peningkatan kebutuhan uang dalam rangka memasuki liburan sekolah pada tengah tahun yang mendorong aktivitas penarikan kas kepada perbankan.

4.2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI

4.2.1. Gambaran Umum Sistem Pembayaran Nontunai

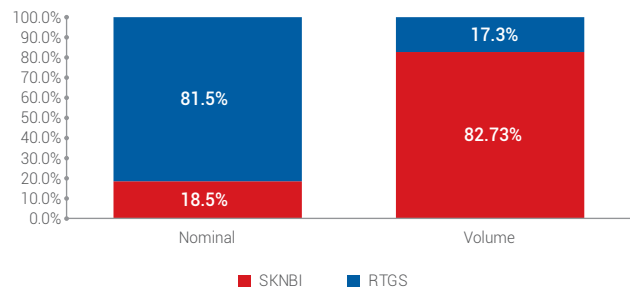
Sistem pembayaran nontunai dapat dibagi menjadi pembayaran nilai besar dan pembayaran ritel. Pembayaran nilai besar dapat dilakukan melalui sistem *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) yang مخصوص untuk pembayaran dengan nominal lebih dari Rp100 juta per transaksi.

Grafik 4.1. Rata-rata Nilai Per Transaksi SKNBI dan RTGS



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.2. Perbandingan Transaksi RTGS dan SKNBI



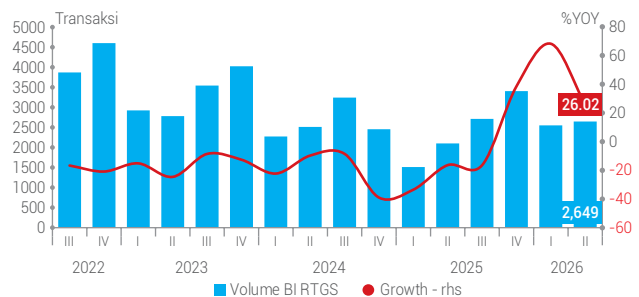
Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu, pembayaran ritel di Indonesia dapat dilakukan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dengan maksimal nominal transaksi mencapai Rp1 miliar dan juga melalui BI-FAST dengan maksimal nominal transaksi mencapai Rp250 juta per transaksi. Dengan demikian, karakteristik transaksi pada BI-RTGS yaitu nominal besar dan volume yang rendah. Sementara karakteristik dari SKNBI dan BI Fast adalah kebalikannya, nominal kecil dan volume yang tinggi. Secara nominal 81,5% transaksi di Provinsi NTT menggunakan BI-RTGS sedangkan berdasarkan volume sebanyak 82,73% transaksi menggunakan SKNBI (Grafik 4.2). Hal tersebut terlihat dari rata-rata transaksi BI-RTGS yang sebesar Rp2,45 miliar per transaksi dan SKNBI yang hanya sebesar Rp54,89 juta per lembar warkat.

4.2.2. Transaksi Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

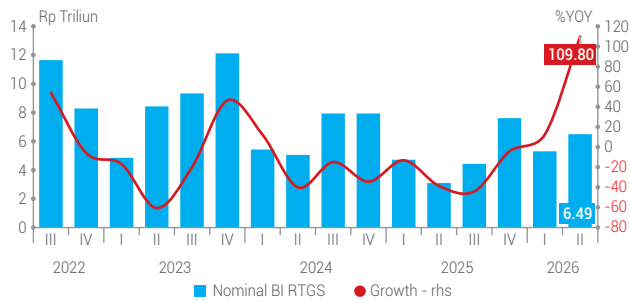
Transaksi nontunai nilai besar melalui BI-RTGS di Provinsi NTT mengalami peningkatan kinerja pada triwulan II 2026. Hal ini tercermin dari nominal transaksi BI-RTGS sebesar Rp6,49 triliun atau tumbuh sebesar 109,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,48% (yoy) atau sebesar Rp5,30 triliun (Grafik 4.4). Berdasarkan volume, terdapat 2.649 transaksi BI-RTGS di triwulan II 2026 atau tumbuh sebesar 26,02% (yoy),

Grafik 4.3. Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.4. Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS



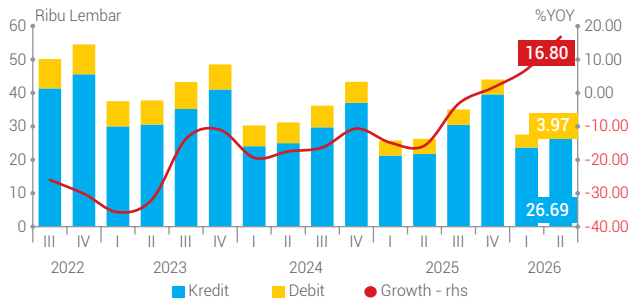
Sumber: Bank Indonesia

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 68,47% (yoy) atau sebesar 2.549 transaksi (Grafik 4.3). Hal ini sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah daerah di Provinsi NTT.

4.2.3. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

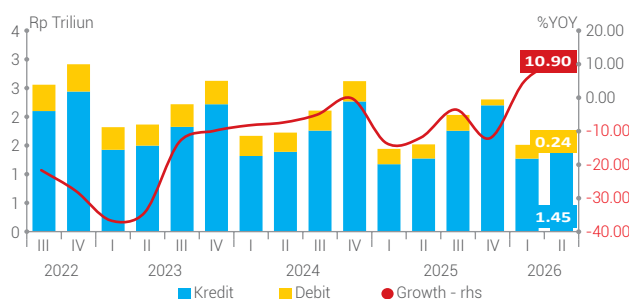
Pada triwulan II 2026, terjadi peningkatan kinerja transaksi kliring yang tercermin pada nominal dan frekuensi transaksi kliring di Provinsi NTT. Secara nominal, transaksi pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp1,68 triliun atau tumbuh sebesar 10,90% (yoy) (Grafik 4.6),

Grafik 4.5 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI



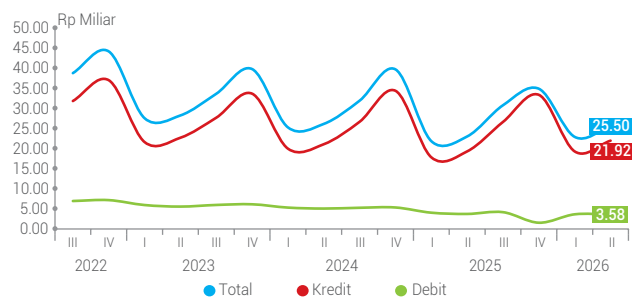
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.6 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI



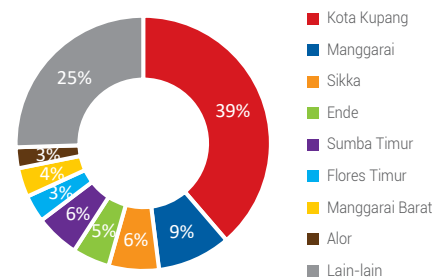
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.7 Perputaran Kliring Harian



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.8 Persebaran Spasial Transaksi SKNBI



Sumber: Bank Indonesia

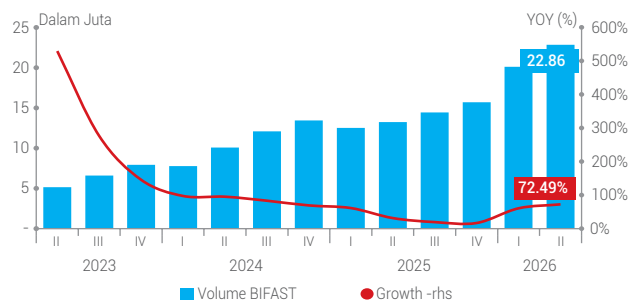
lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,86% (yoy) atau sebesar Rp1,51 triliun. Sedangkan secara volume, transaksi kliring pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan sebesar 30,66 ribu lembar atau tumbuh sebesar 16,80% (yoy) (Grafik 4.5), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,05% (yoy) atau sebesar 27,56 ribu lembar. Meskipun terjadi peningkatan pada nominal dan volume SKNBI, preferensi masyarakat mulai bergeser dari SKNBI menuju BI-FAST yang didukung oleh modernisasi transaksi nontunai ritel yang memberikan layanan 24/7 serta mempunyai biaya transaksi yang lebih kecil.

Transaksi kliring di Provinsi NTT pada triwulan II 2026 didominasi oleh transaksi kliring kredit yang tercatat sebesar 85,97%. Rata-rata perputaran harian transaksi kliring kredit adalah sebesar Rp21,92 miliar (Grafik 4.7), sementara rata-rata transaksi kliring debit sebesar Rp3,58 miliar. Secara spasial, 38,7% dari jumlah transaksi kliring di Provinsi NTT terjadi di Kota Kupang.

4.2.4. Transaksi BI-FAST

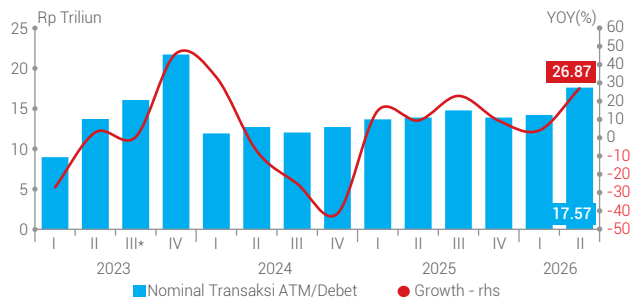
Transaksi BI-FAST di Provinsi NTT, baik nominal maupun volume, mengalami peningkatan pertumbuhan pada

Grafik 4.9 Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST



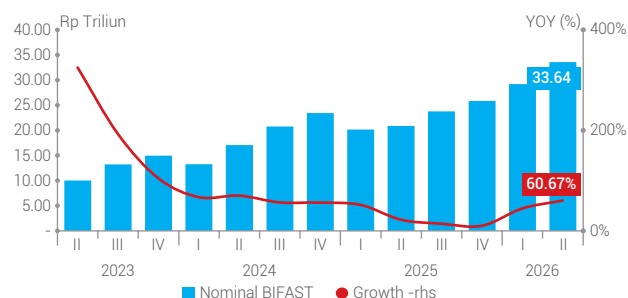
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.11 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/debet



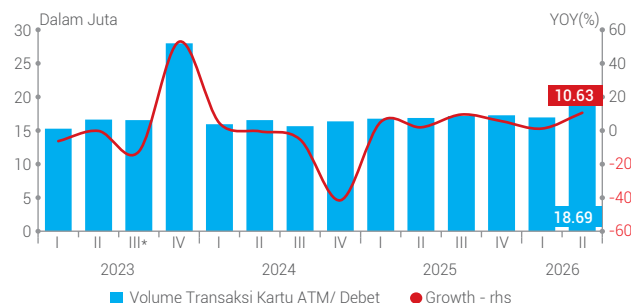
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.10 Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.12 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/debet



Sumber: Bank Indonesia

triwulan II 2026. Secara nominal, transaksi BI-FAST tercatat sebesar Rp33,64 triliun atau tumbuh sebesar 60,67% (yoy) (Grafik4.10), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 44,80% (yoy) atau sebesar Rp29,29 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, volume transaksi BI-FAST pada triwulan II 2026 mencapai 22,86 juta transaksi atau tumbuh sebesar 72,49% (yoy) (Grafik 4.9), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 60,70% (yoy) atau sebesar 20,14 juta transaksi.

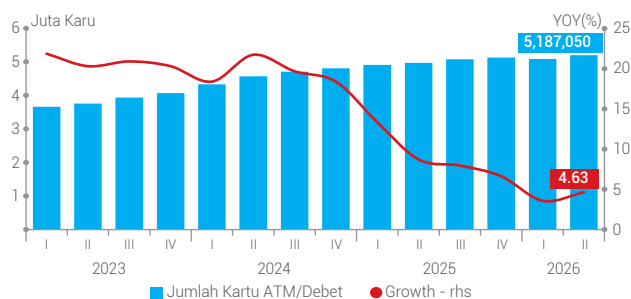
4.3. PERKEMBANGAN INSTRUMEN PEMBAYARAN NONTUNAI

4.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

4.3.1.1. Perkembangan Kartu ATM/Debet

Transaksi kartu ATM/debet mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan II 2026. Secara nominal, transaksi kartu ATM/debet tercatat sebesar Rp17,57 triliun pada triwulan II 2026 atau tumbuh sebesar 26,87% (yoy) (Grafik 4.11), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,87% (yoy) atau sebesar Rp14,16 triliun. Sementara itu, volume transaksi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 18,69 juta transaksi atau tumbuh 10,63% (yoy) (Grafik 4.12), menguat dibandingkan triwulan

Grafik 4.13 Perkembangan Jumlah Kartu ATM/Debet



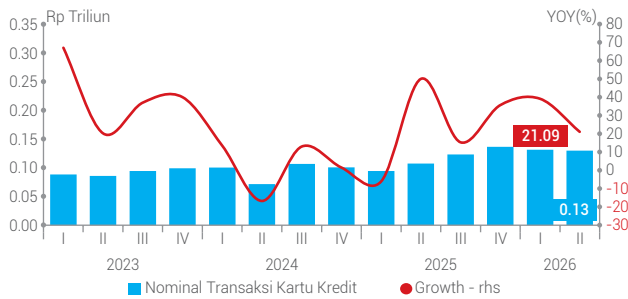
Sumber: Bank Indonesia

sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,20% (yoy) atau sebesar 16,97 juta transaksi. Adapun jumlah kartu ATM di Provinsi NTT tercatat sebanyak 5,19 juta kartu atau tumbuh 4,63% (yoy) (Grafik 4.13), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,58% (yoy) atau 5,07 juta kartu. Pertumbuhan ini sejalan dengan pertumbuhan positif LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan II 2026.

4.3.1.2. Perkembangan Kartu Kredit

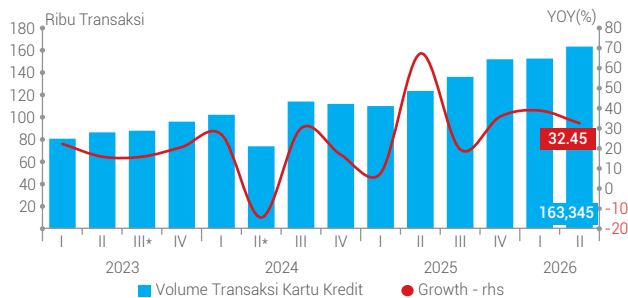
Pada triwulan II 2026, transaksi kartu kredit di Provinsi NTT pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan I 2026. Dilihat dari perkembangan nominal, transaksi kartu kredit

Grafik 4.14 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit



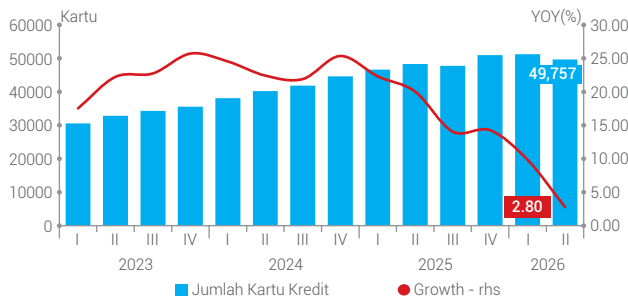
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.15 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.16 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia

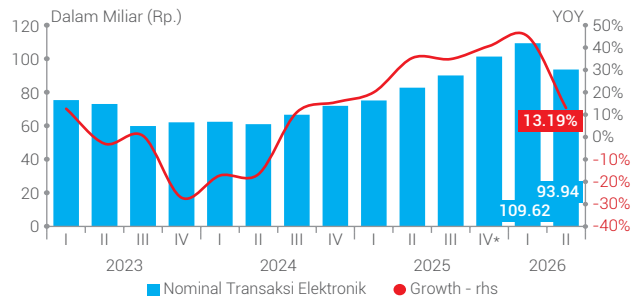
tercatat sebesar Rp0,13 triliun pada triwulan II 2026 atau tumbuh 21,09% (yoy) (Grafik 4.14), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 39,20% (yoy) atau sebesar Rp0,13 triliun. Sementara itu, volume transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 tercatat sebanyak 163,34 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 32,45% (yoy) (Grafik 4.15), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 38,82% (yoy) atau sebesar 152,52 ribu transaksi. Berdasarkan jumlah kartu kredit yang beredar, pada triwulan II 2026 terdapat 49,75 ribu kartu kredit atau

tumbuh sebesar 2,80% (yoy) (Grafik 4.16), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,87% (yoy) atau sebanyak 51,34 ribu kartu kredit. Peningkatan pada transaksi kartu kredit di triwulan II 2026 ini juga sejalan dengan meningkatnya nilai kredit konsumsi pada triwulan II 2026.

4.3.2. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik di Provinsi NTT

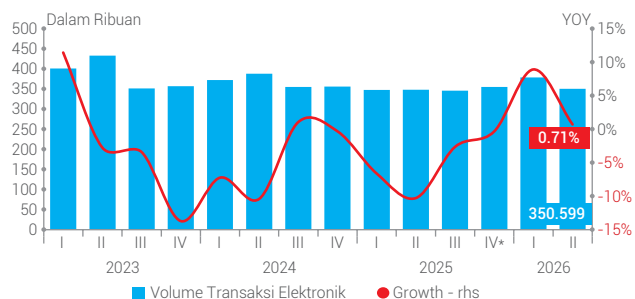
Transaksi uang elektronik pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi uang elektronik pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp93,94 miliar atau tumbuh sebesar 13,19% (yoy) (Grafik 4.17), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 45,41% (yoy) atau sebesar Rp109,62 miliar. Jumlah transaksi uang elektronik tercatat sebesar 350,59 ribu transaksi pada triwulan II 2026 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,71% (yoy) (Grafik 4.18), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,93% (yoy) atau sebesar 378,64 ribu transaksi.

Grafik 4.17 Perkembangan Nominal Transaksi Elektronik

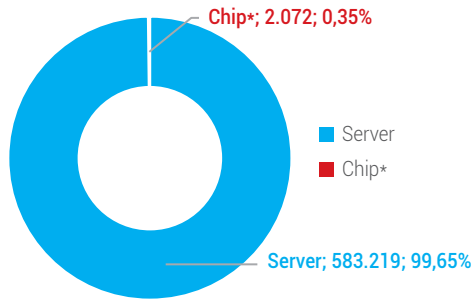


Sumber: Bank Indonesia

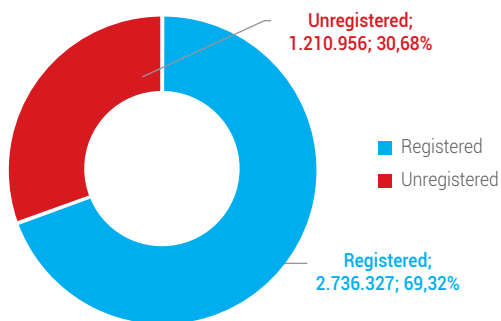
Grafik 4.18 Perkembangan Volume Transaksi Elektronik



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.19 Pangsa Uang Elektronik *Chip-based* dan *Server-based*

* Data Desember 2022

Grafik 4.20 Pangsa Uang Elektronik *Registered* vs *Unregistered*

Sumber: Bank Indonesia

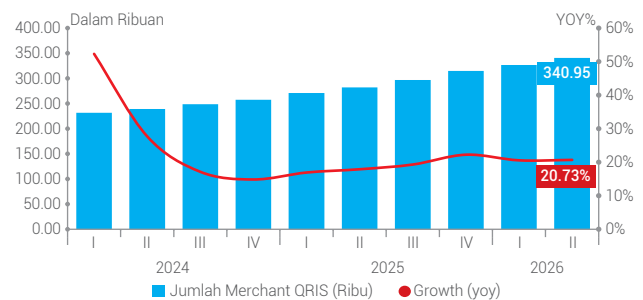
Berdasarkan pencatatan identitas pengguna, uang elektronik di Provinsi NTT didominasi oleh uang elektronik *registered* dengan pangsa 69,32% dari total uang elektronik, atau tercatat sebanyak 2.736.327 akun. Sementara itu, berdasarkan media penyimpanan tercatat sebanyak 99,65% didominasi oleh uang elektronik server-based atau sebanyak 583.219 akun (Grafik 4.19).

4.3.3. Perkembangan QRIS

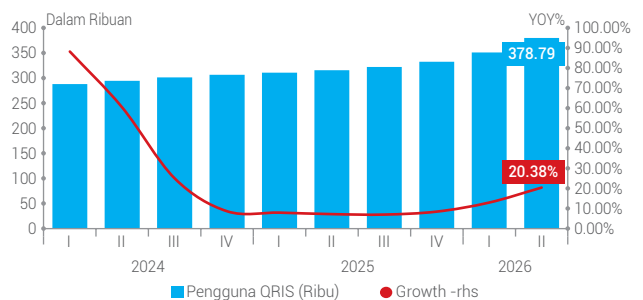
Dalam upaya mendukung elektronifikasi sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan perluasan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di masyarakat, baik dari sisi *supply* (jumlah *merchant* yang menggunakan QRIS) maupun dari sisi *demand* (kesadaran masyarakat bertransaksi secara nontunai melalui QRIS). Pada triwulan II 2026, tercatat sebanyak 340,95 ribu *merchant* di Provinsi NTT sudah menggunakan QRIS sebagai alternatif transaksi (Grafik 4.21). Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 20,73% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,60% (yoy) atau sebesar 326,88 ribu *merchant*. Jumlah *merchant* QRIS yang tetap bertumbuh ini merupakan hasil sinergi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

melalui program QRIS Taputar di mana PJP diperlombakan secara bulanan untuk mendorong keaktifan *merchant* untuk memfasilitasi transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Selain itu, Bank maupun Lembaga Selain Bank terus didorong mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai model bisnis menggunakan QRIS sehingga meningkatkan minat dari *merchant*.

Sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia, perluasan akseptasi dan implementasi QRIS diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital masyarakat di Provinsi NTT. Pada triwulan II 2026, jumlah pengguna QRIS di Provinsi NTT mencapai 378,79 ribu pengguna atau meningkat 20,38% (yoy) (Grafik 4.22), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,94% (yoy) atau sebanyak 350,06 ribu masyarakat. Selain dari sisi *supply*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga mendorong sisi *demand* QRIS melalui sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengguna baru QRIS dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah ataupun instansi lainnya. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sebagai hasil kolaborasi adalah Gerakan Pasar Murah, Festival Fulan Fehan, Gerakan KKN LLDIKTI XV,

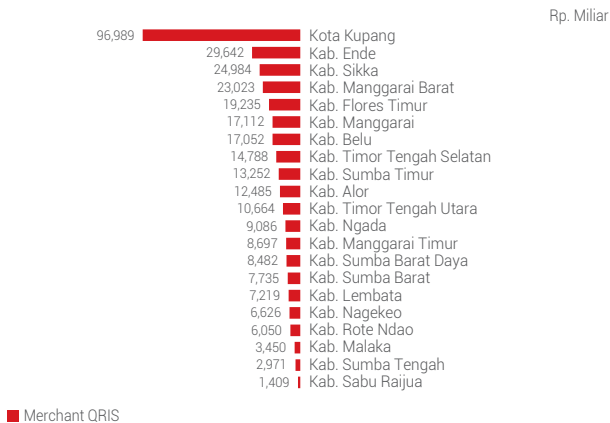
Grafik 4.21 Perkembangan Jumlah *Merchant* QRIS

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.22 Perkembangan Jumlah *User* QRIS

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.23 Distribusi Spasial QRIS di Provinsi NTT



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu terdapat kegiatan mingguan seperti QRIS Taputar CFD dan QRIS *Experience* dengan menggunakan promo penggunaan QRIS Rp1 untuk menarik minat masyarakat dalam praktik langsung menggunakan QRIS dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi NTT.

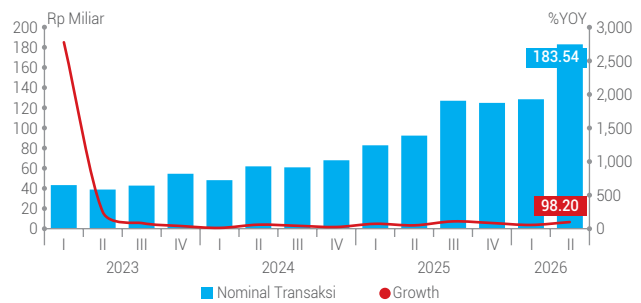
Secara spasial, jumlah merchant QRIS terbanyak terdapat di Kota Kupang. Berdasarkan jumlah merchant, Kabupaten/Kota dengan merchant QRIS terbanyak setelah Kota Kupang dengan 96,98 ribu merchant terdapat di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka dengan jumlah merchant secara berturut-turut sebesar 29,64 ribu dan 24,98 ribu merchant (Grafik 4.23).

4.3.4. Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) masih mengalami tren pertumbuhan pada triwulan II 2026. Pada triwulan II 2026, tercatat transaksi KUPVA BB sebesar Rp183,54 miliar atau tumbuh sebesar 98,20% (yoy) (Grafik 4.24), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 55,11% (yoy) atau sebesar Rp128,76 miliar. Hal tersebut didorong oleh aktivitas lintas batas dengan Timor Leste dan juga kunjungan wisatawan mancanegara di triwulan II 2026 pada acara-acara yang ada di Indonesia seperti Exotic Tenun yang diadakan di Kabupaten Belu pada bulan Juni sehingga transaksi KUPVA BB terus mengalami pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

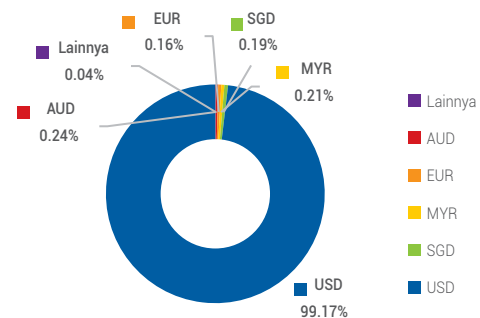
Berdasarkan valuta asing yang diperdagangkan pada Provinsi NTT, sebanyak 99,17% transaksi di KUPVA BB dilakukan dengan USD (Grafik 4.25). Mata uang lainnya yang diperdagangkan adalah AUD 0,24% transaksi, MYR

Grafik 4.24 Perkembangan Nominal Transaksi KUPVA BB



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.25 Pangsa Transaksi Valuta Asing di KUPVA BB



Sumber: Bank Indonesia

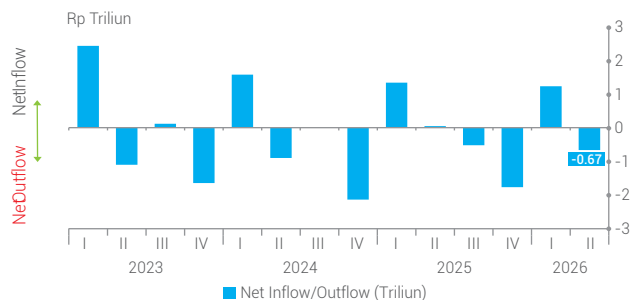
sebanyak 0,21% transaksi, SGD sebanyak 0,19% transaksi, EUR sebanyak 0,16% transaksi, dan lain-lain. Dalam rangka mengupayakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT mengoptimalkan pengawasan KUPVA BB di Provinsi NTT dengan senantiasa melakukan asesmen risiko KUPVA BB. Selain itu telah dilakukan sosialisasi-sosialisasi terkait kewajiban penggunaan rupiah dan pentingnya melakukan transaksi penukaran mata uang asing di KUPVA BB yang sudah diberi izin oleh Bank Indonesia.

4.4. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

4.4.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

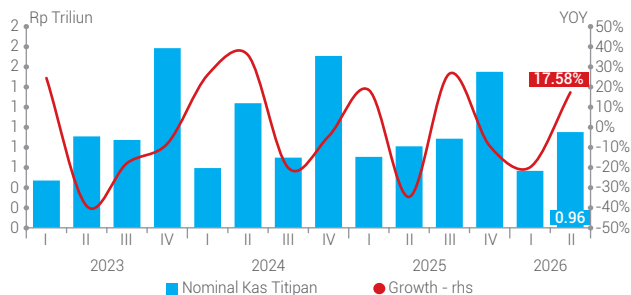
Pada triwulan II 2026, aliran uang kartal di Provinsi NTT mengalami net outflow sebesar Rp0,67 triliun (Grafik 4.26). Dibandingkan dengan pola historis tahunan, terdapat perbedaan dengan siklus ekonomi yang ada pada triwulan II 2025 yang merupakan net inflow. Pola net outflow menunjukkan bahwa aktivitas peredaran uang yang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (outflow) lebih tinggi dibandingkan aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia dari perbankan (inflow), hal ini terjadi dikarenakan pola

Grafik 4.26 Perkembangan Transaksi Tunai di Provinsi NTT



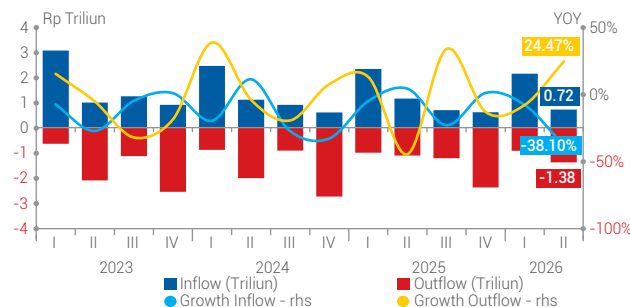
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.28 Perkembangan Layanan Penarikan (Outflow) di Kas Titipan



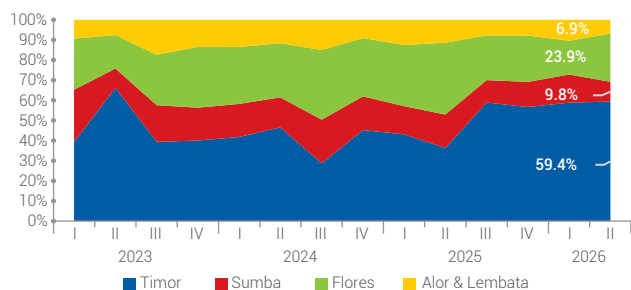
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.27 Perkembangan Inflow dan Outflow Transaksi Tunai Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.29 Rasio Outflow Berdasarkan Tempat Penarikan



Sumber: Bank Indonesia

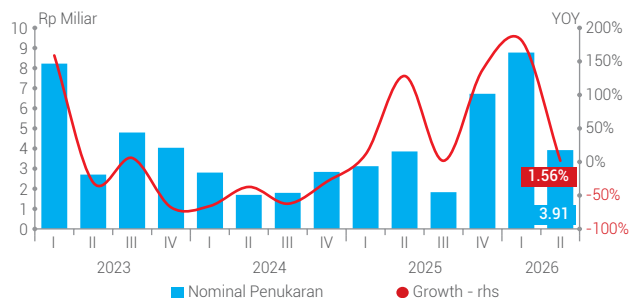
ekonomi yang berubah di mana pada triwulan II 2026 terdapat kebutuhan yang lebih tinggi yang digunakan untuk program Koperasi Desa Merah Putih dan penyaluran bantuan sosial di mana kedua hal tersebut menjadi salah satu pendorong roda perekonomian masyarakat provinsi NTT. Pada triwulan II 2026, *inflow* tercatat sebesar Rp0,72 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 38,10% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,06% (yoy) atau sebesar Rp2,15 triliun. Di sisi lain, *outflow* pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp1,38 triliun atau meningkat sebesar 24,47% (yoy), berbanding terbalik dengan triwulan I 2026 yang mengalami kontraksi sebesar 8,02% (yoy) atau sebesar Rp0,92 triliun (Grafik 4.27).

Dari sisi layanan kas titipan, terdapat penarikan sebesar Rp0,96 triliun atau meningkat sebesar 17,58% (yoy) (Grafik 4.28), berbanding terbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 19,78% (yoy) atau sebesar Rp0,57 triliun. Secara spasial, sebanyak 59,4% *outflow* terjadi di Pulau Timor melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan kas titipan Atambua. Pada posisi kedua adalah Pulau Flores dengan 23,9% dari total *outflow* (Grafik 4.29).

4.4.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas

Pada triwulan II 2026, layanan kas mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Layanan kas pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp3,91 miliar atau tumbuh sebesar 1,56% (yoy) (Grafik 4.30), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 181,21% (yoy) atau sebesar Rp8,77 miliar.

Grafik 4.30 Perkembangan Layanan Kas Bank Indonesia

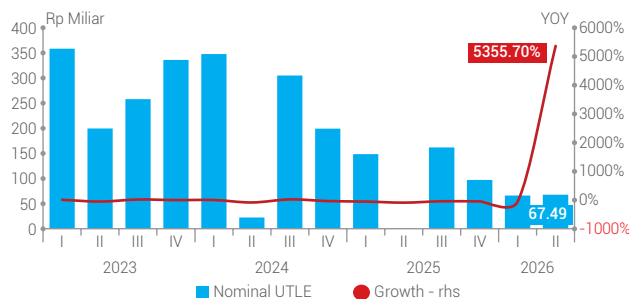


Sumber: Bank Indonesia

4.4.2.1. Perkembangan Penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) oleh Bank Indonesia

Pada triwulan II 2026, penarikan UTLE mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menyerap Rp67,49 juta UTLE atau tumbuh sebesar 5.355,70% (yoy) (Grafik 4.31), berbanding terbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 55,49% (yoy) atau sebesar Rp65,96 juta. Peningkatan penarikan UTLE merupakan dampak dari pengkinian kebijakan Bank Indonesia terkait penyetoran Uang Emisi Tahun 2022 yang sebelumnya dikategorikan sebagai ULE menjadi dikategorikan sebagai UTLE sehingga peningkatan terjadi atas penumpukan Uang Emisi Tahun 2022 yang sudah berubah kategori. Berdasarkan pecahan, mayoritas UTLE yang diterima Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT berdasarkan jumlah bilyet adalah pecahan Rp100.000 dengan total 43,86% dari seluruh bilyet UTLE yang diterima, dilanjutkan dengan Rp50.000 sebanyak 42,97% dan Rp20.000 sebanyak 5,39% dari seluruh bilyet UTLE yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas UTLE yang diterima merupakan Uang Pecahan Besar (UPB) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000.

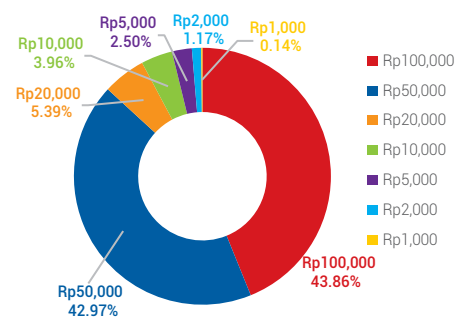
Grafik 4.31 Perkembangan Penarikan Uang Tidak Layak Edar oleh Bank Indonesia Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Sebagai upaya menjaga ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) di seluruh daerah di Provinsi NTT, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersinergi dengan perbankan untuk meningkatkan efektivitas layanan kas titipan Bank Indonesia. Untuk mendukung distribusi uang Rupiah yang layak edar di seluruh penjuru Provinsi NTT, Bank Indonesia bersinergi dengan perbankan untuk membuka 9 (sembilan) kas titipan di Provinsi NTT, yaitu di Atambua, Kalabahi, Labuan Bajo, Ende, Ruteng, Waikabubak, Maumere, Lewoleba, dan Waingapu. Saat ini, seluruh kas titipan tersebut turut mendukung dan melaksanakan program penyediaan uang yang layak edar kepada masyarakat atau *clean money policy*. Selain itu, kas titipan juga menyediakan jasa penukaran UTLE untuk meningkatkan kualitas uang yang beredar. Lebih lanjut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT turut gencar melaksanakan edukasi langsung ke masyarakat dengan *tagline* "Cinta, Bangga, Paham Rupiah" dengan program utama tahun 2026 dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 4.32 Perbandingan Setoran UTLE Per Pecahan



Sumber: Bank Indonesia





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB V

Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTT pada periode Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, meskipun tingkat partisipasi penduduk dalam pasar kerja mengalami sedikit pelemahan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi daerah masih menunjukkan kinerja yang kuat, hal ini tercermin dari kondisi pasar tenaga kerja yang secara umum tetap stabil. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja pada Mei 2026 tercatat sebanyak 3,19 juta orang, lebih tinggi dari Februari 2026 yang sebesar 3,18 juta orang. Di sisi lain, kondisi kesejahteraan di Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan, yang tercermin dari persentase kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 17,52% atau lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 18,6%. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT menunjukkan peningkatan, meski Rasio Gini pada Maret 2026 mengalami sedikit peningkatan. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan pada triwulan II 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

5.1. KONDISI UMUM

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTT pada periode Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, meskipun tingkat partisipasi penduduk dalam pasar kerja mengalami sedikit pelemahan. Di sisi lain, Aktivitas ekonomi daerah masih menunjukkan kinerja yang kuat, hal ini tercermin dari kondisi pasar tenaga kerja yang secara umum tetap stabil. Penduduk usia kerja di Provinsi NTT meningkat dari 4,13 juta orang pada Februari 2026 menjadi 4,15 juta orang pada Mei 2026. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya potensi pasokan tenaga kerja di Provinsi NTT. Sejalan dengan peningkatan tersebut, jumlah angkatan kerja juga meningkat dari 3,18 juta orang menjadi 3,19 juta orang. Namun demikian, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut belum diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.

Secara distribusi penduduk yang bekerja, masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 51,04 % dari total jumlah orang bekerja, LU Perdagangan sebesar 10,78%, dan Industri Pengolahan sebesar 9,08%. Lebih lanjut, secara status pekerjaan, jumlah pekerja dengan status informal masih mendominasi dibandingkan status formal. Tingginya pangsa informal ini sejalan dengan karakteristik pendidikan di NTT yang sebagian besar masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD).

Sementara itu, tingkat kesejahteraan di Provinsi NTT masih menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari menurunnya persentase kemiskinan dari 18,6% pada Maret 2025 menjadi 17,52% pada Maret 2026, kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 69,14 pada tahun 2024 menjadi 69,89 pada tahun 2025. Namun demikian, kondisi ketimpangan pendapatan yang digambarkan dengan *Rasio Gini* di Provinsi NTT mengalami peningkatan pada Maret 2026 menjadi 0,319 dari 0,315 pada Maret 2025, kondisi peningkatan ketimpangan ini

menggambarkan masih belum optimalnya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2026 sebesar 99,76, mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 100,77. Adapun berdasarkan sektor, yang mengalami peningkatan adalah sektor padi & palawija, dan perikanan, sedangkan sektor hortikultura, peternakan, dan perkebunan mengalami penurunan.

5.2. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTT pada Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dibandingkan dengan Februari 2026. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah penduduk usia kerja dari 4,13 juta orang pada Februari 2026 menjadi 4,15 juta orang pada Mei 2026. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah angkatan kerja juga meningkat dari 3,18 juta orang menjadi 3,19 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 0,17%, sedangkan jumlah pengangguran meningkat sebesar 3,41% dibandingkan dengan Februari 2026 (Tabel 5.1). Peningkatan pengangguran tersebut turut tercermin pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat dari 3,16% pada Februari 2026 menjadi 3,26% pada Mei 2026 (Grafik 5.1). Meskipun demikian, TPT Provinsi NTT pada Mei 2026 masih berada di bawah TPT nasional yang tercatat sebesar 4,65%. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di perkotaan tercatat sebesar 6,60%, lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan yang sebesar 1,71%, yang menunjukkan bahwa tekanan pengangguran relatif lebih tinggi di wilayah perkotaan.

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi NTT pada Mei 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2026. Berdasarkan hasil Survei Angkatan

Tabel 5.1. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi NTT

No	Lapangan Usaha	2025			2026	
		Feb	Agu	Nov	Feb	Mei
1.	Penduduk 15+ (Usia Kerja)	4,06	4,09	4,11	4,13	4,15
2.	Angkatan Kerja	3,08	3,09	3,11	3,18	3,19
	Bekerja	2,98	2,99	3,01	3,08	3,08
	Pengangguran	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.	Bukan Angkatan Kerja	0,98	1,00	1,00	0,95	0,96
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	75,81%	75,55%	75,65%	76,94%	76,81%
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (RHS) (%)	3,23%	3,31%	3,10%	3,16%	3,26%

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 5.2. Jumlah orang bekerja berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2024		2025			2026	
	Feb	Agu	Feb	Agu	Nov	Feb	Mei
Pertanian	1,49	1,51	1,58	1,31	1,33	1,57	1,57
Perdagangan	0,37	0,36	0,38	0,39	0,40	0,35	0,33
Industri Pengolahan	0,28	0,28	0,28	0,30	0,29	0,28	0,28
Jasa Pendidikan	0,20	0,20	0,21	0,21	0,23	0,21	0,21
Adm.Pemerintahan	0,17	0,16	0,15	0,19	0,18	0,16	0,15
Transportasi	0,13	0,13	0,12	0,14	0,12	0,13	0,15
Konstruksi	0,07	0,12	0,05	0,12	0,14	0,10	0,11
Lainnya	0,25	0,26	0,21	0,33	0,33	0,28	0,29
Total	2,96	3,02	2,98	2,99	3,01	3,08	3,08

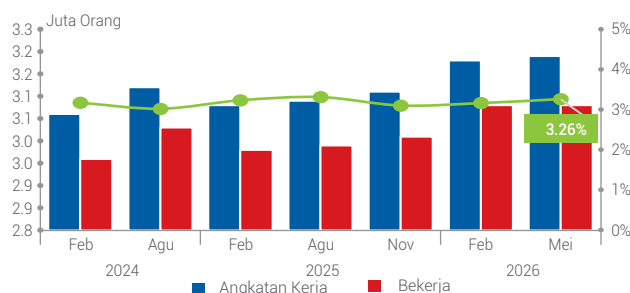
Sumber: BPS (diolah)

Kerja Nasional (Sakernas), jumlah penduduk usia kerja meningkat sebesar 0,02 juta orang, dari 4,13 juta orang pada Februari 2026 menjadi 4,15 juta orang pada Mei 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja yang berpotensi menambah ketersediaan tenaga kerja di Provinsi NTT. Sejalan dengan itu, jumlah angkatan kerja juga meningkat dari 3,18 juta orang menjadi 3,19 juta orang. Adapun, secara struktural, peningkatan jumlah tenaga kerja pada periode pelaporan terutama terserap pada LU transportasi sebesar 0,02 juta

orang, sedangkan LU yang mengalami penurunan jumlah orang bekerja terbesar terjadi pada LU perdagangan sebesar 0,02 juta orang (Tabel 5.2).

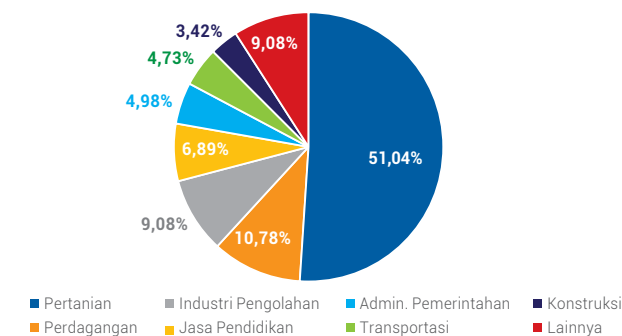
Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih mendominasi pangsa serapan tenaga kerja di Provinsi NTT. Pada Mei 2026, 3 (tiga) lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi NTT adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 51,04%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,78%, serta Industri Pengolahan sebesar 9,08% (Grafik 5.2). Kondisi tersebut masih sama dengan periode-periode sebelumnya dan sesuai dengan kontribusi 3 (tiga) sektor terhadap perekonomian Provinsi NTT. Lebih lanjut, berdasarkan data PDRB Provinsi NTT triwulan II 2026, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki pangsa sebesar 29,40%, kemudian LU Perdagangan sebesar 13,64%, dan LU Industri Pengolahan sebesar 1,50% terhadap perekonomian Provinsi NTT.

Grafik 5.1. Perkembangan Tenaga Kerja



Sumber: BPS (diolah)

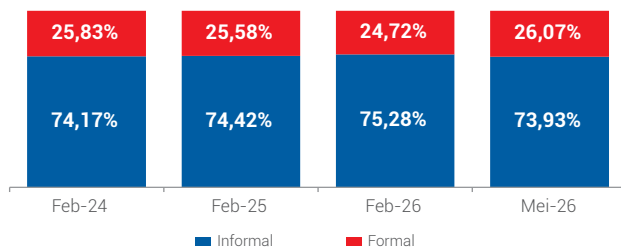
Grafik 5.2. Pangsa Lapangan Usaha Tenaga Kerja NTT Per Mei 2026



Sumber: BPS (diolah)

Lapangan kerja informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi NTT. Sebanyak 2,28 juta penduduk bekerja di sektor informal pada Mei 2026, atau tercatat sebesar 73,93% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT (Grafik 5.3). Pangsa pekerja di sektor informal tersebut mengalami penurunan dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 75,28%, sementara sektor formal mengalami peningkatan menjadi 26,07%. Banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor informal umumnya dikarenakan struktur perekonomian NTT yang didominasi oleh LU pertanian yang secara definitif adalah pekerjaan informal (tidak ada kontrak kerja, tidak ada jaminan sosial, tidak ada upah tetap) serta diperkuat dengan rendahnya kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang sebagian besar tenaga kerja di NTT memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah.

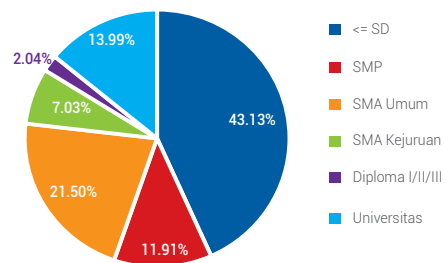
Grafik 5.3. Perkembangan Status Tenaga Kerja Provinsi NTT



Sumber: BPS, (diolah)

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pekerja di Provinsi NTT pada periode Mei 2026 merupakan lulusan SD ke bawah, yakni sebanyak 1,33 juta orang atau 43,13% dari total tenaga kerja (Grafik 5.4). Selanjutnya, pekerja berpendidikan SMA tercatat sebanyak 0,66 juta orang (21,50%), diikuti Diploma IV/S1/S2/S3 sebanyak 0,43 juta orang (13,99%), serta pekerja berpendidikan SMP sebanyak 0,37 juta orang (11,91%). Adapun pekerja lulusan SMK dan Diploma I/II/III masih relatif terbatas, masing-masing sebesar 0,22 juta orang (7,03%) dan 0,07 juta orang (2,43%). Struktur pendidikan tenaga kerja yang masih didominasi lulusan SD ke bawah dengan pangsa hampir separuh dari total angkatan kerja, sejalan dengan tingginya pangsa pekerja di sektor informal yang mencapai 73,93% pada periode yang sama. Rendahnya kualifikasi pendidikan menjadi salah satu faktor struktural yang membatasi akses pekerja NTT terhadap lapangan kerja formal yang mensyaratkan keterampilan dan kompetensi minimum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang

Grafik 5.4. Pangsa Pendidikan Terakhir Tenaga Kerja Per Mei 2026



Sumber: BPS, (diolah)

berfokus pada peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi agar tenaga kerja NTT memiliki daya saing yang lebih baik dalam mengakses peluang kerja formal dan meningkatkan produktivitas di sektor informal.

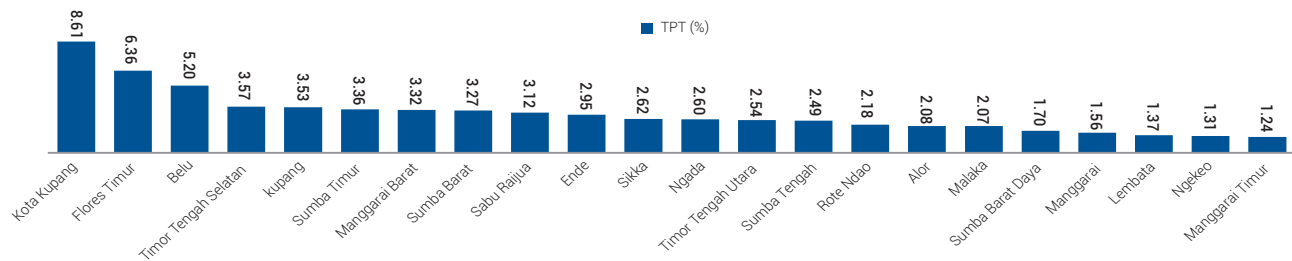
Dari sisi pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTT pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,26%, lebih tinggi dibandingkan Februari 2026 sebesar 3,16%. TPT laki-laki pada Mei 2026 sebesar 3,72%, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan sebesar 2,70%. Dibandingkan Februari 2026, TPT laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dengan masing-masing sebesar 0,15% poin dan 0,01% poin. Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,60%, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan sebesar 1,71%. Berdasarkan distribusi pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Mei 2026, TPT dari tamatan universitas, diploma dan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang tertinggi dibandingkan jenjang

Tabel 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik

Karakteristik Pengangguran	2024		2025			2026	
	Feb	Agu	Feb	Agu	Nov	Feb	Mei
TPT Nasional	4,82	4,91	4,76	4,85	4,74	4,68	4,65
TPT NTT	3,17	3,02	3,23	3,31	3,10	3,16	3,26
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal							
Perkotaan	6,38	5,99	7,77	5,26	6,44	7,84	6,60
Perdesaan	2,06	1,91	1,50	2,48	1,70	1,21	1,71
TPT Menurut Jenis Kelamin							
Laki-laki	3,62	2,91	3,68	3,21	3,00	3,57	3,72
Perempuan	2,65	3,16	2,71	3,43	3,21	2,69	2,70
TPT Menurut Tingkat Pendidikan							
<=SD	0,73	1,14	0,82	1,08	0,72	1,02	1,28
SMP	1,07	1,66	2,04	1,58	1,46	3,08	2,32
SMA	5,77	5,66	6,01	5,41	5,48	4,64	4,62
SMK	7,66	4,8	5,83	4,98	7,46	4,29	4,33
D1/2/3	0,53	3,2	6,22	5,03	3,51	7,66	5,86
D4/S1/S2/S3	7,47	5,31		6,09	4,4	6,22	6,75

Sumber: BPS (diolah)

Grafik 5.5. TPT Kabupaten/Kota 2025



Sumber: BPS (diolah)

pendidikan lainnya, masing-masing sebesar 6,75%, 5,86% dan 4,62%. Sementara itu, distribusi TPT yang terendah di Provinsi NTT berada pada pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,28%. Adapun kondisi TPT Provinsi NTT pada Mei 2026 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional sebesar 4,65% (Tabel 5.3).

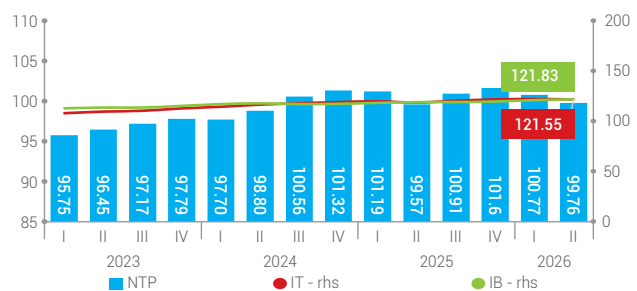
Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 8,61%. Hal tersebut sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai Ibu kota Provinsi NTT. TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Flores Timur sebesar 6,36%, sedangkan TPT terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,24% (Grafik 5.5). Pada tahun 2025, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi NTT mengalami penurunan TPT dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

5.3. PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN

Tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian di Provinsi NTT pada triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025, namun demikian mengalami tekanan secara kuartalan, hal ini tercermin dari penurunan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dari 100,77 pada triwulan I 2026 menjadi 99,76 pada triwulan II 2026. Dari sisi pembentuknya, Indeks yang Diterima Petani (It) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 121,55, meningkat dibandingkan 118,45 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Indeks yang Dibayar Petani (Ib) juga meningkat dari 118,96 menjadi 121,83. Peningkatan Ib yang lebih tinggi dibandingkan It secara kuartalan menunjukkan bahwa kenaikan harga yang harus dibayar petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi, memberikan tekanan terhadap daya beli petani, sehingga NTP kembali berada di bawah level 100. (Grafik 5.6).

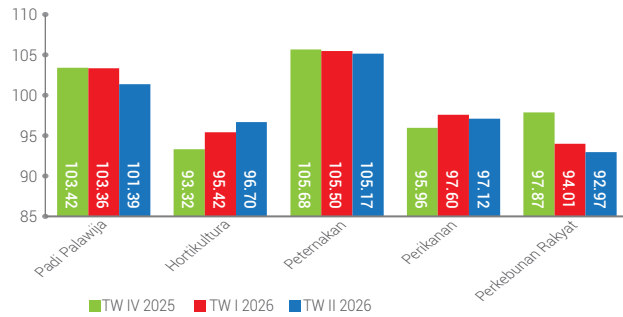
Berdasarkan subsektor, peningkatan terjadi pada padi & palawija dan perikanan, sedangkan hortikultura, peternakan, dan perkebunan rakyat mengalami penurunan. Secara subsektor, NTP subsektor padi & palawija tercatat sebesar 101,39 pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 97,70. Subsektor perikanan juga mencatat perbaikan dengan NTP meningkat menjadi 97,12 dari 92,20 pada triwulan II 2025, meskipun masih berada di bawah 100 yang berarti belum sepenuhnya mampu menutupi biaya yang ditanggung. Sebaliknya, tiga subsektor lainnya mengalami tekanan. Subsektor hortikultura turun menjadi 96,70 dari 97,31, subsektor peternakan turun menjadi 105,17 dari 105,74, dan subsektor perkebunan rakyat mengalami penurunan paling dalam dengan turun menjadi 92,97 dari 102,48. Secara keseluruhan, dari lima subsektor, hanya padi & palawija dan peternakan yang masih mencatat NTP di atas 100 pada triwulan II 2026, sementara hortikultura, perikanan, dan perkebunan rakyat masih berada dalam posisi defisit yang mengindikasikan biaya yang ditanggung petani pada ketiga subsektor tersebut masih melampaui nilai yang diterima dari hasil penjualan produknya (Grafik 5.7).

Grafik 5.6. Perkembangan NTP Provinsi NTT



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 5.7. NTP Provinsi NTT Berdasarkan Sub sektor

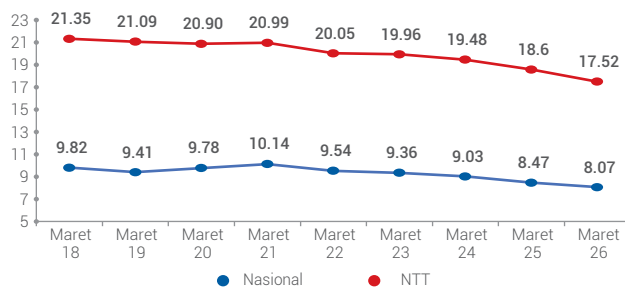


Sumber: BPS (diolah)

Kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan berdasarkan perkembangan indikator kemiskinan, ketimpangan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

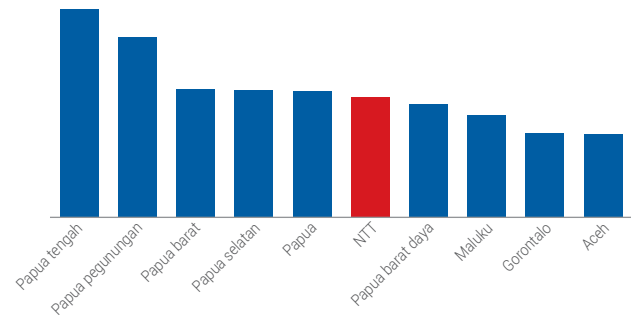
Peningkatan kesejahteraan masyarakat terkonfirmasi dari penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada periode Maret 2026. Persentase penduduk miskin pada periode Maret 2026 tercatat sebesar 17,52% atau sejumlah 1,038 juta orang, menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 18,60% atau sejumlah 1,089 juta orang. Sejalan dengan NTT, persentase kemiskinan Nasional juga mengalami penurunan menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,47% pada Maret 2025 (Grafik 5.8). Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat keenam di antara provinsi dengan persentase

Grafik 5.8. Perkembangan Persentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 5.9. Sepuluh Provinsi Dengan Persentase Kemiskinan Tertinggi Per Maret 2026



Sumber: BPS (diolah)

kemiskinan tertinggi, setelah Papua Tengah (30,41%), Papua Pegunungan (26,34%), Papua Barat (18,68%), Papua Selatan (18,54%), dan Papua (18,39%) (Grafik 5.9). Meskipun masih tinggi, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan menjadi 6,71% pada Maret 2026 dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 7,68%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan menjadi 21,64% pada Maret 2026 dibandingkan Maret 2025 sebesar 22,66%. Jumlah penduduk miskin perkotaan turun menjadi 109,82 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun menjadi 927,83 ribu orang (Tabel 5.4).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi NTT pada periode Maret 2026 tercatat lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 3,05, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 3,35. Penurunan tersebut disumbangkan baik oleh perdesaan yang turun dari 4,12 pada Maret 2025 menjadi 3,86 pada Maret 2026, maupun perkotaan yang turun dari 1,26 pada Maret 2025 menjadi 0,93 pada Maret 2026. Lebih lanjut,

Tabel 5.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Karakteristik Kemiskinan

Karakteristik Kemiskinan	2024		2025		2026
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar
Berdasarkan Daerah Tinggal (%)					
Perkotaan	8.57	8.11	7.68	6.96	6,71
Pedesaan	23.41	23.02	22.66	21.48	21,64
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)					
Perkotaan	131.61	126.91	121.85	112.54	109,82
Pedesaan	995.96	981.02	966.93	919.15	927,83

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 5.5. Indeks Kedalaman dan Kemiskinan Menurut Wilayah

Indeks Kemiskinan	2024		2025		2026
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3.40	3.57	3.35	2.89	3,05
P1 Perkotaan	1.19	1.23	1.26	0.75	0,93
P1 Pedesaan	4.21	4.42	4.12	3.69	3,86
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.84	0.96	0.84	0.73	0,77
P2 Perkotaan	0.24	0.29	0.30	0.11	0,20
P2 Pedesaan	1.07	1.20	1.04	0.97	0,98

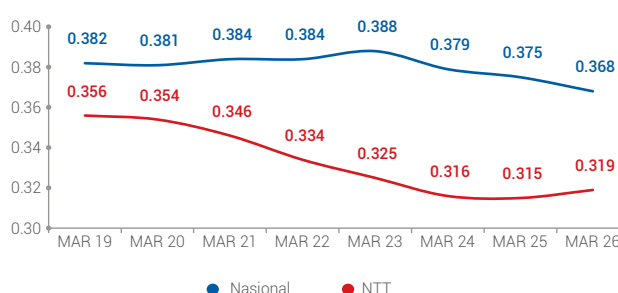
Sumber: BPS (diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 0,77, menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,84. Penurunan tersebut didorong oleh daerah pedesaan yang mengalami penurunan dari 1,04 pada Maret 2025 menjadi 0,98 pada Maret 2026, serta perkotaan yang juga mengalami penurunan dari 0,30 pada Maret 2025 menjadi 0,2 pada Maret 2026.

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

- Ekonomi NTT tetap tumbuh positif sebesar 5,01% (yoy) pada triwulan II 2026, meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2025 sebesar 5,41% (yoy). Akselerasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT mendorong aktivitas ekonomi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Sementara itu peningkatan permintaan domestik yang meliputi Konsumsi Rumah Tangga (RT), Konsumsi Pemerintah serta perbaikan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT.
- Pemerintah Provinsi NTT menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp2.455.898,- , naik sebesar Rp126.929,- atau 5,45% dari UMP NTT tahun 2025.
- Sejalan dengan kenaikan UMP, rata-rata upah/gaji bersih sebulan untuk buruh/karyawan menurut jenis pekerjaan utama di Provinsi NTT periode Februari 2026 mengalami peningkatan sebesar 9,49% dengan rata-rata Rp2.563.541,-, dibandingkan periode Februari 2025 yang sebesar Rp2.341.525. Namun demikian, tingkat rata-rata upah/gaji bersih NTT masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar Rp3.287.675.

Grafik 5.10. Perkembangan Gini Ratio Provinsi



Sumber: BPS (diolah)

Ketimpangan pengeluaran Provinsi NTT mengalami peningkatan pada Maret 2026. Ketimpangan pengeluaran yang digambarkan dengan Rasio Gini pada Maret 2026 tercatat 0,319, sedikit meningkat dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,315. *Rasio Gini* Provinsi NTT ini lebih baik dibandingkan Nasional yang tercatat sebesar 0,368 pada Maret 2026. Secara umum, *Rasio Gini* yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi, dan sebaliknya *Rasio Gini* yang semakin rendah dibandingkan angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah.

Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah sebagaimana ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah persentasenya berada di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 – 17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.

Pada Maret 2026, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 21,05% yang berarti berada dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini membaik menjadi 21,05% dibandingkan kondisi Maret 2025 sebesar

Tabel 5.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT menurut Dimensi Penyusun

Dimensi/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	71.01	71.3	71.57	71.83	72.16
Pengetahuan					
Harapan lama Sekolah (HLS)	13.2	13.21	13.22	13.23	13.34
Rata-rata lama Sekolah (RLS)	7.69	7.70	7.82	8.02	8.22
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan)	7.554	7.877	8.248	8.534	8.735
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67.02	67.63	68.40	69.14	69.89

Sumber: BPS (diolah)

20,97%. Jika dilihat berdasarkan wilayah, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2026 adalah sebesar 23,82%. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 22,13%. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan yang terjadi di daerah perkotaan dan daerah perdesaan tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT terus menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT tahun 2025

mengalami peningkatan menjadi 69,89 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,14, yang didukung oleh peningkatan pada seluruh komponen. Pada komponen pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan pada tahun 2025 sebesar Rp8.735.000, terjadi peningkatan sebesar 2,36% (yoy) dibandingkan tahun 2024 atau sebesar Rp8.534.000. Umur Harapan Hidup (UHH) yang mewakili komponen kesehatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,46% (yoy) menjadi 72,16 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mewakili komponen pendidikan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,83% (yoy) dan 2,49% (yoy) (Tabel 5.6).



Halaman ini sengaja dikosongkan





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

Prospek Perekonomian Daerah

Kinerja perekonomian NTT tahun 2026 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,2 - 5,2% (yoy), berpotensi tetap kuat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh 5,14% (yoy). Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi NTT tahun 2026 tetap ditopang oleh realisasi investasi pemerintah yang kembali meningkat serta investasi swasta yang tetap solid. Selain itu, kinerja impor tahun 2026 diperkirakan meningkat sejalan dengan kebutuhan bahan konstruksi, di tengah permintaan domestik tahun 2026 yang diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menopang kinerja perekonomian NTT melalui akselerasi Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi. Prospek tersebut didukung dengan menguatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian ke depan, sejalan dengan akselerasi program ekonomi kerakyatan dan berbagai stimulus fiskal yang mendukung daya beli masyarakat. Dari sisi lapangan usaha, prospek tersebut akan tercermin dari peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Konstruksi, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta tetap kuatnya kinerja LU Administrasi Pemerintahan.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2026 diperkirakan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$ % (yoy). Sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang meningkat, prospek inflasi NTT 2026 tetap terjaga namun dalam tendensi meningkat dibandingkan inflasi tahun 2025 yang sebesar 2,39% (yoy). Prakiraan tersebut dipengaruhi oleh prospek meningkatnya inflasi pada kelompok pangan dan beberapa komoditas impor yang mendorong *imported inflation* di Provinsi NTT. Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat dengan koordinasi TPIP-TPID dalam program pengendalian inflasi yang tetap sasaran serta penguatan program gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera (GPIPS) untuk pengendali inflasi pangan dalam mencapai target tingkat inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1$ % (yoy).

6.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NTT

Prospek perekonomian global pada 2026 masih dibayangi perlambatan dan ketidakpastian yang tinggi. World Economic Outlook edisi Juli 2026 memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,0% (yoy), melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2024–2025 sebesar 3,5% (yoy). Di tengah tekanan global tersebut, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap resilien, ditopang implementasi berbagai program stimulus Pemerintah dan keyakinan pelaku ekonomi yang terjaga sehingga diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,9–5,7%¹. Namun, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas dunia serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Bagi Provinsi NTT, dampak kondisi tersebut terutama ditransmisikan melalui kenaikan biaya transportasi dan distribusi antarpulau, mengingat tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan barang dari luar provinsi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, menahan daya beli masyarakat, serta meningkatkan biaya produksi dan investasi.

Dalam konteks tersebut, kinerja perekonomian NTT pada 2026 diperkirakan tumbuh positif dan tetap kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja perekonomian NTT tahun 2026 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,2–5,2% (yoy), berpotensi tetap kuat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh 5,14% (yoy) (Grafik 6.1). Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi NTT tahun 2026 salah satunya ditopang oleh permintaan domestik terutama melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan menjadi salah satu faktor pendukung, seiring dengan semakin gencarnya program ekonomi berbasis kerakyatan serta berbagai stimulus fiskal yang dirancang untuk menjaga

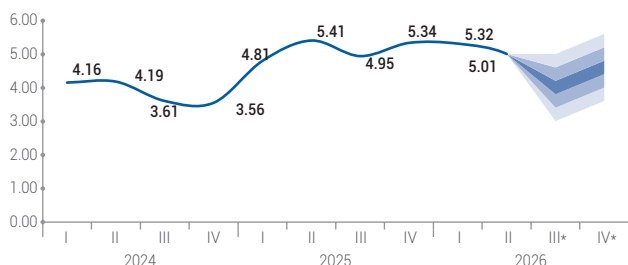
daya beli masyarakat. Selain itu, kinerja investasi pada tahun 2026 diperkirakan terakselerasi, realisasi belanja modal pemerintah diprediksi kembali menunjukkan tren yang positif seiring dengan pembangunan beberapa proyek strategis yang di akselerasi. Sementara itu, investasi swasta juga diperkirakan tetap solid, khususnya di sektor perumahan, perhotelan dan restoran, serta percepatan upaya *recovery* pembangunan infrastruktur wilayah Flores pasca bencana gempa. Perkembangan pada sisi pengeluaran ini pada akhirnya akan tercermin dalam kinerja sejumlah lapangan usaha, antara lain sektor konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta administrasi pemerintahan yang diharapkan tetap tumbuh dengan kokoh.

Lebih lanjut, kinerja ekspor antardaerah diperkirakan tetap tumbuh, terutama ditopang oleh komoditas perikanan, peternakan, perkebunan, dan produk UMKM. Namun, peningkatan ekspor diperkirakan belum mampu mengimbangi akselerasi impor, yang ditujukan untuk peningkatan bahan bangunan sejalan dengan akselerasi pembangunan beberapa proyek strategis serta impor kebutuhan seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tengah produksi yang tertahan. Sehingga defisit neraca perdagangan diperkirakan dapat melebar dan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi NTT menjadi lebih rendah.

Kinerja konsumsi Rumah Tangga tahun 2026 diperkirakan meningkat, didukung berbagai stimulus Pemerintah untuk mendorong daya beli. Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) terus mengakselerasi target realisasi program-program prioritas yang bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi kerakyatan, pendapatan, hingga daya beli masyarakat. Penambahan tenaga kerja juga akan berlangsung akseleratif, dengan perluasan program ekonomi kerakyatan dan investasi padat karya yang diperkirakan meningkat pada tahun 2026. Perkembangan

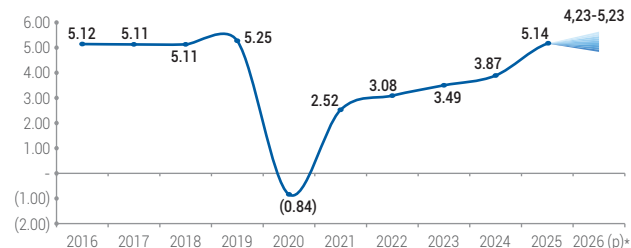
1. RDG Bank Indonesia 19 Agustus 2026

Grafik 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulanan Tahun 2026



Sumber: KPw BI Provinsi NTT (diolah)

Grafik 6.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2026



Sumber: KPw BI NTT (diolah)

Gambar 6.1. Target Program Ekonomi Kerakyatan di NTT Tahun 2026

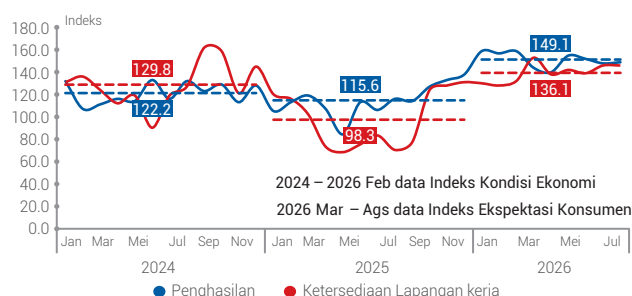


Sumber: Kemenkop UKM, BGN, Pemprov NTT (diolah)

ini menopang perbaikan keyakinan konsumen yang lebih baik terhadap kondisi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja tahun 2026 (Grafik 6.2), yang selanjutnya mendukung peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga. Prospek daya beli yang lebih solid juga didukung pemberian paket stimulus fiskal pendukung daya beli yang lebih tinggi dan inklusif dibandingkan tahun 2025, mencakup diskon transportasi, bantuan pangan, dan pencairan tunjangan hari raya (THR).

Kinerja konsumsi Pemerintah tahun 2026 diperkirakan tumbuh meningkat. Prakiraan tersebut didukung realisasi belanja Pemerintah Daerah yang lebih cepat (*frontloading*), dengan pagu anggaran yang cukup. Pagu anggaran belanja APBD Pemerintah Daerah (Pemda) di NTT tahun 2026 mengalami penurunan, menjadi Rp27.523 miliar, dibandingkan Rp30.308 miliar pada tahun 2025. Meski pagu tersebut menurun, kontribusi APBD Pemda di NTT diperkirakan tetap mengalami peningkatan dengan mengoptimalkan pagu yang tersedia melalui strategi *frontloading*. Dengan mempertimbangkan besaran pagu

Grafik 6.3. Perkembangan Komponen Indeks Keyakinan Konsumen NTT



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

belanja APBD 2026 dan realisasi APBD 2025 yang sebesar 79,46% dari pagu, belanja Pemda di NTT tahun 2026 dapat dioptimalkan untuk tumbuh 14,29% (yoy), dengan dukungan PAD yang ditargetkan meningkat (Tabel 6.1). Hal ini dipengaruhi realisasi Belanja Pemda tahun 2025 yang relatif lambat akibat diperlukannya waktu adaptasi dalam menyesuaikan keuangan Pemda sesuai Inpres 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dan KMK No. 29 tahun 2025 yang mengatur realokasi transfer ke daerah. Dari sisi Belanja APBN di NTT, berdasarkan pagu anggaran tahun 2026, belanja APBN di NTT melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) berpotensi mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, didukung belanja pegawai yang masih tumbuh positif serta kontraksi belanja barang yang lebih rendah (Tabel 6.2).

Belanja APBN dan APBD di NTT masih berpotensi meningkat lebih tinggi, ditopang prospek peningkatan belanja untuk Program Ekonomi Kerakyatan Pemerintah tahun 2026. Hal ini sejalan dengan target tahun 2026 untuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Tabel 6.2. Perkembangan Realisasi Tahun 2025 dan Pagu Tahun 2026 APBD se Provinsi NTT

Komponen APBD	2025			2026	Pertumbuhan %; YOY	
	Pagu Rp Miliar	Realisasi Rp Miliar	%Realisasi Persentase	Pagu Rp Miliar	Realisasi 2025 terhadap 2024	Pagu 2026 terhadap Realisasi 2025
Pendapatan	29.946	25.613	85,53%	27.238	-5,63	6,35
PAD	4.090	3.076	75,20%	4.925	8,53	60,14
Transfer	25.002	22.146	88,58%	21.992	-8,25	-0,70
Lainnya	853	391	45,78%	321	130,87	-17,77
Belanja	30.308	24.084	79,46%	27.523	-8,99	14,28
Belanja Pegawai	14.172	11.649	82,19%	14.792	9,49	26,99
Belanja Barang Jasa	7.138	5.783	81,02%	6.418	-7,93	10,97
Belanja Modal	3.039	2.104	69,25%	1.446	-41,12	-31,28
Belanja Bansos	85	90	106,17%	74	-3,59	-17,37
Lainnya	5.869	4.457	75,94%	4.793	-24,12	7,52

Sumber: DJPK Kemenkeu, BKAD Provinsi NTT, diolah

Tabel 6.2. Perkembangan Realisasi Tahun 2025 dan Pagu Tahun 2026 APBN di NTT

Komponen APBN	2025			2026	Pertumbuhan %; YOY	
	Pagu Rp Miliar	Realisasi Rp Miliar	%Realisasi Persentase	Pagu Rp Miliar	Realisasi 2025 terhadap 2024	Pagu 2026 terhadap Realisasi 2025
TOTAL BELANJA	31.567	32.627	103,36%	28.646	-13,34	-12,20
BPP K/L	10.321	9.571	92,73%	9.518	-25,08	-0,56
Belanja Pegawai	4.258	4.177	98,11%	4.368	11,13	4,56
Belanja Barang	4.280	3.823	89,33%	3.380	-32,06	-11,57
Belanja Modal	1.757	1.545	87,93%	1.761	-54,11	13,98
Belanja Bansos	28	27	97,78%	9	10,56	-64,84
TKD	21.245	20.743	97,63%	19.128	-5,85	-7,78
DBH	214	189	88,41%	75	-0,40	-60,57
DAU	15.279	14.945	97,81%	13.758	1,06	-7,94
DAK Fisik	937	892	95,29%	267	-71,17	-70,07
DAK Nonfisik	4.577	4.477	97,82%	5.028	19,23	12,32
Insentif Fiskal	239	239	100,00%	-	17,46	-100,00
Dana Desa	2.699	2.313	85,69%	2.355	-18,66	1,80

Sumber: DJPb Provinsi NTT, diolah

program MBG yang meningkat menjadi 583 SPPG aglomerasi dari 192 SPPG pada tahun 2025, serta pembukaan 3.455 gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah Provinsi NTT juga turut mendukung pengembangan aktivitas ekonomi kerakyatan yang produktif, dengan pengembangan NTT Mart dengan Program Pengembangan Desa Tertinggal.

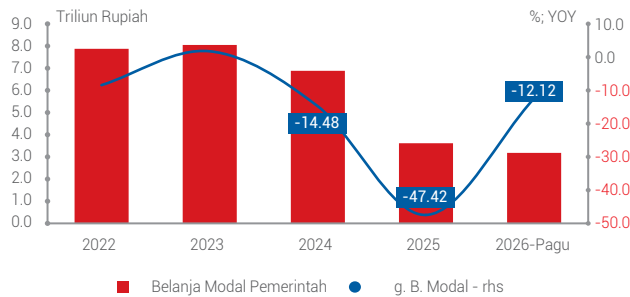
PMTB/Investasi tahun 2026 diperkirakan kembali mengalami peningkatan, setelah tumbuh melambat pada tahun 2025. Dari sisi investasi Pemerintah berdasarkan pagu anggaran 2026, belanja modal Pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan mengalami perbaikan meski masih berkontraksi 12,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 47,42% (yoy) (Grafik 6.3). Prospek perbaikan ini sejalan dengan akselerasi pembangunan proyek konstruksi prioritas, seperti Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahap I dan II di Kab. Rote Ndao dengan anggaran investasi tahun 2026 sebesar Rp1,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp700 miliar, serta konstruksi *Integrated Shrimp Farming* (ISF) di Sumba Timur dengan pagu anggaran 2026 sebesar Rp857 miliar. Di sisi lain, pembangunan PSN Bendungan Manikin pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi kendala dikarenakan isu lahan yang menghambat pembangunan terowongan penghubung bendungan pada sejak tahun 2025. Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat juga mulai terealisasi sejak Februari 2026, dengan anggaran APBN sebesar Rp238,57 miliar. Selain itu, revitalisasi fasilitas Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagekeo, Nusa

Tenggara Timur, telah mencapai progres fisik sebesar 49,91 persen dengan pagu anggaran mencapai Rp91,3 miliar.

Di sisi lain, prospek investasi swasta tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga. Prospek tersebut sejalan dengan target investasi tahun 2026 yang sebesar Rp5 triliun. Hal tersebut mendorong prospek pertumbuhan positif investasi swasta tahun 2026 sebesar 2,86% (yoy), tetap baik meski tidak setinggi tahun sebelumnya yang tumbuh 12,43% (yoy) (Grafik 6.4). Pertumbuhan positif investasi swasta tahun 2026 ditopang oleh masih tingginya permintaan pada Sektor Perumahan dan Pemukiman; Sektor Listrik, Gas dan Air; Sektor Industri Makanan dan Minuman; dan Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan. Di sisi lain, prospek investasi untuk LU Hotel dan Restoran diperkirakan tetap kuat meski melambat.

Perbaikan neraca perdagangan pada tahun 2026 diperkirakan tidak sebaik tahun sebelumnya, seiring dengan prospek meningkatnya impor antardaerah. Prospek peningkatan investasi pada tahun 2026 turut meningkatkan kebutuhan barang pendukung konstruksi yang dipenuhi melalui impor antardaerah. Keterkaitan investasi dan peningkatan impor juga ditunjukkan dengan kontribusi input antara PMTB atau investasi yang bersumber dari impor sebesar 28,70%² (BPS-IRIO, 2016). Selain itu, kebutuhan pemenuhan pangan dari provinsi lain juga mengalami peningkatan pada tahun 2026, ditunjukkan dengan kenaikan alokasi pemenuhan pasokan beras Cadangan Pangan

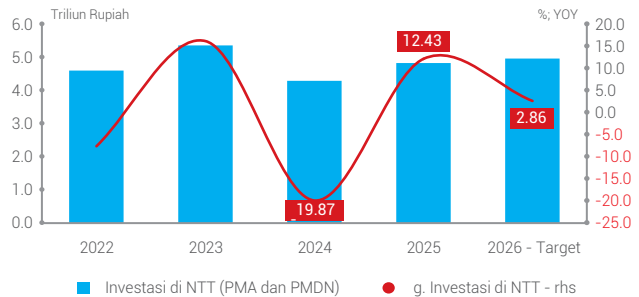
2. Berdasarkan Tabel IRIO Badan Pusat Statistik (2016)

Grafik 6.4. Prospek Realisasi Belanja Modal Pemerintah di NTT (APBN dan APBD)

Sumber: DJPb Provinsi NTT, BKAD Provinsi NTT (diolah)

Pemerintah (CPP) BULOG yang bersumber dari provinsi lain mengalami peningkatan menjadi 88.000 ton dari 68.273 ton pada tahun sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan penurunan produksi sektor Pertanian seiring peningkatan risiko musim kemarau akibat El Nino.

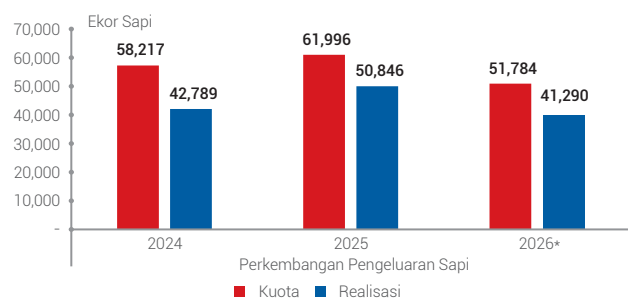
Sementara itu, dukungan ekspor tahun 2026 terhadap perbaikan defisit neraca perdagangan diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan kuota pengeluaran sapi tahun 2026, menjadi 51.784 ekor, dibandingkan kuota tahun 2025 yang sebesar 61.996 ekor sapi. Di sisi lain, prospek ekspor untuk komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan rumput laut diperkirakan meningkat, turut menahan pelemahan neraca perdagangan lebih lanjut. Prospek ini didukung telah dilakukannya revitalisasi lahan perkebunan secara masif pada tahun 2025, terutama pada wilayah Sumba dan Flores, pasca terhambatnya produksi akibat serangan hama penyakit Penggerek Buah Kakao (PBK) pada tahun 2025 dan kerusakan lahan kopi akibat El Nino tahun 2023. Sementara itu, ekspor rumput laut diperkirakan meningkat, didukung mulai membaiknya produksi di Kabupaten Kupang, pasca terjadinya kerusakan jaring produksi secara masif akibat ombak tinggi dan limbah pembuangan PLTU

Grafik 6.5. Prospek Investasi di Provinsi NTT

Sumber: DPMPSTP Provinsi NTT (diolah)

pada awal tahun 2025. Harga rumput laut yang lebih tinggi juga memicu kenaikan minat pembudidaya untuk kembali aktif melakukan produksi.

Dari sisi lapangan usaha (LU), produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menopang kinerja Provinsi NTT tahun 2026 dengan tumbuh positif. Produksi LU utama ini diperkirakan sedikit melambat pada tahun 2026, dipengaruhi oleh hasil produksi komoditas tanaman pangan. Kondisi curah hujan pada musim tanam dan fase generatif padi tahun 2026 lebih kondusif dibandingkan tahun 2025, namun terdapat risiko El Nino lemah³ pada semester II tahun

Grafik 6.6. Perkembangan Pengeluaran Sapi NTT ke Provinsi Lain

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT (diolah)

Tabel 6.3 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Pengeluaran	2022	2023	2024	2025	2026*
Konsumsi Rumah Tangga	2.76	2.25	4.08	3.83	▲
Konsumsi LNPR	5.10	6.29	11.29	1.21	▲
Konsumsi Pemerintah	-3.46	2.83	7.32	2.75	▲
PMTB	-0.52	6.16	1.74	-0.39	▲
Ekspor	9.66	20.02	-3.98	23.13	▼
Impor	-2.54	5.53	3.28	-1.22	▲
PDRB	3.08	3.49	3.87	5.14	▼

Sumber: KPw BI Provinsi NTT, diolah

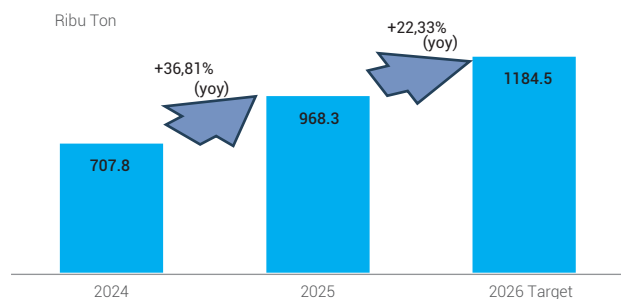
▲ : meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
▼ : melambat dibandingkan tahun sebelumnya

3. Berdasarkan rilis dan proyeksi BMKG Februari 2026

2026. Dengan perkembangan tersebut, produksi padi tahun 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 22,33% (yoy), meski tidak setinggi tahun sebelumnya yang tumbuh 36,81% (yoy) (Grafik 6.6). Prospek pertumbuhan tinggi tersebut juga didukung dengan peningkatan target luas tanam padi pada tahun 2026 sebesar 22,93 ribu Ha, sehingga total luas tanam padi tahun 2026 menjadi 273,80 ribu Ha atau tumbuh 9,14% (yoy). Perkembangan curah hujan ini juga akan memberikan dampak terhadap produksi jagung, yang diperkirakan tumbuh melambat.

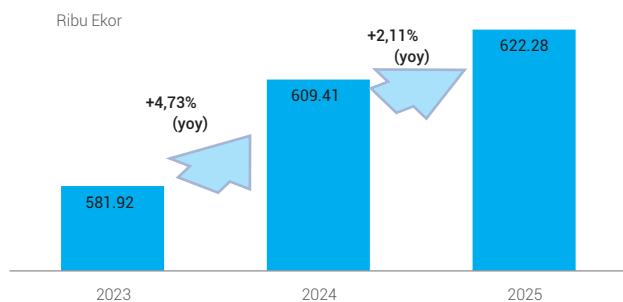
Sementara itu, kenaikan permintaan dan perbaikan faktor produksi diperkirakan mendukung akselerasi produksi Sub-LU Peternakan dan Perkebunan. Aktivitas pemotongan sapi tahun 2026 diperkirakan meningkat, sejalan dengan kenaikan permintaan kebutuhan domestik untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis. Setiap SPPG diperkirakan setidaknya membutuhkan 1 ekor sapi per minggu. Kenaikan permintaan ini juga didukung dengan pasokan sapi yang memadai, di mana populasi sapi pada tahun 2025 dilaporkan sebanyak 622,28 ribu ekor, tumbuh 2,11% (yoy) (Grafik 6.7). Selain itu, produksi perkebunan tahun 2026 diperkirakan mengalami peningkatan, terutama untuk kakao dan kopi pada wilayah Sumba dan Flores, pasca terhambatnya produksi akibat serangan hama penyakit PBK (Penggerek Buah Kakao) pada tahun 2025 dan kerusakan lahan kopi akibat El Nino tahun 2023. Prospek ini juga didukung penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026 yang diperkirakan meningkat, didukung kenaikan alokasi subsidi pupuk NTT untuk Urea yang meningkat menjadi 79,51 ribu ton dari 33,72 ribu ton pada tahun sebelumnya, NPK meningkat menjadi 96,55 ribu ton dari 43,86 ribu ton pada tahun sebelumnya, serta alokasi subsidi tambahan pupuk organik sebesar 21,90 ribu ton (Grafik 6.8).

Grafik 6.7. Target Produksi Padi NTT 2026



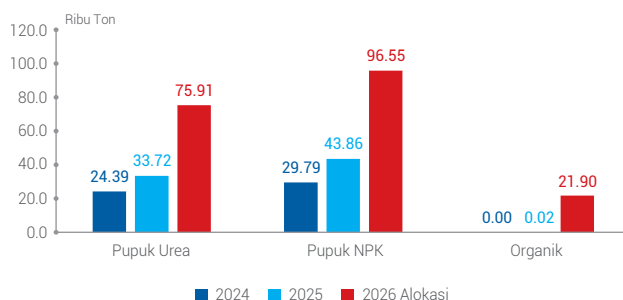
Sumber: Distan dan Ketahanan Pangan NTT (diolah)

Grafik 6.8. Populasi Sapi Potong di NTT



Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT

Grafik 6.9. Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Sumber: Distan dan Ketahanan Pangan NTT (diolah)

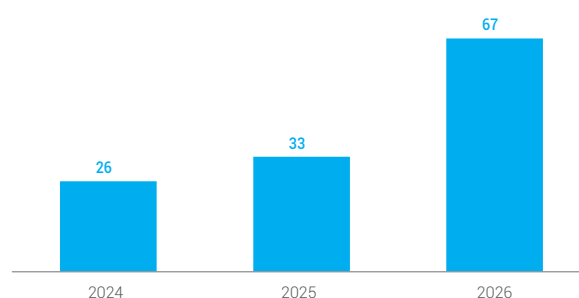
Kinerja LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2026 diperkirakan meningkat. Prospek tersebut terutama didukung oleh prakiraan peningkatan pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBD di NTT serta perbaikan belanja barang dan jasa APBN di NTT. Berdasarkan pagu tahun 2026, belanja pegawai APBD di NTT diperkirakan tumbuh 26,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,49% (yoy) (Tabel 6.1). Peningkatan ini sejalan dengan adanya pengangkatan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Dari sisi APBN, prospek perbaikan belanja barang dan jasa mendukung peningkatan LU ini, meski masih terkontraksi sebesar 11,57% (yoy) (Tabel 6.2). Perbaikan belanja barang dan jasa sejalan dengan realisasi belanja APBN K/L yang lebih *frontloading*, serta akselerasi program prioritas Pemerintah Pusat terkait ekonomi kerakyatan.

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat. Prospek tetap kuatnya kinerja ini terutama bersumber dari akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target

terbentuknya 583 SPPG aglomerasi di NTT pada tahun 2026, meningkat dibandingkan 192 SPPG pada akhir tahun 2025. Pemenuhan bahan baku SPPG untuk memenuhi kebutuhan penyaluran 3.000 s.d. 3.500 porsi makan siang per harinya akan meningkatkan aktivitas perdagangan antara kelompok tani, offtaker, koperasi, dan SPPG. Selain itu, aktivitas perdagangan untuk barang tahan lama (durable goods), seperti kendaraan bermotor dan peralatan elektronik, diperkirakan mengalami perbaikan sejalan dengan prospek Konsumsi RT, meski masih dibayangi risiko kenaikan harga akibat dinamika penetapan tarif Amerika Serikat, ketidakpastian pasar keuangan, dan eskalasi perang di Timur Tengah. Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan stimulus untuk mendorong permintaan penjualan kendaraan bermotor sejak Januari 2026⁴, melalui diskon tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 17,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang dihitung dengan bobot dan tarif 1,2%. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan pengurangan Dasar Pengenaan BBNKB untuk kendaraan baru sebesar 15% untuk kendaraan roda dua dan roda tiga, serta 20% untuk kendaraan roda empat.

Meski demikian, pertumbuhan kuat LU Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2026 diperkirakan sedikit lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Prakiraan tersebut dipengaruhi oleh prospek melambatnya perdagangan ekspor untuk sapi hidup, sejalan dengan penurunan kuota alokasi pengeluaran sapi tahun 2026, menjadi 51.784 ekor, dibandingkan kuota tahun 2025 yang sebesar 61.996 ekor sapi. Secara umum, prospek melambatnya pertumbuhan produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan akan memengaruhi kinerja perdagangan ekspor. Selain itu, prospek kenaikan impor antar provinsi untuk bahan

Grafik 6.10. Jumlah Event pada Calendar of Event NTT



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

pendukung konstruksi dan bahan makanan juga akan memberikan dampak terhadap penurunan nilai tambah bruto pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, dipengaruhi oleh 12,60%⁵ input antara yang dipenuhi melalui impor pada LU ini.

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tahun 2026 diperkirakan meningkat.

Prospek peningkatan kinerja LU Akmamin pada tahun 2026 terutama didukung oleh perbaikan aktivitas pariwisata dari sisi *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE), yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah event dalam *calendar of event* tahun 2026 menjadi 67 kegiatan, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang sebanyak 33 kegiatan (Grafik 6.10). Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus diskon transportasi pada triwulan I 2026, yaitu pada tanggal 14 – 29 Maret 2026. Stimulus tersebut antara lain diskon tarif kapal Pelni hingga 30%, pembebasan 100 persen tarif jasa angkutan penyeberangan di pelabuhan, dan diskon tiket pesawat hingga 17 - 18%. Dari sisi aksesibilitas, peningkatan kunjungan wisatawan juga didukung penambahan 5 rute penerbangan domestik sejak

Tabel 6.4. Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025	2026*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.77	2.46	1.83	3.50	▼
Konstruksi	-0.44	7.63	2.44	-0.46	▲
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.08	5.62	6.24	12.43	▼
Adm. Pemerintahan	1.91	1.00	6.35	6.99	▲
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.43	10.71	11.95	9.97	▲
PDRB	3.08	3.49	3.87	5.14	▼

Sumber: KPw BI Provinsi NTT, diolah

▲ : meningkatdibandingantahunsebelumnya

▼ : melambatdibandingantahunsebelumnya

4. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 78 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2025 yang mengatur diskon dan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, termasuk perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas.

5. Berdasarkan Tabel IRIO Badan Pusat Statistik (2016)

Tabel 6.5 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2026

Indikator	Upside Potential dan Downside Risk	Arah
Perkiraan Perekonomian Global	Perekonomian dunia tahun 2026 diperkirakan tumbuh 3,1%, melambat dari prakiraan pertumbuhan tahun 2025 yang sebesar 3,3%, disertai divergensi pertumbuhan antarnegara. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh eskalasi geopolitik global yang mengakibatkan peningkatan ketidakpastian dan kenaikan harga minyak dunia. Di sisi lain, tekanan inflasi global juga meningkat sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global, termasuk kemungkinan semakin tertundanya penurunan Fed Funds Rate (FFR).	▼
Perkiraan Perekonomian Nasional	Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diperkirakan meningkat pada kisaran 4,9–5,7%, sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kinerja Konsumsi RT diperkirakan meningkat seiring dengan berbagai stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Investasi juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi, didorong oleh investasi Pemerintah dan hilirisasi sumber daya alam (SDA).	▲
Kondisi Cuaca dan Alam	Kondisi curah hujan pada semester II 2026 diperkirakan lebih rendah, dipengaruhi prakiraan kondisi iklim yang memasuki fase El Nino lemah. Perkembangan berisiko menyebabkan kondisi curah hujan pada musim kemarau semakin di bawah normal. Selain itu kondisi kebencanaan di wilayah Flores turut memengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat dengan kebutuhan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.	▼
Sentralisasi Belanja Pemerintah	Stance Pemerintah untuk melakukan sentralisasi belanja dengan menurunkan pagu dana transfer ke daerah. Dalam hal ini, pagu Transfer ke Daerah se-Provinsi NTT tahun 2026 mengalami penurunan 9,97% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan DBH sebesar 60,57% (yoy), DAK Fisik sebesar 70,07% (yoy), dan DAU sebesar 7,94% (yoy). Perkembangan ini menuntut penguatan koordinasi Pusat dan Daerah, di tengah terjadinya pengetatan kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten di NTT.	▼
Kebijakan Bank Indonesia	Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung kesuksesan program-program dalam Asta Cita, melalui: • Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi secara terukur dan tetap waspada dengan penurunan BI-Rate sebesar 150 bps sejak September 2024. • Ekspansi likuiditas Rupiah dengan penurunan posisi SRBI dan pembelian SBN di pasar sekunder sebagai bentuk sinergi erat kebijakan fiskal dan moneter. • Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas, termasuk sektor perumahan dan pertanian. BI menambah besaran insentif KLM dari maksimal 4% menjadi 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada April 2025, dan diperkuat dengan KLM <i>forward looking</i> dengan tambahan insentif maksimal 5,5% dari DPK pada Desember 2025. Sejak 16 Desember 2025, KLM diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan pada sektor tertentu (<i>lending channel</i>) dan penetapan suku bunga kredit yang sejalan dengan BI-Rate (<i>interest rate channel</i>). • Peningkatan velositas, perluasan akseptasi Sistem Pembayaran Digital, dan penguatan layanan industri Sistem Pembayaran	▲

Sumber: KPw BI Provinsi NTT, diolah

semester II 2025, yaitu untuk rute Jakarta – Labuan Bajo, Kab. Bima – Labuan Bajo, Kota Mataram – Labuan Bajo, Bali – Sumba Barat Daya, Bali – Waingapu serta reaktivasi status internasional Bandara El Tari, Kota Kupang. Dari sisi pelayaran, terdapat kapal feri yang melayani pelayaran Bali – Labuan Bajo.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2026 tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat maupun potensi risiko yang mungkin terjadi, sehingga harus dimitigasi secara efektif untuk meminimalkan dampak perekonomian secara keseluruhan. Beberapa risiko yang dapat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yaitu:

6.2. PROSPEK INFLASI DI PROVINSI NTT

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2026 diperkirakan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 % (yoy) (Grafik 6.10). Dari sisi global, dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan meningkatkan risiko *imported inflation*, terutama melalui kenaikan harga energi dan biaya logistik internasional. Sementara itu dari sisi domestik, berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dan menguatnya permintaan masyarakat diperkirakan mendorong tekanan inflasi secara moderat, di tengah risiko

pasokan pangan serta masih tingginya biaya distribusi dan logistik antarwilayah. Dengan perkembangan tersebut, inflasi NTT pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran, namun cenderung meningkat dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,39% (yoy), terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta komoditas yang terpapar *imported inflation*.

Inflasi pada kelompok pangan diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh ekspektasi produksi komoditas yang tertahan dan tidak setinggi pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat risiko El Nino pada semester II yang dapat meningkatkan tekanan pada produksi hasil pertanian pada Musim Tanam (MT) II April-September dan berisiko menurunkan pasokan pada akhir tahun 2026. Kenaikan permintaan komoditas daging ayam ras, daging sapi, dan aneka sayur juga berpotensi menimbulkan tekanan inflasi, sejalan dengan prospek penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, *imported inflation* juga turut mendorong peningkatan inflasi di Provinsi NTT pada tahun 2026.

Tabel 6.6 Risiko Inflasi Provinsi NTT Tahun 2026

Faktor Pendorong/Penahan	Arah
Kondisi iklim El Nino pada semester II 2026 berdampak kepada terhambatnya perluasan panen padi serta peningkatan tingkat kematian ternak ayam pedaging dan petelur.	▲
Eskalasi tensi geopolitik dan tarif resiprokal Amerika Serikat terus meluas hingga memengaruhi kenaikan harga komoditas pangan dan energi dunia, serta tarif logistik yang lebih tinggi akibat penutupan akses transportasi antarnegara	▲
Harga emas dunia meningkat lebih tinggi dari prakiraan, akibat eskalasi perang yang tengah terjadi	▲
Pemberian insentif diskon transportasi dalam rangka peningkatan aktivitas ekonomi	▼
Berlanjutnya upaya penanganan inflasi melalui koordinasi TPID dan lintas sektoral utamanya inflasi pada kelompok bahan pangan.	▼
Produksi perikanan yang lebih baik, didukung minimnya frekuensi curah hujan ekstrem di tengah prakiraan terjadinya El Nino lemah pada semester II 2026	▼
Peningkatan alokasi pupuk bersubsidi mendukung penguatan produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura	▼

Sumber: KPw BI Provinsi NTT, diolah

Sejalan dengan eskalasi konflik internasional dan pemberlakuan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, akan meningkatkan harga komoditas pangan dan energi dunia yang juga dibutuhkan oleh Provinsi NTT. Selain itu, risiko gangguan atau penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz juga berpengaruh terhadap tarif logistik internasional dan domestik, seiring kenaikan biaya angkut, harga energi, serta premi risiko pengiriman. Kondisi tersebut meningkatkan biaya distribusi dan pengadaan barang, yang selanjutnya diteruskan secara bertahap ke harga di tingkat konsumen. Sementara itu, jasa transportasi diperkirakan juga turut terpengaruh seiring dengan kenaikan biaya input, prospek sektor pariwisata, serta adanya penurunan kuota alokasi pasokan Peralite dan Bio Solar di Provinsi NTT.

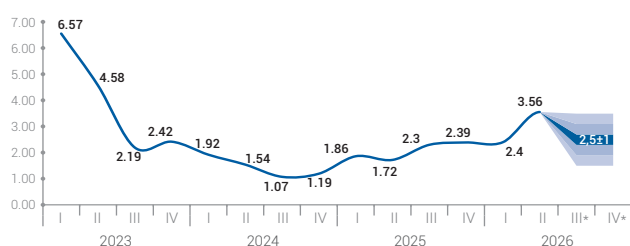
Ke depan, upaya pengendalian inflasi terus ditingkatkan untuk dapat mencapai tingkat inflasi sesuai dengan sasaran target inflasi nasional. Upaya pengendalian harga oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat di seluruh daerah dalam memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) didorong dalam menahan laju inflasi dari kelompok pangan melalui peningkatan produktivitas, ketahanan komoditas, dan tindak lanjut Kerjasama Antardaerah (KAD).

6.3. REKOMENDASI

Momentum pertumbuhan ekonomi NTT pada 2026 membutuhkan penguatan sumber pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan investasi, terutama pada proyek yang memiliki dampak pengganda tinggi. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, dan UMKM perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, hilirisasi komoditas unggulan, perluasan akses pasar, serta penguatan konektivitas antarpulau. Selain itu, implementasi program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, perlu dioptimalkan dengan meningkatkan keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal agar manfaatnya lebih besar terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Perluasan pembiayaan produktif dan digitalisasi transaksi juga diperlukan untuk menopang konsumsi, investasi, dan ketahanan pelaku usaha di tengah risiko perlambatan global dan keterbatasan fiskal daerah.

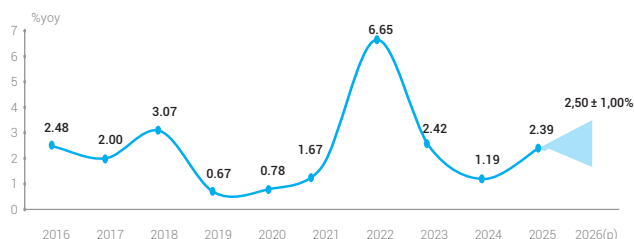
Untuk menjaga inflasi NTT tetap dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy), sinergi TPID perlu terus diperkuat melalui implementasi kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pengendalian inflasi perlu diprioritaskan pada komoditas pangan bergejolak melalui peningkatan produksi dan produktivitas, penguatan cadangan pangan, perluasan

Grafik 6.11. Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Triwulanan Tahun 2026



Sumber: KPw BI Provinsi NTT

Grafik 6.12. Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Tahun 2026



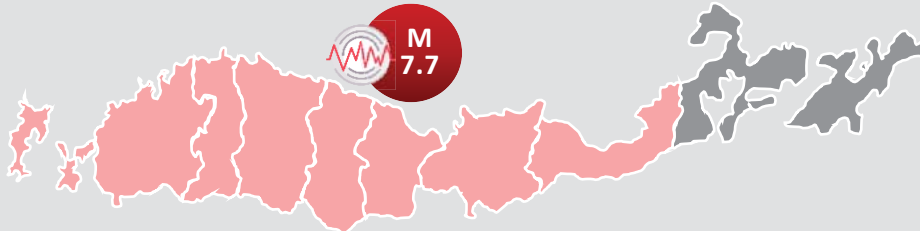
Sumber: KPw BI Provinsi NTT

kerja sama antardaerah, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara tepat waktu dan tepat lokasi. Perbaikan infrastruktur serta efisiensi distribusi antarpulau juga penting untuk mengurangi transmisi kenaikan harga energi dan *imported inflation* terhadap harga konsumen. Di sisi permintaan, penguatan komunikasi kebijakan dan pemantauan harga secara berkala diperlukan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat di tengah tetap kuatnya aktivitas ekonomi domestik.

Boks 3

Gempa Flores dan Dinamika Ekonomi
Nusa Tenggara Timur

Gambar Boks 1.1 Perkembangan rata-rata harga Komoditas Strategis pasca Gempa 7.7 di daerah terdampak



Sumber : SP2KP (diolah)

Gempa bumi yang melanda wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 menimbulkan dampak yang cukup luas terhadap kondisi masyarakat dan infrastruktur di sejumlah wilayah daratan Flores. Gempa dengan magnitudo 7,7 tersebut berdampak pada 7 kabupaten/kota yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Ngada, Ende, dan Nagekeo, dengan dua kabupaten/kota di antaranya merupakan wilayah pengukuran IHK Provinsi NTT (Sikka dan Ngada). Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 25 Agustus 2026, sebanyak 185.528 orang terdampak sebagai pengungsi, sementara kerusakan tercatat pada 78.376 unit rumah, 464 fasilitas kesehatan, 404 fasilitas pendidikan, 120 ruas/titik jalan, 71 jembatan, serta 7 pelabuhan yang mengalami kerusakan ringan. Besarnya jumlah masyarakat yang mengungsi menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di wilayah terdampak masih berada dalam kondisi pemulihan, sementara kerusakan pada sejumlah fasilitas dan infrastruktur menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

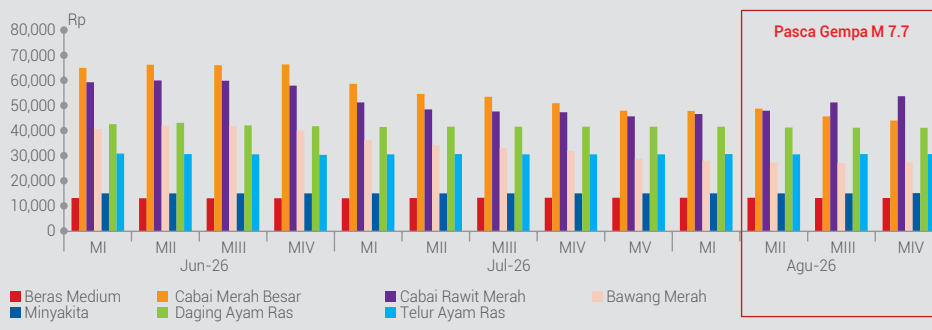
Kerusakan permukiman dan fasilitas umum menyebabkan sebagian masyarakat masih harus beraktivitas dalam kondisi yang belum sepenuhnya normal. Gangguan pada akses transportasi juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena memengaruhi konektivitas antarwilayah terdampak dan daerah lainnya. Kerusakan pada 120 ruas/titik jalan dan 71 jembatan berpotensi menyebabkan perubahan rute perjalanan, peningkatan waktu tempuh, maupun keterbatasan akses menuju beberapa lokasi. Sementara itu, 7 pelabuhan yang mengalami kerusakan ringan tetap perlu menjadi perhatian mengingat transportasi laut yang memiliki peranan penting dalam mobilitas barang dan masyarakat di wilayah Flores.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan arus barang menuju wilayah terdampak tidak selancar kondisi normal, terutama apabila terdapat ruas jalan atau fasilitas transportasi yang masih dalam proses pembersihan dan perbaikan.

Gangguan konektivitas berpotensi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap sejumlah lapangan usaha (LU) yang bergantung pada kelancaran mobilitas orang dan barang. Pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan keterbatasan akses dapat menghambat kegiatan produksi, distribusi, serta pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Sementara itu, Perdagangan Besar dan Eceran serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berpotensi terdampak melalui berkurangnya mobilitas masyarakat dan wisatawan, keterbatasan pasokan, serta penurunan jumlah pelanggan. LU Transportasi dan Pergudangan juga berpotensi mengalami penurunan aktivitas akibat perubahan rute dan meningkatnya waktu tempuh. Lebih lanjut, dampak juga dapat semakin terasa pada pelaku usaha skala kecil termasuk UMKM yang bergantung pada aktivitas ekonomi harian, adapun penurunan mobilitas masyarakat, terganggunya distribusi barang, serta kerusakan tempat usaha dapat menekan pemasukan dan jam operasional. Dengan demikian, dampak gempa tidak hanya terlihat pada kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek lanjutan terhadap aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan pendapatan masyarakat di wilayah terdampak.

Namun demikian aktivitas ekonomi di pasar wilayah terdampak secara umum mulai kembali pulih, dengan tingkat aktivitas yang belum sepenuhnya normal. Adapun berdasarkan pemantauan hingga 26 Agustus 2026 aktivitas di beberapa pasar seperti, Pasar Borong di Kabupaten

Grafik Boks 1.1. Perkembangan harga Komoditas Strategis pasca Gempa



Manggarai Timur masih berjalan normal, sementara Pasar Ende juga masih beroperasi secara normal. Lebih lanjut, di Kabupaten Sikka, Pasar Alok dan Tingkat masih berjalan meskipun aktivitasnya masih relatif sepi dibandingkan kondisi normal, terutama karena pasar-pasar desa masih terdampak oleh gempa. Sementara itu, aktivitas pasar di Kabupaten Manggarai dilaporkan sedikit menurun akibat gempa susulan, sedangkan aktivitas pasar di Kabupaten Manggarai Barat telah kembali normal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pemulihan aktivitas perdagangan masih sangat dipengaruhi oleh tingkat kerusakan dan kondisi keamanan masing-masing wilayah. Kondisi pasar yang mulai kembali beraktivitas menunjukkan adanya proses pemulihan, namun kelancaran perdagangan masih bergantung pada mobilitas masyarakat dan ketersediaan pasokan.

Adapun perkembangan harga komoditas menurut SP2KP pada daerah terdampak hingga 28 Agustus 2026 mencatat bahwa kondisi harga yang masih beragam antarjenis komoditas. Harga beras medium tercatat sebesar Rp13.774/kg, bawang merah Rp28.500/kg, cabai merah Rp45.774/kg, cabai rawit Rp55.833/kg, telur ayam ras Rp31.865/kg, daging ayam ras Rp42.759/kg, dan minyak goreng (minyakita) Rp15.782/kg. Dibandingkan dengan kondisi sebelum bencana, harga cabai rawit dan telur ayam ras tercatat lebih tinggi, sedangkan harga cabai merah dan daging ayam ras relatif lebih rendah. Pergerakan harga tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi pascagempa pergerakan harga komoditas strategis masih cukup terkendali. Namun demikian, peningkatan harga komoditas di daerah terdampak masih perlu diperhatikan terutama komoditas dari luar daerah seperti telur ayam ras, daging ayam ras, beras dan minyak goreng akibat dari *spill over* kendala jalur konektivitas.

Risiko inflasi pascabencana tidak hanya berasal dari gangguan pasokan pangan, tetapi juga berpotensi muncul dari peningkatan permintaan selama proses pemulihan dan rekonstruksi. Setelah fase tanggap darurat, kebutuhan terhadap bahan bangunan seperti seng, besi beton, batu bata, dan cat diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan rumah dan fasilitas umum yang rusak. Peningkatan kebutuhan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan harga apabila pertumbuhan permintaan tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Risiko yang sama dapat muncul pada BBM dan BBRT seiring meningkatnya aktivitas mobilitas, distribusi barang, serta kegiatan pembangunan kembali. Oleh karena itu, tekanan inflasi akibat bencana perlu dipandang sebagai risiko yang dapat berubah dari *supply shock* pada fase awal bencana menjadi *demand pressure* selama fase rekonstruksi.

Pemulihan kelancaran distribusi dan aktivitas pasar menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Dalam jangka pendek, pemantauan harga dan pasokan perlu dilakukan secara intensif pada kabupaten/kota pengukuran IHK, terutama terhadap komoditas pangan strategis. Percepatan pembersihan dan perbaikan jalan, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas distribusi juga diperlukan untuk memastikan arus barang menuju wilayah terdampak tetap berjalan. Pada wilayah yang aktivitas pasarnya telah kembali normal, pelaksanaan pasar murah dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap komoditas dengan harga yang wajar. Komunikasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat untuk mencegah pembelian secara berlebihan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap stok.

Secara keseluruhan, kondisi pascagempa Flores menunjukkan bahwa proses pemulihan masyarakat dan aktivitas wilayah masih berlangsung secara bertahap dengan kondisi yang berbeda antarwilayah. Besarnya jumlah pengungsi, kerusakan permukiman dan fasilitas umum, gangguan pada sebagian jaringan transportasi, serta masih terjadinya gempa susulan menjadi faktor yang memengaruhi aktivitas masyarakat. Meskipun sebagian pasar telah kembali beraktivitas dan belum terdapat kenaikan harga pada seluruh komoditas, kondisi pasokan, distribusi, dan perubahan kebutuhan masyarakat tetap perlu dipantau secara intensif.

Daftar Istilah

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	adalah rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak efisien operasi bank.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.
Cost push inflation	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya
Credit rating	Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi
Dana Alokasi Khusus (DAK)	adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Alokasi Umum (DAU)	adalah Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
Deflasi	Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
Depresiasi rupiah	Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Devisa	Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional
E-money	Uang elektronik
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan
Indeks kedalaman kemiskinan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin
Indeks keparahan kemiskinan	Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin
Inflasi	Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum
Inflow	adalah Setoran uang tunai di Bank Indonesia
Kas Keliling	adalah Kegiatan penukaran uang keliling.
Layanan Keuangan Digital (LKD)	adalah Kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga.
Less cash society	Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai
Loan to Deposit Ratio (LDR)	adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya

TIM PENYUSUN



- **Penanggung Jawab :**

Adidoyo Prakoso

- **Editor**

Ari Setyo Wibowo

Alfin Ari Wijayanto

Teguh Ersada Natail Sitepu

- **Tim Penulis**

Ahmad Akhirul Fatoni

Yose Shariati Januar

Jeremia June Caesar Parsinabul

Merpati Vortuna Amerta Nalle

Renata Luna Kesumaratri

- **Supporting**

Achmad Al Ahsan

Johanis Kuahaty

Nova Pratiwi Damayanti

Jibrael Petrus Brayen Leo Lede

Kontributor

- Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA
Tim Implementasi Sistem Pembayaran,
Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. El Tari No. 39

Kupang - NTT, 85111

Tel. (0380) 832047

www.bi.go.id





**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TIM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEKDA
Jl. El Tari No. 39 Kupang - NTT
Telp. (0380) 832364, Fax. (0380) 822103
www.bi.go.id